



Dr. Sakaria To Anwar, M.Si, lahir pada hari Sabtu, 30 Januari 1969 di Kota Palopo. Masuk Sekolah Dasar Negeri 69 Binturu Kota Palopo pada Tahun 1976 dan tamat Tahun 1982. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri Standar yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palopo pada Tahun 1982 dan tamat pada Tahun 1985. Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri I Kota Palopo pada Tahun 1985 dan tamat Tahun 1988. Ia menamatkan S1 pada tahun 1993 di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas). Semasa kuliah, ia adalah kader HMI dan fungsionaris kelembagaan

mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Setelah lulus, putra dari pasangan Djamuta To Anwar dan Dahlia ini menjadi asisten dosen di almamaternya. Pada tahun 1999, Pak Sakaria, demikian ia disapa oleh koleganya, melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi Sosiologi FISIP Unhas. Gelar Doktor Sosiologi ia peroleh dari Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Program Studi Sosiologi Pedesaan Fakultas Ekologi Manusia melalui pendanaan Dirjen DIKTI Kemendikbud. Kini, Dr. Sakaria To Anwar, M.Si menjadi tenaga pengajar tetap (PNS) di Departemen Sosiologi FISIP Unhas. Selain akademisi, ia juga aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional. Selain itu, ia juga aktif melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Penerbit:

PT. Maupa Masagena Media Kreasindo

BTN. Minasa Upa Blok AB 16 No. 1 A Kota Makassar, 90122

alamat blog: penerbitmaupamasagena@blogspot.co.id

email: masasukses@gmail.com

Kontak: 085 255 760 663 atau 085757614595

ISBN: 978-602-61848-3-2



KAPITAL SOSIAL, NEGARA DAN PASAR

Dr. Sakaria To Anwar, M.Si

KAPITAL SOSIAL NEGARA & PASAR

Dr. Sakaria To Anwar, M.Si

Pengantar

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A



Kapital Sosial, Negara dan Pasar

Dr. Sakaria To Anwar, M.Si

Penerbit:
PT. Maupa Masagena Media Kreasindo
2017

**Kapital Sosial,
Negara & Pasar**

Penulis:
Sakaria To Anwar, M.Si

ISBN: 978-602-61848-3-2

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
HVS 70 gr 21.5 x 14.5 cm @176 halaman + xvi
Cetakan I, Maret 2018

Desain Sampul dan Tata Letak:
Syamsuddin Simmau

Penyunting:
Muhammad Irwan Rauf
Syamsuddin Simmau

Penerbit:
PT. Maupa Masagena Media Kreasindo
Jl. Aroepala BTN. Minasa Upa Blok AB 16 No. 1 A Kota Makassar, 90221.
Email: masasukses@gmail.com
Blog: <http://penerbitptmaupamasagenamediakreasindo.blogspot.co.id/>
Mobile contact: 085 255 760 663 atau 0858 2539 4934

@2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izi tertulis dari Penerbit.

Salam Penerbit

Betapa besar rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Sang Maha Mengetahui lagi Maha Berilmu karena atas nikmat dan karuniaNya yang demikian besar sehingga buku *Kapital Sosial, Negara dan Pasar* karya Dr. Sakaria To Anwar, M.Si ini dapat kami terbitkan. Kami sungguh berterimakasih kepada penulis karena memberi kepercayaan kepada kami untuk menerbitkan buku referensi yang menarik ini. Demikian pula, ucapan terimakasih yang tulus kami haturkan kepada Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hj. Aries Tina Pulubuhu, M.A atas kerendahan hati Beliau untuk memberi pengantar dan apresiasi yang besar terhadap buku ini.

Buku bertema *Kapital Sosial* masih dipandang langka untuk konsumsi akademik, riset dan pemberdaya masyarakat serta pengambil kebijakan. Apalagi, buku bertema sejenis, yang spesifik mengurai tentang “reduksi” kapital sosial pada masyarakat pulau-pulau kecil, masih sangat jarang dijumpai

di pasaran. Karena itu, kami sungguh beruntung karena dapat menghadirkan buku ini ke hadapan pembaca sekalian.

Kapital sosial yang dideskripsikan penulis menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang kurang cermat berdampak pada tergerusnya kapital sosial. Bahkan, lebih rinci, penulis mengurai relasi kapital sosial dengan kekuasaan dan pasar. Hal ini yang kemudian menjadi kekuatan menarik buku ini.

Karena itu, kami berharap kiranya masyarakat pembaca; akademisi, mahasiswa, pengambil kebijakan dan pemberdaya masyarakat dapat memiliki buku ini dan menjadikannya sebagai rujukan penting. Sehingga, cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dapat terealisasi. Selain itu, buku ini sekaligus menjadi fakta empirik bahwa para akademisi bukanlah sekadar penonton dalam pembangunan tapi mereka juga berkontribusi aktif melalui riset dan publikasi sebagai upaya untuk mendistribusikan ilmu pengetahuan kepada publik.

Sehingga, tidaklah berlebihan jika kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku referensi ini. Semoga ia bermanfaat bagi nusa dan bangsa, amin.

Makassar, Maret 2018

Salam Hormat,

Penerbit

Pengantar Penulis

Tiada kata yang patut penulis sampaikan pada kalimat pembuka dalam pengantar ini, kecuali puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan Semesta Alam. Karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya jualah sehingga buku yang disari dari tugas akhir saya pada Program Studi Sosiologi Pedesaan (SPD) jenjang doktoral (S3) Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) dapat diselesaikan.

Perbincangan mengenai kapital sosial pada akhir abad 20 dan memasuki abad 21 semakin marak dilakukan, tidak hanya di kalangan akademisi, tapi juga di kalangan pengambil kebijakan, swasta dan pemerintahan bahkan politisi. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan referensi maka buku hasil penelitian ini penting menjadi rujukan. Urgensi buku ini terletak pada pembahasan yang spesifik dan mendalam mengenai; dampak intervensi negara terhadap perubahan kapital sosial pada komunitas nelayan pulau-pulau kecil Dalam hal ini, dapat dideskripsikan proses dan dimensi kapital sosial yang mengalami penyusutan (tergerus) atau bertambah dan bergeser. Selain itu, buku ini juga

menyajikan hasil analisis dampak penetrasi pasar terhadap perubahan kapital sosial pada komunitas nelayan pulau-pulau kecil. Terkait dengan hal ini, pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pintu masuk dalam melakukan kajian, pembahasan dan analisis.

Kehadiran buku ini diharapkan berkontribusi bagi pemecahan masalah terkait program-program pembangunan komunitas nelayan pulau-pulau kecil. Sehingga, pada masa mendatang, program pembangunan lebih menyejahterakan masyarakat tanpa membuat kapital sosial komunitas nelayan mengalami penyusutan (dekapitalisasi). Selama ini, ketersediaan data sosial dan kelembagaan lokal, terutama bagaimana kondisi atau situasi kapital sosial dan bagaimana kontribusi kapital sosial yang dimiliki masyarakat dalam menunjang program-program pembangunan yang terkait dengan komunitas nelayan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, buku yang disarikan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dasar bagi penentuan kebijakan terutama yang terkait dengan kontribusi nilai-nilai sosial atau pranata-pranata sosial, dalam pembangunan komunitas pulau-pulau kecil. Selain itu, pembahasan dalam buku ini juga menyajikan data sosial seperti rasa percaya atau kepercayaan (*trust*), jaringan kerja, kerjasama, nilai/norma dan kelembagaan. Yang tidak kalah pentingnya, buku ini memberi informasi dan kontribusi terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan sosial terutama sosiologi ekonomi dan kelembagaan sosial.

Melalui ruang terbatas ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Para pembimbing yang saya hormati dan banggakan Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, M.S selaku ketua komisi, Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, M.Sc dan Prof. Dr Ir. Aida Vitayala S. Hubeis. Masing-masing selaku anggota komisi pembimbing. Melalui “dedikasi” yang sangat tinggi, mereka telah “mencurahkan” waktu dan perhatiannya untuk menjadikan saya sebagai “mahasiswa terdidik” dengan harapan kelak kemudian akan menjadi alumni yang membanggakan dan menjunjung tinggi kehormatan almamater.
2. Ucapan yang sama saya sampaikan kepada penguji luar komisi ujian tertutup Dr. Ir. Arya H. Dharmawan, M. Sc, M. Agr, Dr. Ir. Arif Satria, M.S dan Dr.Ir.Siti Amanah, M. Sc serta Dr. Linda Damarjanti MT, sebagai penguji luar komisi ujian terbuka. Meskipun dalam suasana kesibukan yang sangat padat, namun mereka sangat responsif ketika saya tawari sebagai penguji luar komisi.
3. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada segenap tenaga kependidikan IPB pada semua tingkatan baik di Dermaga maupun di Barangsang, yang telah membantu kelancaran mulai dari proses perkuliahan sampai pada penyelesaian studi. Tanpa keberadaan mereka niscaya proses perkuliahan dan penyelesaian studi saya tidak akan sampai pada tahap akhir.
4. Ucapan yang sama saya sampaikan kepada seluruh responden, informan dan asisten lapangan. Atas bantuan dan kerja sama dari mereka sehingga saya dapat memperoleh informasi dan data di lokasi penelitian tanpa hambatan yang berarti.
5. Bantuan dan dukungan yang juga tak kalah pentingnya

datang dari teman-teman mahasiswa terutama seletting (2009) Adriana Monica Sahidu, Muh. Syukur, Mahmuddin, Soetji Lestari dan Threwaty Arsal atas segala partisipasi, sikap saling peduli dan kebersamaannya sejak dari awal perkuliahan sampai pada masa-masa akhir penyelesaian studi sehingga tercipta suasana akrab dan bersahabat. Atas segala bantuan dan dukungan yang tak ternilai harganya tersebut penulis sampaikan terima kasih.

6. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua guru-guru saya mulai dari tingkatan sekolah dasar sampai pada tingkatan S3, khususnya kepada dosen-dosen saya di Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia—Institut Pertanian Bogor. Atas jasa-jasanya, budi baik dan dedikasi yang tinggi telah menjadikan saya sampai pada pencapaian jenjang tertinggi pendidikan di Indonesia.
7. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Djamuta To Anwar (Alm) dan Ibunda Dahlia (Almh) yang meskipun keduanya tidak sempat menamatkan pendidikan pada tingkatan sekolah rakyat (SR), namun berkat harapan dan doa mereka membuat saya sangat termotivasi untuk meraih ijazah pendidikan sampai jenjang S3. Demikian pula kepada kedua mertuaku, Ayahanda H. Andi Muhammad Arsyad dan Ibunda Hj. Andi Te'ne atas doa, bantuan dan pengorbanannya baik materil maupun moril selama saya

- menempuh pendidikan S2 dan S3. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada mereka. Termasuk didalamnya, Pamanku Drs. Hasbi Gama, M. Si atas segala bantuan dan dukungannya selama menempuh pendidikan S3.
8. Ucapan terima kasih dan penghargaan teristimewa saya sampaikan kepada istriku tercinta Andi Nurbaya Arsyad, S.Sos dengan kerelaan, kesabaran dan kesetiiaannya menunggu di Makassar selama saya menempuh pendidikan. Berpisah dalam jarak yang begitu jauh dan durasi pertemuan hanya sekali dalam tiga bulan merupakan pengorbanan yang tak ternilai harganya buat keluarga. Akhirnya maha karya yang sangat monumental ini saya dedikasikan dan persembahkan kepada anak-anakku tercinta, harapan keluarga pada masa akan datang Muhammad Fadhil Mundzir, Moh. Adriel Sofpyan, Nurul Auliyah Putri dan Salfadillah Aszahra. Maafkan ayah nak, karena demi tuntutan pendidikan terpaksa kalian tumbuh dan berkembang hingga besar tanpa bimbingan dari Ayah.
9. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu baik materil maupun moril, namun tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu selama saya menempuh pendidikan S3 di Bogor. Harapan dan doa semoga jasa-jasa dan budi baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin amin Yaa Rabbal Alamin.

Secara khusus, izinkan pula saya menghaturkan terimakasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Dekan FISIP dan Ketua Prodi Sosiologi FISIP (Unhas) atas dukungan yang diberikan selama saya melanjutkan studi. Demikian halnya, saya berterima kasih kepada para kolega saya di Prodi Sosiologi FISIP Unhas atas motivasi dan dukungan yang berharga. Semoga buku ini dapat memperkaya khasanah akademika kita, amin. Terimakasih.

Makassar, Februari 2018

Penulis,

Sakaria To Anwar

Mewaspadaai Degradasi Kapital Sosial dalam Pembangunan

Catatan Pengantar
Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A
Rektor dan Guru Besar Sosiologi Universitas Hasanuddin

Kapital Sosial, Negara dan Pasar menyadarkan kita pada realitas sosial yang riil, bukan simulasi, seperti yang dikemukakan Jean Baudrillard¹. Menurut Baudrillard, masyarakat masa kini adalah masyarakat *hiperrealitas*. Masyarakat berada pada realitas yang serba simulasi. Bahkan menurut Kellner, Baudrillard menilai masyarakat kini adalah masyarakat dengan kultur yang mati. Hasil penelitian disertai Dr. Sakaria To Anwar, M.Si, sebagaimana disarikan dalam buku ini, menunjukkan gejala yang mengarah pada pendapat Baudrillard.

Menurut Dr. Sakaria To Anwar, M.Si, intervensi negara dan penetrasi pasar berupa program pembangunan, aliran masuk barang, jasa/orang, dan komersialisasi hasil laut

¹ Menurut George Ritzer-Douglas J.Goodman (2010) dalam Teori Sosiologi Modern.

telah menyebabkan perubahan terhadap kehidupan komunitas lokal. Hal ini dicirikan oleh adanya ketidakseimbangan hubungan negara dengan komunitas lokal. Kondisi ini mengakibatkan “*goncangan sosial*” sehingga dapat mendistorsi harmoni kehidupan sosial dan menggerus kapital sosial komunitas. Pendapat ini relevan dengan Francis Fukuyama dalam *The Great Disruption*² (Guncangan Besar). Fukuyama mengemukakan bahwa salah satu penyebab terjadinya guncangan besar tatanan sosial adalah akibat adanya kebijakan pemerintah yang keliru.

Tergerusnya modal sosial, yang oleh Dr. Sakaria To Anwar, M.Si, disebut Kapital Sosial, memerlukan kajian mendalam secara ilmiah. Karena menurut Fukuyama, modal sosial sangat penting dalam mewujudkan masyarakat sipil yang sehat. Bahkan, modal sosial memberi ruang bagi berbagai kelompok sosial dalam masyarakat yang kompleks untuk bergabung memperjuangkan kepentingan masing-masing yang mungkin diabaikan oleh negara yang kuat. Dalam hal ini, perjuangan atas kepentingan-kepentingan bukanlah bermakna disintegrasi tapi dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagai mana cita-cita Bangsa Indonesia.

Buku ini menyajikan fakta ilmiah yang menarik, tidak hanya dalam konteks makro, tapi ia masuk dalam perbincangan realitas mikro, seperti interaksi antar anggota keluarga dan tetangga dalam komunitas masyarakat pulau kecil. Bahkan, dalam buku ini, dikemukakan fakta tentang

² Francis Fukuyama dalam *The Great Disruption* (Guncangan Besar, 2005).

terjadinya penurunan kepercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini penting mendapat perhatian dari semua pihak, termasuk akademisi, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Fukuyama³ menekankan bahwa *trust* merupakan elemen kunci dalam sosiabilitas dan modal sosial. Dengan demikian terjadinya *distrust* pada masyarakat dapat berdampak pada melemahnya kohesi dan integrasi dalam masyarakat.

Meski demikian, ada optimisme yang kuat untuk membangun masyarakat peisir dan pulau-pulau kecil agar lebih berdaya dan sejahtera. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terjadi penurunan tingkat kepercayaan, namun pada sisi lain, ada fakta yang menunjukkan bahwa intervensi negara dan penetrasi pasar mendorong terbentuknya jaringan-jaringan sosial baru dalam masyarakat peisir dan pulau kecil. Indikatornya adalah terbangunnya solidaritas sosial antar kelas di dalam pulau (*bridging social capital*) dan dengan pihak lain di luar pulau (*linking social capital*).

Sebagai karya berbasis akademik, buku ini tentulah tidak hanya mendeskripsikan fakta secara kritis tapi juga membuka ruang untuk intervensi kebijakan yang lebih partisipatif dan penghargaan terhadap potensi sumber daya lokal (kapital sosial). Hal ini sesuai dengan rekomendasi penelitian buku ini, bahwa pemanfaatan potensi lokal (kapital sosial) yang dimiliki masyarakat, terutama usaha untuk membangun kepercayaan (*trust*), khususnya antara pemerintah dengan masyarakat dan pelibatan masyarakat

³ Francis Fukuyama dalam *Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (2007).

secara langsung dalam semua tahapan proses pembangunan, seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Hal penting lainnya yang patut mendapat perhatian adalah pemerintah dan *stakeholders* dapat membangkitkan kembali nilai-nilai lokal sebagai elemen modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga, pembangunan tidak menyebabkan masyarakat menjadi terasing dan bahkan teralienasi dari pembangunan, yang justru diperuntukkan untuk mereka.

Akhirnya, sebagai wujud apresiasi yang tinggi, kita perlu berterimakasih kepada penulis buku ini karena telah berupaya menyadarkan kita akan dampak dari intervensi pembangunan dan penetrasi pasar (komersialisasi) bagi masyarakat. Selain itu penulis juga telah sungguh-sungguh mengembangkan budaya menulis dan publikasi ilmiah, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya tinggal “sepi” di rak-rak buku kampus. Tapi ilmu pengetahuan dapat terdistribusi kepada masyarakat luas sebagai referensi dalam pembangunan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, Maret 2018

Daftar Isi

SALAM PENERBIT	iii
PENGANTAR PENULIS	v
KATA PENGANTAR REKTOR UNHAS	xi
DAFTAR ISI	xv
1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Fenomena Kapital Sosial pada Komunitas Nelayan	9
C. Konstruksi Berpikir tentang Kapital Sosial pada Komunitas Nelayan	11
2. Tinjauan Teoritis tentang Kapaital Sosial	15
A. Perkembangan Konsep dan Teori Kapital Sosial	15
B. Sumber dan Dimensi Kapital Sosial	34
C. Studi-Studi Kapital Sosial Terdahulu	37
D. Konsep Komunitas dan Pulau-Pulau Kecil	44
E. Intervensi Negara dan Penetrasi Pasar terhadap Komunitas Lokal	49
3. Dampak Intervwnsi Negara terhadap Perubahan Kapital Sosial pada Komunitas Nelayan Pulau-pulau Kecil	55
A. Tergesernya Kepercayaan (<i>Trust</i>) pada Komunitas Nelayan	55

B. Posisi Indeks Kepercayaan (<i>Trust</i>) pada Komunitas PBL	81
C. Jaringan Sosial pada Komunitas PBL	85
4. Dampak Penetrasi Pasar terhadap Perubahan Kapital Sosial pada Komunitas Nelayan Pulau-pulau Kecil	107
A. Tergerusnya Kepercayaan (<i>Trust</i>) Komunitas PBL Kepada Pengusaha Lokal	108
B. Pergeseran dan Tergerusnya Nilai/Norma pada Komunitas Nelayan	112
5. Implikasi Teoritis dan Kebijakan	153
A. Kesimpulan	153
B. Implikasi Teoritis	156
C. Implikasi Kebijakan	163
DAFTAR PUSTAKA	167

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah total pulau sebanyak 17.508 buah yang keseluruhannya memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada, yaitu 81.000 Km. (Dahuri, 1992, BPPT Wanhankamnas, 1996). Dari total luas wilayah tersebut, sekitar 67% merupakan wilayah pesisir dan lautan. Kawasan pesisir yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur dan dari arah selatan hingga ujung utara, sejak dulu telah dihuni oleh penduduk yang saat ini jumlahnya telah mencapai sekitar 60% dari total penduduk Indonesia (Bappenas, 2004). Para ahli sejarah mengatakan bahwa, pada awalnya—penduduk yang mendiami nusantara, tinggal dan hidup di wilayah pesisir. Kemudian mereka membentuk komunitas-komunitas atas dasar jenis/corak pekerjaan

dan etnis/suku, komunitas tersebut antara lain misalnya: komunitas nelayan, komunitas pelayar, komunitas pedagang (saudagar), Suku Bajo, Suku Bugis dan beberapa suku lainnya yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir. Keberadaan komunitas-komunitas tersebut dari sisi kehidupan sosial ekonomi, nelayan merupakan komunitas paling miskin dibanding komunitas lainnya (Hamid, Abu, 1989). Apa makna dan implikasi dari keseluruhan data di atas? Salah satunya adalah bahwa wilayah pesisir maupun lautan, memiliki arti penting dan sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia.

Mengacu data BPS (2010), terlihat bahwa sejak tahun 1976 terdapat 54,2 juta jiwa penduduk miskin atau sekitar 40,00% dari total penduduk Indonesia. Suatu angka kemiskinan yang sangat tinggi pada awal pemerintahan orde baru. Meskipun ketika itu angka kemiskinan sangat tinggi, namun secara keseluruhan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Seiring dengan berjalannya program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Terutama sejak tahun 2006 hingga 2009 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup berarti yaitu dari 39,30 juta (17,75%), menjadi 32,53 juta jiwa (14,15%). Namun angka tersebut masih tergolong tinggi dari capaian yang diharapkan. Angka kemiskinan masyarakat yang masih tinggi tersebut sekitar 16,56% tinggal di perdesaan dan hanya 9,87% saja yang tinggal di perkotaan (BPS, 2010).

Angka kemiskinan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010, berkisar 913.400 jiwa. 794.200 jiwa dari penduduk miskin tersebut tinggal di perdesaan dan

sisanya berada di perkotaan—sekitar 119.200 jiwa (BPS, 2010). Angka-angka yang telah ditunjukkan di atas, memberi indikasi bahwa penduduk yang hidup di wilayah perdesaan sangat tertinggal jauh dibanding penduduk yang hidup di wilayah perkotaan, padahal situasi ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena basis produksi kebutuhan pokok masyarakat bangsa ini berada di perdesaan. Sebagai wilayah pensuplai, pada kondisi yang normal seharusnya masyarakat perdesaan lebih sejahtera dari pada daerah yang disuplai, bukan sebaliknya.

Saat ini terdapat 7,8 juta jiwa penduduk desa pesisir dalam kondisi miskin. Termasuk permukiman dan fasilitas-fasilitas utama, misalnya pendidikan dan sarana umum lainnya yang sangat memprihatinkan (KKP, 2011). Dari total penduduk yang bermukim di wilayah pesisir terdapat 4 juta kepala keluarga yang tersebar di 8.090 desa pesisir, ternyata hidup dalam kemiskinan (pendapatan kurang dari Rp. 300.000/bulan) (Saad, 2009). Angka ini semakin menguatkan pernyataan di atas, bahwa yang paling merasakan kemiskinan di tengah proses pembangunan yang sementara berjalan adalah komunitas nelayan. Terutama nelayan di pulau-pulau kecil yang umumnya menggantungkan pekerjaan mereka pada sektor kenelayan saja, karena terbatasnya lahan untuk sektor pertanian.

Padaحال sudah bukan rahasia umum lagi bahwa pekerjaan sektor nelayan masih bersifat “*open access*” dimana untuk mendapatkan hasil maksimal, nelayan harus berpindah-pindah itupun hasilnya tidak menentu (*unpredictable*). Sehingga rawan resiko kegagalan dari pada bekerja

di sektor pertanian (Satria, 2002). Bahkan pada bulan tertentu mereka harus menghadapi musim paceklik karena faktor alam, misalnya besarnya ombak, terpaan angin kencang dan sebagainya. Kondisi demikian membuat para nelayan di pulau-pulau kecil hanya berusaha untuk hidup apa adanya. Sajogyo (1997) mengatakan bahwa, salah satu indikator kemiskinan terjadi adalah ketika tingkat pendapatan berada di bawah standar kehidupan minimum yang dinilai berdasarkan kebutuhan pokok pangan seseorang, untuk dapat bekerja dan hidup sehat melalui pemenuhan kebutuhan beras serta kebutuhan gizi. Angka kemiskinan yang tinggi di komunitas nelayan, mendorong berbagai intervensi dari negara dengan standar birokrasi dan administrasi yang baku melalui program pembanguana. Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dari kalangan organisasi non pemerintah misalnya LSM, swasta dan sebagainya. Sebagai misal, sejak masa pemerintahan orde baru hingga saat ini pemerintah melalui pendekatan “*economic growth development*” suatu pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan—terutama sektor ekonomi (*charity*), tercatat telah melakukan berbagai program pembangunan terutama melalui program pemberdayaan masyarakat, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pangaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan (PDMDKE), Program Pembangunan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan yang terbaru saat ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang merupakan revisi dari P2KP, *Coral Reef Reha-*

bilitation and Management Program (COREMAP) dan lain sebagainya.

Intervensi negara melalui program pembangunan sebagaimana dimaksud, telah berlangsung lama dan juga telah berhasil mencapai prestasi. Namun pada sisi lain, belum dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Khususnya untuk komunitas nelayan yang bermukim di pulau-pulau kecil. Suatu pencapaian yang sangat disayangkan di tengah kesungguhan yang begitu tinggi untuk keluar dari kemelut kemiskinan. Kondisi ini semakin diperparah oleh cengkeraman penetrasi pasar yang menjangkau hingga ke pelosok desa termasuk pada wilayah pulau-pulau kecil. Interaksi antara intervensi negara dan penetrasi pasar bukannya membantu komunitas pulau-pulau kecil terlepas dari jeratan kemiskinan Akan tetapi membuat kapital sosial yang selama ini terpelihara dengan baik justru tergerus (*dekapitalisasi*). Hal ini terjadi karena program-program pembangunan yang telah dijalankan selama ini terlalu menyeragamkan persoalan masyarakat (bias heterogenitas) dan cenderung mengabaikan kapital sosial komunitas lokal. Dalam hal ini terjadi interaksi yang tidak seimbang antara negara sebagai suprastruktur menghegemoni komunitas nelayan sebagai substruktur (Gramsci, 1971). Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah dengan menggunakan ideologi. Kelas dominan merekayasa kesadaran kelas bawah, sehingga tanpa disadari mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Sebagai contoh ketika kelas dominan (pemerintah) melibatkan para intelektual dalam birokrasi pemerintahan dan intervensi melalui lembaga-

lembaga formal misalnya: pendidikan, seni, kebijakan publik dan sebagainya.

Intervensi budaya baru, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang menyertainya melalui program pembangunan, pada satu sisi dapat menyusutkan atau menggerus nilai-nilai dan pranata-pranata sosial komunitas nelayan yang berlandaskan atas asas tolong menolong (*solidaritas*). Namun pada sisi lain tanpa intervensi (modernisasi) berarti masyarakat *stagnan* (Hayami dan Kikhuci, 2002). Bahkan agen pembaharuan yang masuk ke dalam komunitas lokal, pada umumnya masih memandang bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang bodoh, kolot, tradisional, tertutup, miskin dan berbagai stereotif yang dilekatkan kepadanya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata developmentalisme juga menghasilkan kompromi budaya, antar sistem budaya yang saling bersinggungan, utamanya dari “atas” dan dari “bawah”. Sebagai akibat adanya kontestasi dan kompetisi budaya yang tidak berimbang antara negara dan komunitas, sehingga budaya lokal terpinggirkan. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya sejumlah disfungsi-sionalitas sosial yang selama ini dipelihara oleh institusi lokal.

Atas pandangan (*stereotif*) yang kurang simpatik seperti yang di sebutkan di atas, menyebabkan masyarakat tersingkirkan atau teralienasi dari program-program pembangunan itu sendiri. Karenanya tidak jarang program pembangunan yang dijalankan justru mendapat penolakan (*resistensi*) dari masyarakat setempat. Situasi ini membuat program pembangunan yang telah dicanangkan dan dijalankan gagal

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat lokal. Kini ikatan-ikatan itu menjadi hambar dan dingin, karena kuatnya arus kepentingan individual yang saling berbenturan. Faktor utama penyebab kegagalan demi kegagalan dari berbagai program pembangunan tersebut, ialah karena kurang atau bahkan tidak difungsikannya kapital sosial yang dimiliki masyarakat lokal, sebagai potensi yang mendukung program pembangunan (Hayami dan Kikhuci, 2002).

Terbaikannya kapital sosial masyarakat dari hegemoni negara dan penetrasi pasar melalui program pembangunan, birokrasi, administrasi, monetisasi dan kapitalisasi, tanpa disadari secara pelahan-lahan telah menyebabkan pranata-pranata lokal dan nilai-nilai kebersamaan berupa sikap tolong menolong, saling berbagi (*resiprositas*), rasa kepercayaan (*trust*), solidaritas dan sebagainya mengalami penyusutan atau tergerus (Fukuyama, 2004). Karenanya tidak heran jika saat ini pada komunitas perdesaan prilakunya cenderung individualis, tidak saling percaya (*distrust*) dan tidak solider (*disharmonis*) sehingga mudah terpropokasi yang kerap kali berujung pada situasi pertentangan (konflik). Studi awal peneliti, menunjukkan bahwa komunitas nelayan di Pulau Barrang Lompo telah mulai kehilangan sifat saling percaya, kerja sama (sifat gotongroyong) dan menurunnya sifat saling berbagi (resiprositas). Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pada sisi yang lain, terjadi penambahan atau perluasan jaringan sosial terutama dengan komunitas dari luar wilayah mereka. Demikian juga semangat keberagamaan (*spirit religiusitas*) mereka tampaknya meningkat.

Apabila proses penyusutan kapital sosial dibiarkan berlarut-larut maka semakin lama masyarakat kita akan semakin kehilangan pegangan hidup dan jati dirinya. Karena nilai-nilai dan pranata-pranata sosial mereka telah digantikan dengan nilai-nilai dan pranata-pranata baru tanpa disadari. Sehingga mereka semakin teralienasi dengan komunitasnya sendiri. Pada posisi yang demikian, sesungguhnya mereka menjadi rapuh dalam berbagai hal, mudah goyah dan tak terkendali.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa, program pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan (*growth mainstream*) melalui mekanisme pasar dan bersaing sempurna antar aktor yang telah “*mensosialisasi*” setiap warga yang tadinya terikat oleh nilai-nilai lokal kolektif, menjadi semakin individualistik dan egoistik. Sikap ini tidak hanya tampak dalam kehidupan sosial, melainkan juga dalam pergaulan sosial. Proses-proses sosial dissosiatif semakin mewujud dalam kehidupan sehari-hari, sementara proses-proses sosial yang assosiatif semakin terlupakan. Manakala setiap individu mengejar pemuasan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif. Pada titik ini, masyarakat lokal akan mengalami proses yang disebut oleh Dharmawan (2002) sebagai kemiskinan Kapital Sosial atau “*dekapitalisasi*” kapital sosial. Hal ini ditandai oleh hilangnya *trust* dan pecahnya ikatan-ikatan asosiasional. Berdasarkan latar belakang di atas maka pembahasan mengenai *kapital sosial, negara dan pasar* penting untuk dianalisis secara mendalam.

B. Fenomena Kapital Sosial pada Komunitas Nelayan

Intervensi negara dan penetrasi pasar melalui program pembangunan, lancarnya arus barang, jasa dan orang serta komersialisasi hasil laut (monetisasi), telah menyebabkan perubahan besar (kemajuan) dalam masyarakat pada satu sisi. Namun pada sisi yang lain, ternyata intervensi negara dan penetrasi pasar juga telah menimbulkan berbagai persoalan, misalnya intervensi sebagai bentuk interaksi sosial antara negara, pasar dan komunitas lokal yang menghasilkan ketidakseimbangan hubungan (negara menghegemoni komunitas lokal) antara ideologi (aspek kultural) dan struktur sosial (Gramsci, 1993, Kolopaking L.M. 2011). Kondisi tersebut mengakibatkan *social disruption* (guncangan sosial) yang justru menggoyahkan dan secara terus menerus akan mendistorsi harmoni kehidupan sosial yang sebelumnya telah dicapai. Dalam studi ini disebut sebagai penyusutan atau penggerusan kapital sosial. Penyusutan (dekapitalisasi) kapital sosial yang menyertai proses pembangunan merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat lokal (Fukuyama, 2002).

Penurunan kualitas kehidupan sosial yang memengaruhi solidaritas sosial masyarakat perlu memperoleh perhatian serius. Sebab penetrasi budaya baru dan nilai-nilai yang menyertai proses pembangunan dalam jangka panjang, sangat mungkin akan menyusutkan (menggerus) atau bahkan mematikan kapital sosial (Fukuyama, 2002). Kemudian digantikan dengan pranata-pranata baru yang mungkin saja justru bertentangan dengan nilai dan norma yang selama ini dianut masyarakat. Akan tetapi tanpa

intervensi (modernisasi) berarti masyarakat *stagnan* (Hayami dan Kikhuci, 2002). Namun apabila proses penggerusan terus terjadi, maka secara perlahan masyarakat kita akan semakin kehilangan identitas diri. Dan selanjutnya akan membuat mereka berada pada kondisi yang gampang diombang-ambingkan oleh perubahan itu sendiri, karena mereka tidak lagi memiliki pegangan hidup yang jelas (*anomalis*).

Bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang miskin sumber daya alam (komunitas pulau-pulau kecil), seringkali hanya memiliki sumber daya sosial sebagai satu-satunya aset penting dalam pembangunan (Satria, Arif, 2002). Sebagai akibat dari pelaksanaan program pembangunan yang lebih mengutamakan pembangunan material dan ekonomi, atau lebih berorientasi pada pemenuhan ekonomi saja (*charity*). Cenderung mengabaikan pembangunan sumberdaya sosial berbasis komunitas lokal (Naping, 2013). Terbaikannya pembangunan sumber daya sosial sangat mungkin menyebabkan penyusutan (tergerusnya) kapital sosial pada dimensi tertentu. Situasi tersebut kemudian menekan produktivitas kerja dan mendorong terbangunnya jaringan kerja yang tidak efisien, melemahnya norma-norma, hilangnya nilai-nilai serta kapasitas komunitas lokal (desa) yang akhirnya akan merugikan semua pihak yang berinteraksi dalam proses pembangunan (Kolopaking L.M, Sudir Santoso, Susetiawan, 2011).

Intervensi negara pada suatu wilayah (komunitas) sebagaimana tujuan tulisan ini dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana program pembangunan berlangsung pada wilayah (komunitas) itu. Secara umum, terdapat tiga

program pembangunan yang menjadi fokus bahasan tulisan ini. Sebagai bagian dari proses pembangunan yang berdampak terhadap perubahan kapital sosial pada suatu komunitas. *Pertama*; pembangunan kelembagaan pemerintahan yaitu perubahan dari sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan kelurahan. *Kedua*; pembangunan/-perbaikan jalanan meliputi pemasangan pavin blok pada ruas jalanan utama dan lorong serta gang-gang. *Ketiga*; pembangunan dermaga pelabuhan Pulau Barrang Lompo. Adapun penetrasi pasar dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana derasnya arus barang, jasa dan orang masuk ke dalam komunitas pulau dan bagaimana komunitas pulau menjadikan hasil laut sebagai komoditas perdagangan (komersialisasi hasil laut). Dalam hal ini masyarakat telah menempatkan uang sebagai sumber mutlak dalam menjalani kehidupan atau berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari (monetisasi).

C. Konstruksi Berpikir tentang Kapital Sosial pada Komunitas Nelayan

Rumah tangga perdesaan (komunitas nelayan) pada umumnya harus menghadapi beragam resiko kehidupan yang berujung pada situasi kemiskinan baik yang disebabkan oleh faktor manusia (*human capital*) itu sendiri, sumber daya alam (*natural capital*) maupun oleh perubahan lingkungan (*setting ecology*), termasuk di dalamnya aspek historis (*setting sejarah*) suatu komunitas. Bagi komunitas nelayan, kemiskinan ekonomi—termasuk permukiman dan fasilitas-fasilitas utama, misalnya; pendidikan dan sarana umum, masih sangat

memprihatinkan (KKP, 2011). Situasi ini menguatkan stigma bahwa kemiskinan merupakan bagian tak terpisahkan dari komunitas nelayan. Terutama bagi nelayan-nelayan yang berada di pulau-pulau kecil yang pada umumnya menggantungkan pekerjaannya pada sektor kenelayanan, karena terbatasnya lahan untuk sektor pertanian. Padahal pekerjaan sektor nelayan masih bersifat *open access* karenanya hasil yang didapatkan tidak menentu (*unpredictable*) sehingga rawan resiko kegagalan daripada bekerja di sektor pertanian (Arif Satria, 2002). Bahkan pada bulan-bulan tertentu nelayan harus menghadapi musim paceklik karena faktor alam. Kondisi demikian membuat para nelayan di pulau-pulau kecil hanya berusaha untuk hidup apa adanya (*safety first*).

Fakta masih tingginya angka kemiskinan pada komunitas nelayan menjadi fenomena yang kontras dengan ketersediaan sumberdaya yang ada di sepanjang pesisir pantai wilayah Indonesia. Kegelisahan seperti itulah yang menjadi pendorong utama masuknya intervensi negara dan penetrasi pasar melalui program pembangunan, birokrasi, administrasi dan monetisasi serta kapitalisasi. Transformasi perdesaan yang berwujud pembangunan berbasis modernisme melalui intervensi negara dan penetrasi pasar yang melibatkan baik aspek kulturalnya (*habitus*) maupun aspek struktur sosial telah menyebabkan “*social disruption*” dan “guncangan sosial”. Dalam arti bahwa intervensi negara dan penetrasi pasar melalui program pembangunan pada satu sisi dapat membuat kapital sosial menyusut (dekapitalisasi) dan disisi lain mungkin akan terjadi penambahan (rekapitalisasi) pada dimensi tertentu. Mungkin juga kapital sosial

itu kokoh bertahan ataukah hanya mengalami pergeseran bentuk saja.

Secara konseptual, maksud dan tujuan dari beragam program pembangunan yang telah berjalan selama ini sebenarnya sangat mulia dan sangat menjanjikan. Namun pada kenyataannya program tersebut “belum” berhasil meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, terutama komunitas nelayan. Faktor utama penyebab kegagalan demi kegagalan dari berbagai program pembangunan tersebut, adalah karena kurang atau bahkan tidak difungsikannya kapital sosial yang dimiliki masyarakat lokal sebagai potensi yang mendukung program pembangunan tersebut (Yujiro Hayami dan Masao Kikhuci, 2002).

Terbaikannya kapital sosial masyarakat dari hegemoni negara (pemerintah) dan pasar (kapitalisasi) melalui program pembangunan, administrasi, birokrasi, monetisasi dan kapitalisasi tanpa disadari secara perlahan-lahan telah membuat pranata-pranata lokal dan nilai-nilai kebersamaan berupa sikap tolong menolong, saling berbagi (resiprositas), rasa kepercayaan (trust), solidaritas dan sebagainya semakin menyusut atau merosot (Fukuyama, 2004). Akibatnya tidak heran jika saat ini pada komunitas-komunitas perdesaanpun cenderung memiliki perilaku individualis, tidak saling percaya satu sama lain (distrust) dan tidak solid (disharmonis), sehingga mudah terpropokasi yang kerap kali berujung pada situasi pertentangan (konflik). Studi awal peneliti menunjukkan bahwa komunitas nelayan di Kepulauan Takabonerate, telah mulai kehilangan sifat saling percaya (*distrust*), kerja sama (sifat gotongroyong) dan semakin

menurunnya sifat saling berbagi (*decrisresiprocity*). Meskipun demikian pada dimensi lain justru terjadi perluasan jaringan sosial dikalangan mereka baik intra komunitas (*bonding social capital*), antar komunitas (*bridging social capital*) maupun diluar komunitas yang lebih luas (*linking social capital*).

Dari fakta lapangan yang terjadi di Pulau barrang Lompo dapat dikatakan bahwa, pembangunan ekonomi ala partumbuhan (*growth*) yang dihantarkan melalui mekanisme pasar yang bersaing sempurna antar aktor telah “mensosialisasi” setiap warga yang tadinya terikat oleh nilai-nilai lokal kolektif, menjadi semakin individualistik dan egoistik. Sikap ini tidak hanya tampak dalam kehidupan sosial melainkan juga dalam pergaulan sosial. Dimana proses sosial dissosiatif (bukan kerja sama) semakin mewujud dalam kehidupan sehari-hari, manakala setiap individu mengejar pemuasan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif. Pada titik ini, masyarakat lokal akan mengalami proses apa yang disebut oleh Dharmawan (2002) sebagai kemiskinan kapital sosial atau “dekapitalisasi” kapital sosial. Hal ini ditandai oleh hilangnya *trust* (*distrust*) dan pecahnya ikatan-ikatan asosiasional. Jika hal ini tetap terjadi tanpa ada upaya untuk mencegahnya, lambat laun masyarakat kita akan semakin kehilangan identitas diri dan selanjutnya akan membuat masyarakat kita pada kondisi yang gampang diombang ambingkan oleh situasi, karena tidak memiliki pegangan hidup yang jelas (anomalis). Dalam kondisi tersebut akan sangat sulit membangkitkan semangat dan kerja keras masyarakat agar keluar dari kemiskinan yang membelenggunya.

Bab 2

Tinjauan Teoritis Tentang Kapital Sosial

A. Perkembangan Konsep dan Teori Kapital Sosial

Hingga saat ini penyebutan dan penulisan kapital sosial dari berbagai kalangan termasuk oleh para ahli sering berbeda. Meskipun demikian, pada umumnya mereka sepakat bahwa kapital sosial sangat berbeda dengan kapital-kapital lainnya misalnya kapital manusia (*human capital*), kapital alam (*natural capital*), kapital ekonomi (*financial capital*) dan sebagainya. Pada tulisan ini kami lebih tertarik menggunakan konsep kapital sosial dari pada menggunakan konsep padanannya dalam terjemahan bahasa Indonesia “modal sosial” dengan alasan; pertama, karena istilah “modalisme” tidak identik dengan istilah “kapitalisme”. Kedua konsep

tersebut sangat berbeda makna dan aplikasinya karenanya tidak dapat disepadankan (Lawang, 2004). Demikian pula disini tidak digunakan konsep aslinya “*capital social*” sebagaimana penerbit Al-Qalam menggunakannya dalam buku Fukuyama (meskipun tanpa alasan yang jelas). Hal itu kami lakukan karena pertimbangan konsistensi penggunaan tata bahasa dan prinsip nasionalisme yang dipegang teguh penulis.

Pada dasarnya munculnya penggunaan dan sekaligus pengkajian konsep kapital sosial merupakan bagian ikutan dan konsekwensi dari penggunaan konsep-konsep kapital yang telah dikenal sebelumnya, misalnya *natural capital*, *financial capital*, *physical capital*, *human capital* dan *human made capital*. Dimana dari keseluruhan konsep-konsep tersebut mempunyai makna dan aplikasi yang sangat berbeda namun memiliki keterkaitan satu sama lain.

Akar tertua konsep kapital sosial ditemukan tahun 1916, melalui artikel yang dibuat oleh L.F. Hanifan, seorang reformis kampus dari Virginia Barat (Woolcock, 1998). Menurutnya kapital sosial merupakan ide utama dalam pencarian sosiologi mengenai bentuk urutan sosial (Wall, et al, 1998), namun konsep itu tidak kembali muncul dalam waktu yang cukup panjang, walaupun dalam bentuk sederhana sekalipun. Sampai akhirnya, Jane Jacob memunculkan kembali terminologi tersebut ketika ia membahas tentang perencanaan perkotaan (urban planning) pada tahun 1980-an. Kemudian Pada tahun 1970-an di Amerika Utara juga ditemukan referensi singkat mengenai kapital sosial dalam tulisan Glen Loury, (ekonom) sebagai kritik terhadap teori neoklasik tentang perbedaan pendapatan kelompok rasial (Portes, 1998).

Sumber lain menyatakan bahwa asal mula kapital sosial dapat ditemukan dalam filsafat dan ekonomi pencerahan yang dibuat oleh Hume, Burke dan Adam Smith pada abad ke-18, yang tidak hanya melihat dasar kelembagaan, yaitu kontrak sosial anggota masyarakat tampak—tetapi juga melihat beberapa karakteristik jaringan resiprokal atau kewajiban timbal balik (Woolcook, 1998).

Dari pembahasan yang dikemukakan oleh filsuf inilah sebenarnya menjadi titik awal konsep modern kapital sosial kembali dibicarakan. Selanjutnya pada dekade terakhir, kemunculan konsep kapital sosial menjadi lebih populer karena konsep ini telah menyajikan dasar teori yang lebih menarik dari pengertian “masyarakat sipil (*civil society*)”. Terdapat anggapan, sebagai sebuah gagasan bahwa masyarakat sipil telah kehilangan koherensinya sebagai sebuah bangun keilmuan atau sebagai resep mujarab kebijakan (Van Rooy, Keane dan Woolcock, 1998). Pengertian masyarakat sipil dilihat sebagai sebuah istilah yang terlalu luas untuk membahas interaksi sosial yang berbentuk pemerintahan (Edwards dan Foley, 1998). Demikian pula apabila kita merunut kebelakang ternyata jauh sebelumnya, konsep kapital sosial telah diperkenalkan oleh beberapa tokoh antara lain: James Coleman (1930), yang menyatakan bahwa kapital sosial sebagai “seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi komunitas, serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang anak”. Lebih lanjut ditambahkan bahwa kapital sosial merupakan aspek dari struktur sosial yang memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial. Pandangan

yang hampir senada dikemukakan oleh Piere Bourdieu (1968), yang mendefinisikan kapital sosial sebagai sumber daya aktual serta potensial dan dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial terlembaga, berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan serta pengenalan timbal balik yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Selanjutnya Bourdieu menggambarkan perkembangan dinamis struktur nilai dan cara berpikir yang membentuk “habitus” menjadi jembatan antara agensi subyektif dengan posisi obyektif. Ketika mengembangkan konsep habitus ini, Bourdieu kemudian menegaskan bahwa sesungguhnya kelompok yang ada dalam masyarakat haruslah mampu menggunakan simbol-simbol budaya sebagai tanda pembeda, yang menandai dan membangun posisi mereka dalam struktur sosial.

Sampai pada taraf ini telah dapat disimpulkan bahwa kapital sosial merupakan bagian penting dalam rangka keberhasilan proyek pembangunan, terutama terkait pada kemampuan komunitas dalam merajut institusi atau pranata-pranata (*crafting institution*, Ostrom, 1992). Studi tentang kapital sosial juga banyak dikembangkan oleh Bank Dunia (World Bank, 1999), melalui asumsinya:

1. Kapital sosial berada dalam seluruh keterkaitan ekonomi, sosial serta politik dan meyakini bahwa hubungan sosial (*social relationship*) mempengaruhi bagaimana pasar dan negara bekerja. Sebaliknya pasar dan negara juga akan membentuk bagaimana kapital sosial di masyarakatnya.

2. Hubungan yang stabil antar aktor dapat mendorong keefektifan dan efisiensi baik perilaku kolektif maupun individual.
3. Kapital sosial dalam satu masyarakat dapat diperkuat, karenanya dibutuhkan dukungan sumber daya tertentu.
4. Agar tercipta hubungan sosial dan kelembagaan yang baik, maka anggota masyarakat mesti mendukungnya.

Bagi Putnam (2000) kapital sosial mempunyai “kekuatan dan akibat yang dapat diperhitungkan pada banyak aspek yang berbeda dalam kehidupan manusia”. Kekuatan dan akibat yang dapat diperhitungkan ini meliputi, rendahnya angka kejahatan (Halpern, 1999—Putnam, 2000), derajat kesehatan yang lebih baik (Wilkinson, 1996), peningkatan usia harapan hidup (Putnam, 2000), pencapaian prestasi bidang pendidikan (Coleman, 1998), peningkatan derajat pendapatan (Wilkinson 1996, Kawachi, et al, 1997), meningkatkan kesejahteraan anak dan menurunkan tingkat kekerasan anak (Cote dan Healy, 2001), mengurangi tingkat korupsi dan membuat pemerintahan lebih efektif (Putnam, 1995), pencapaian prestasi ekonomi melalui peningkatan kepercayaan dan penurunan biaya transaksi (Fukuyama, 1995), peningkatan potensi untuk perkembangan ekonomi (Turner, 2005) dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Grotaert, 1998).

Berbeda dengan pandangan Putnam, Alejandro Portes (1995) justru membatasi kapital sosial sebagai kemampuan individu untuk mengatur sumber-sumber langka berdasarkan keanggotaan mereka dalam jaringan atau struktur sosial yang lebih luas. Sumber-sumber langka dimaksud dapat

berupa potongan harga, utang bebas bunga dan informasi tentang kondisi bisnis. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sejauh ini studi empirik kapital sosial telah dilakukan pada berbagai tingkatan, baik pada tingkat individu dan rumah tangga, tingkat warga dan masyarakat, tingkat regional maupun tingkat nasional (negara).

Konsep kapital sosial yang mulai dikenal kembali sebagai suatu istilah dalam ilmu pengetahuan melalui Pierre Bourdieu pada tahun 1980-an, yang menggantikannya sebagai “kumpulan sumber daya yang berhubungan dengan suatu jaringan hubungan yang telah berlangsung sejak dulu” (Fortes, 1993:3). Woolcock menyatakan bahwa popularitas kapital sosial dalam lingkaran akademis sekarang ini, telah memungkinkan terjadinya dialog baru di dalam disiplin sosiologi, terutama antar berbagai disiplin ilmu sosial. Akibatnya konsep kapital sosial semakin banyak dibahas ilmu-ilmu sosial pada dekade terakhir ini, bahkan pembahasannya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah artikel yang membahas tema ini dari tahun ke tahun. Sebelum tahun 1981 sebanyak 20 artikel dan antara tahun 1991 s/d 1995 menjadi 109, antara tahun 1996 s/d Maret 1999 menjadi 1.003 (Harper, 2006) pertumbuhan ini tidak akan menunjukkan tanda-tanda penurunan. Atas perkembangan tersebut maka tidak heran jika kapital sosial menjadi suatu konsep yang populer di dalam kebijakan pembangunan saat ini. Hal ini terjadi karena kapital sosial nampak sebagai sumberdaya spesifik yang dipergunakan sebagai suatu aset produktif dan secara

strategis dapat dimobilisasi oleh individu, maupun kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan khusus.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa terdapat begitu banyak definisi kapital sosial, termasuk perbedaan konsep yang digunakan dengan mengacu pada terminologinya. Definisi kapital sosial mulai dari pengertiannya sebagai energi sosial (*social energy*), spirit komunitas (*community spirit*), keterikatan sosial (*social bonds*), kebijakan kewargaan (*civic virtue*), jaringan komunitas (*community network*), ozon sosial (*social ozone*), persahabatan yang luas (*extended friendships*), kehidupan komunitas (*community life*), sumber daya sosial (*social resources*), jaringan formal dan informal (*formal and informal*), kehidupan kebertetanggaan (*good neoghbourliness*), perekat sosial (*social glue*), sampai pada sebagai pelumas (*lubricant*) jaringan sosial. Dari keseluruhan pengertian di atas, terdapat perbedaan konseptual yang melatarinya, terutama tergantung pada latar belakang teoritiknya.

Merujuk dari beragam definisi di atas. Dapat dikatakan bahwa, istilah kapital sosial berusaha untuk memotret komunitas dan klaim sosial yang lebih luas dari individu dan rumah tangga yang dapat digambarkan dari keterlibatan kelompok sosial berdasarkan derajat dari inklusifitas di dalam komunitas secara luas. Sebagaimana didefinisikan oleh Moser (1998) bahwa, kapital sosial sebagai resiprositas dalam komunitas dan diantara rumah tangga yang didasari oleh kepercayaan berdasarkan ikatan-ikatan sosial. Ini menekankan pada melokalisir resiprositas sebagai penggambaran masa depan, sebagai contoh ide tentang moral

ekonomi petani dan asuransi sosial (Scott, 1976; Platteau, 1991). Ini selalu mengarahkan perhatian kita terhadap jaringan personal dan keluarga, yang menyediakan perbedaan dukungan potensial spasial. Berry (1989, 1993) menekankan waktu dan sumber daya yang dipersembahkan untuk memperpanjang, dan pemeliharaan jaringan. Jaringan tersebut nantinya menjadi investasi masa depan di dalam strategi nafkah rumah tangga petani perdesaan (Ellis, 2000; 36).

Swift (1998) dikutip Dharmawan (2001) menyatakan bahwa kapital sosial dibentuk dari jaringan pada pilihan-pilihan hubungan antara individu, yang mungkin saja bersifat vertikal seperti dalam hubungan otoritas atau horizontal, seperti pada organisasi sukarela. Kemudian kepercayaan dan ekspektasi kapital sosial juga harus terdiri dari klaim-klaim vertical, sebagai contoh pada patron atasan atau politisi yang diharapkan membantu di dalam menghadapi krisis/masalah. Putnam (1993) dalam Dharmawan (2001) melihat kapital sosial lebih sebagai kelompok-kelompok horisontal seperti asosiasi, klub dan agen-agen sukarela yang membawa individu secara bersama-sama untuk mengejar satu tujuan. Dalam hal mereka sama-sama memiliki kepentingan yang sama seperti kelompok tani.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa kapital sosial adalah suatu istilah yang merujuk pada sumberdaya potensial dari relasi-relasi sosial. *Premis* utama yang melatar belakangi kapital sosial adalah terhubungnya individu atau kelompok akan memberikan keleluasaan di dalam mobilisasi sumberdaya lainnya untuk mengejar hasil yang ingin dicapai. Beberapa *premis* telah digunakan untuk menjelaskan variasi

dari hasil yang dicapai termasuk prestasi di dalam dunia pendidikan (Coleman, 1988), pencapaian status (Lin, 1999; Forse, 1999; Dyk & Wilson, 1999), kesuksesan untuk generasi baru imigran (Portes & McLeod, 1999; Lauglo, 1999), mobilitas karir (Burt, 1999), pengurangan kriminalitas (Kawachi dan Kennedy, Witkinson, 1999) dan pertumbuhan ekonomi (Fedderke, et al, 1999) yang dikutip Cleaver, 2005.

Nan Lin (2004) menyatakan bahwa kapital sosial terdiri dari sumberdaya-sumberdaya yang tertambat di dalam relasi-relasi sosial dan struktur sosial yang mana dapat memobilisasi ketika seseorang berharap untuk meningkatkan kemungkinan dari keberhasilan tindakan *purposive*, seperti kapital manusia. Kapital sosial merupakan suatu investasi dari individu untuk meningkatkan kemungkinan dari keberhasilan tindakan *purposive*. Kapital sosial yang merupakan suatu investasi di dalam relasi sosial melalui sumberdaya dari individu-individu lainnya yang dapat dikapitalisasi dan dipinjam. Pendapat Nan Lin diperkuat oleh Lawang (2005) yang menyatakan bahwa kapital sosial merupakan suatu kekuatan yang tertambat (*embedded*) pada struktur sosial itu sendiri yang terbentuk dengan dua cara, yaitu *exsisting structure* dan *emergent structure*. *Existing structure* merupakan struktur yang telah ada dan diterima serta diteruskan antargenerasi melalui proses sosialisasi. *Emergent structure* muncul dari interaksi kapital sosial, baik karena makna penghargaan atau adanya kebutuhan dan permasalahan bersama yang muncul.

Menurut pandangan ilmu ekonomi, modal adalah segala sesuatu yang dapat menguntungkan atau menghasilkan.

Modal itu sendiri dapat dibedakan atas (1) modal yang berbentuk material seperti uang, gedung atau barang; (2) modal budaya dalam bentuk kualitas pendidikan dan kearifan budaya lokal; serta (3) modal sosial dalam bentuk kebersamaan, kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaring kerja, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengases informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi/berkomunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya dan memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.

Pratikno dkk (2001) membedakan kapital sosial atas tiga level yaitu; nilai, institusi dan mekanisme. Nilai terdiri dari simpati, rasa kewajiban, rasa percaya, resiprositas dan pengakuan timbal balik. Institusi meliputi keterlibatan umum sebagai warga negara (*civic engagement*), asosiasi dan jaringan. Mekanisme meliputi kerja sama dan sinergi antar kelompok. Woolcock (2001) juga membedakan tiga tipe kapital sosial, yaitu: (1) *bounding social capital*, (2) *bridging social capital*; (3) *linking social capital*.

Ketiga tipe kapital sosial dapat bekerja tergantung keadaannya. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia juga dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambat di dalam ikatan sosial sehingga tergantung bagaimana individu dan masyarakat memaknainya. *Bonding social capital* (mengikat), merupakan kapital sosial yang mengikat anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu, dapat berupa nilai, kultur, persepsi dan tradisi atau adat istiadat (*custom*). Tipe kapital sosial ini ditandai dengan karakteristik adanya ikatan sosial yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan. *Bridging social capital* (menyambung), merupakan bentuk kapital sosial yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda. Kapital sosial jenis ini bisa muncul karena adanya berbagai kelemahan sehingga memutuskan untuk membangun kekuatan dari luar dirinya. *Linking social capital* (mengait), merupakan suatu ikatan antara kelompok warga masyarakat yang lemah dan kurang berdaya, dengan kelompok warga masyarakat yang lebih berdaya (*powerful people*). Bentuknya dapat

berupa institusi maupun mekanisme (misalnya bank, polisi, pasar dan institusi lainnya atau merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai rekapitalisasi sosial atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Bisa berupa hubungan atau jaringan sosial yang dikarakteristikan karena adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada di dalam masyarakat (lawang, 2005). Jadi kapital sosial sesungguhnya dibedakan atas tiga tipe: (1) kapital sosial mengikat (*bonding social capital*); (2) kapital sosial menyambung (*bridging social capital*) dan (3) kapital sosial mengait (*linking social capital*). Kapital sosial mengikat (*bonding social capital*) dicirikan oleh kuatnya ikatan (pertalian) seperti antar anggota keluarga atau antar anggota dalam kelompok etnis tertentu. Beberapa pandangan menyamakan ikatan ini dengan (*thick trust*) yaitu kapital sosial yang terbangun akibat adanya rasa percaya antar kelompok orang yang saling mengenal. Tipe kedua, kapital sosial menyambung (*bridging social capital*), dicirikan oleh semakin banyaknya ikatan antar kelompok misalnya asosiasi bisnis, kerabat dan teman dari berbagai kelompok etnis yang berbeda. Kapital sosial tipe kedua ini terbangun dari (*thin trust*), yaitu rasa percaya terhadap sekelompok orang yang belum dikenal (Beugelsdijk dan Smulders, 2003). Empat aspek utama yang dapat membangun kapital sosial adalah (1) hubungan dari rasa percaya; (2) resiprositas dan pertukaran; (3) aturan umum, norma serta kapital sosial dan (4) koneksi, kerjasama dan kelompok (pretty dan ward, 2001).

Memperhatikan berbagai definisi yang telah diperkenalkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kapital sosial merupakan investasi sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan (partisipasi sosial, kerja sama, resiprositas dan toleransi), dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan/atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Dari rumusan ini, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa kapital sosial adalah investasi sosial dalam struktur hubungan sosial untuk meraih tujuan yang diharapkan.

Adapun yang dimaksud dengan investasi sosial adalah sumberdaya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan (partisipasi sosial, kerja sama, resiprositas dan toleransi). Aspek statis dari kapital sosial adalah sumber daya sosial, sedangkan aspek dinamisnya adalah kekuatan menggerakkan. Sumber daya sosial sebagai aspek statis dari kapital sosial dipahami dalam arti bahwa sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma merupakan kapital yang diperlukan dalam suatu struktur hubungan sosial. Investasi terjadi jika aktor memiliki sumber daya tersebut.

Jaringan, adalah hubungan antar individu dan memiliki makna subyektif yang berhubungan atau berkaitan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan. Simpul dilihat melalui aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan merupakan hubungan antar para aktor tersebut. Dalam kenyataan dimungkinkan terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Gagasan sentral kapital sosial adalah bahwa jaringan sosial

merupakan asset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik.

Jaringan dikatakan sebagai sumber daya dari kapital sosial karena dengan kepemilikan “hubungan antar individu bermakna subyektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan” maka para aktor memiliki sesuatu kapital yang mampu diinvestasikan dalam suatu struktur hubungan sosial. Sepanjang jaringan sosial itu menjadi sumber daya maka ia dipandang sebagai kapital sosial, dalam arti bahwa semakin banyak mengenal orang dan semakin banyak kesamaan cara pandang dengan orang tersebut, maka semakin kaya kapital sosial seseorang. Jika orang ingin membantu sesamanya mereka perlu merasa senang melakukannya, yang berarti bahwa mereka perlu merasa bahwa mereka memiliki kesamaan satu sama lain. Jika mereka memiliki kesamaan nilai, maka mereka lebih cenderung bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Keanggotaan dan seperangkat nilai bersama, menjadi inti dari konsep kapital sosial. Kendati jumlah, cakupan, kompleksitas dan kesementaraan menjadi ciri hubungan sosial modern. Namun Durkheim mencatat bahwa sebenarnya masyarakat itu tidak seperti (menjadi) ikatan atom yang saling berhadap-hadapan, melainkan anggotanya disatukan oleh ikatan-ikatan yang semakin melampaui momen singkat terjadinya pertukaran tersebut (Durkheim, 1933). Lebih lanjut Durkheim mengatakan bahwa ikatan-ikatan sosial

bisa didasarkan atas kesamaan kepentingan (solidaritas organik) dan bisa juga karena perbedaan kepentingan (solidaritas mekanik).

Kepercayaan merupakan keyakinan akan kredibilitas seseorang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil atau peristiwa dimana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman (*faith*), terhadap integritas atau cinta kasih orang lain atau terhadap ketepatan prinsip abstrak (pengetahuan teknis). Sedangkan nilai dipahami sebagai gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti, berharga, bernilai dan pantas atau tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai dan tidak pantas. Nilai berkaitan dengan ide yang dimiliki secara bersama tentang sesuatu yang baik atau buruk, diharapkan atau tidak diharapkan (William, 1970, dikutip Damsar, 2009). Misalnya, mendengar musik dangdut bukan menjadi persoalan benar atau salah secara moral. Namun bagi orang tertentu mendengar alunan musik dangdut merupakan pengalaman yang berharga, sedangkan bagi orang lain dapat saja menjadi sesuatu yang memuakkan dan dipandang cengeng.

Banyak nilai-nilai yang dapat menjadi sumber kapital sosial. Namun dari sekian banyak sumber kapital sosial yang relepan dengan studi sosiologi hanya beberapa yang peneliti ambil, di antaranya; kepercayaan, resiprositas dan rasa tanggungjawab. Resiprositas menunjuk pada gerakan di antara individu-individu atau antar kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan dan dapat terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antar kelompok-kelompok sering dilakukan. Hubungan simetris

terjadi jika hubungan antara berbagai pihak memiliki posisi dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran.

Norma, dipahami sebagai aturan main bersama yang menuntun perilaku seseorang. Norma memberikan kita suatu cara dimana kita mengorientasikan diri kita terhadap orang lain. Norma menuntun kita dalam melakukan defenisi situasi. Sullivan dan Thompson (1984) membagi norma atas: kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan hukum (*law*). Kebiasaan adalah cara-cara yang lazim, wajar dan berulang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sesuatu. Pandangan di atas diperkuat oleh Horton dan Hunt (1984) dengan membagi kebiasaan atas: hal-hal yang seharusnya diikuti sebagai sopan santun dan hal-hal yang harus diikuti karena yakin kebiasaan itu penting mensejahterakan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa apabila kebiasaan dikaitkan dengan gagasan tentang salah dan benar, maka ia dipandang sebagai tata kelakuan.

Dengan demikian tata kelakuan merupakan gagasan yang kuat mengenai salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Ini berarti adat/-istiadat/tata kelakuan berkaitan erat dengan moral. Berbagai tabu dan pantangan yang terdapat dalam masyarakat adalah bentuk dari tata kelakuan. Apabila tata kelakuan diformalkan dan dikodifikasikan dengan penerapan sanksi dan hukuman oleh otoritas pemerintah, maka ia dipandang sebagai hukum.

Sehubungan dengan konteks pembahasan kapital sosial pada studi ini, norma tidak bisa dilepaskan dengan jaringan, kepercayaan dan nilai. Sebab dengan menggunakan pende-

katan pertukaran, yaitu mempertimbangkan untung dan rugi baik dalam dimensi intrinsik maupun ekstrinsik. Jika suatu pertukaran mendapatkan suatu keuntungan, maka akan muncul pertukaran selanjutnya yang diharapkan mendapatkan keuntungan pula. Jika beberapa kali pertukaran yang berlangsung memperoleh keuntungan maka muncullah norma sebagai aturan main bersama yang menuntun perilaku seseorang, yaitu suatu proses pertukaran yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dimana semua pihak yang terlibat harus memiliki tanggung jawab menjaga norma. Jika ada orang yang melanggar norma dan berdampak pada berkurangnya keuntungan para pihak yang terlibat, maka ia diberi sanksi atau hukuman berat. Jika pertukaran berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama, maka akan mengkristalkan suatu jaringan hubungan sosial yang didalamnya mengandung suatu kepercayaan bahwa para pihak yang terlibat pertukaran akan memperoleh keuntungan yang merata. Hal itulah yang memunculkan norma keadilan yang jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman berat pula.

Kekuatan penggerak, sebagai aspek dinamis dari kapital sosial dipahami dalam arti bahwa kapital sosial sebagai investasi dapat membesar, mengecil, tetap atau bahkan menghilang dalam suatu struktur hubungan sosial. Segala sumberdaya sosial (jaringan, kepercayaan, nilai dan norma) yang dimiliki, mengandung kekuatan menggerakkan investasi sosial untuk menjadi lebih besar atau kecil. Kekuatan penggerak tersebut nampak pada saat kapital sosial tersebut digunakan dalam suatu struktur hubungan sosial. Penam-

pakannya terlihat dari sejauhmana investasi sosial yang telah ditanam mampu mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Semakin sering kapital sosial digunakan, maka ia akan berkembang (bertambah) dan sebaliknya jika tidak digunakan, maka ia akan berkurang atau pudar. Meskipun pada umumnya dipahami bahwa pudarnya kapital sosial disebabkan karena kehadiran negara dan pasar (Fukuyama, 2002).

Kapital sosial di dalam perkembangan ilmiahnya, juga tidak luput dari kritik terhadap teori-teori sosial yang digunakan. Kritik tersebut antara lain ditemukan oleh Krishna (2002) yang menganalisis tingkat partisipasi demokrasi komunitas perdesaan di India dan menemukan bahwa pengaruh kapital sosial lebih menonjol pada kelompok atau komunitas kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan ikatan komunitas akan meningkatkan kapital sosial. Kapital sosial menyediakan perekat dan mampu menggerakkan kapital sosial kolektif bagi demokrasi, meskipun kemampuan agen juga diperlukan. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan, apakah teori kapital sosial merupakan satu untuk semua kasus?

Kritik juga muncul dari konsep yang memfokuskan pada cara yang digunakan sebagai langkah dalam membahas isu-isu perbedaan sosial. Serupa juga dengan akumulasi dari perbedaan kekuasaan tanpa pertimbangan yang tepat dari aspek negatif kehidupan sosial, atau kendala-kendala terhadap memberdayakan masyarakat miskin. “Sisi gelap” dari kapital sosial, kemungkinan dari pengelompokan individu yang mengarah pada eksklusifitas dari individu-

individu dengan identitas sosial tertentu (Fukuyama, 2002). Sebagai ringkasan dari perkembangan konsep dan teori kapital sosial, lihat matriks di bawah ini:

Tabel 2.1.
Matriks Kapital Sosial
Perkembangan Konsep dan Definisi Kapital Sosial

Tokoh (Tahun)	Kapital Sosial Tertambat pada	Variabel Independent (Tidak Bebas)	Variabel Dependen (Bebas)
Coleman, 1930	Struktur dan hubungan sosial, serta institusi sosial	Fungsi kewajiban, harapan, layak dipercaya, saluran, norma, Kapital Sosial, dan jaringan organisasi.	Tindakan aktor atau aktor dalam ranah hukum.
Bourdieu, 1986	Struktur sosial dan struktur nilai (habitus).	Jaringan sosial, Kelembagaan, dukungan kolektif.	Tindakan aktor.
Putnam, 2000	Institusi sosial.	Jaringan, norma, kepercayaan.	Keberhasilan ekonomi, demokrasi.
Fukuyama, 1995, 2003	Agama, filsafat, budaya.	Kepercayaan, nilai	Kerjasama untuk mencapai kemajuan
Woolcock, 1983	Struktur sosial, mikro, meso dan makro.	Ikatan intrasosial (<i>bonding</i>), jaringan antar komunitas (<i>bridging</i>), jaringan (<i>linking</i>).	Pengembangan komunitas.
Bank Dunia, 1999	Institusi sosial.	Institusi, norma dan hubungan sosial.	Tindakan sosial.
Turner, 2005	Hubungan sosial.	Kekuatan	Perkembangan ekonomi.
Swift, 1998	Hubungan sosial.	Jaringan, kepercayaan dan ekspektasi.	Masalah atau krisis sosial
Lawang, 2004	Struktur sosial, mikro, meso dan makro.	Kekuatan sosial komunitas bersama kapital-kapital lainnya.	Efisiensi dan efektifitas dalam mengatasi masalah.

Nan Lin, 2001	Relasi-relasi sosial dan struktur sosial.	Tindakan-tindakan yang ekspresif atau instrumental.	Sumber-sumber terlekat (<i>embedded resources</i>).
Pratikno dkk, 2001	Institusi atau kelembagaan	Nilai, institusi dan mekanisme	Tindakan sosial
Rangkuman Peneliti, 2011	Struktur sosial, struktur nilai, hubungan/relasi sosial, dan institusi.	Jaringan sosial (<i>bonding, bridging, dan linking</i>), kepercayaan, nilai/norma dan dukungan kolektif (resiprositas).	Tindakan sosial, Perkembangan ekonomi dan efektifitas/efisiensi dalam mengatasi krisis.

B. Sumber dan Dimensi Kapital Sosial

Pengelompokan sumber dan dimensi kapital sosial disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam pengukuran kapital sosial tersebut. Pantoja (1999) mengelompokkan kapital sosial menjadi enam berdasarkan sumber terbentuknya, yaitu: (1) hubungan kekeluargaan yang terjadi karena kelahiran; (2) kehidupan berorganisasi yang meliputi semua organisasi horisontal dan vertikal; (3) jaringan kerja; (4) masyarakat politik; (5) aturan formal dan norma yang mengatur kehidupan publik serta (6) nilai-nilai. Dimensi kapital sosial yang terbangun dari berbagai sumber kapital sosial tersebut adalah: (1) rasa percaya, (2) norma dan (3) jaringan kerja.

Menurut Grootaert (1999), kapital sosial mempunyai enam dimensi yaitu: (1) jumlah keanggotaan, (2) tingkat keberagaman anggota kelompok/organisasi, (3) intensitas pertemuan, (4) tingkat pengambilan keputusan, (5) besarnya tingkat kontribusi (uang serta tenaga) dan (6) orientasi masyarakat. Bank Dunia (Grootaert, 2004) juga membagi kapital sosial atas enam dimensi yaitu: (1) jaringan/ikatan

hubungan dan kelompok/organisasi, (2) solidaritas dan kepercayaan, (3) kegotongroyongan (*collective action and cooperations*), (4) komunikasi dan informasi, (5) inklusi dan kohesi sosial dalam masyarakat serta (6) kebijakan dan pemberdayaan.

Putnam (Winter, 2000) mengidentifikasi kapital sosial atas enam dimensi yaitu; (1) kebiasaan (tipe perjanjian; formal dan informal), (2) tujuan bersama (antar institusi saling hormat menghormati), (3) hubungan dalam pergaulan “*bridging*” (*trust* dan *reciprocity*) saling membangun secara bersama-sama, (4) kapital sosial sebagai perantara (kepercayaan dapat membangun sistem kedekatan antar individu), (5) intensitas hubungan (intensitas hubungan antar individu merupakan kekayaan dan keuntungan ganda dalam masyarakat) dan (6) lokasi sosial (menjalin hubungan kekerabatan dengan baik dapat membangun sumber daya sosial). Haddad (2000) membagi kapital sosial atas tiga dimensi yaitu; (1) tingkat partisipasi rumah tangga, (2) fungsi kelompok bagi rumah tangga dan (3) tingkat kepercayaan rumah tangga dalam kelompok.

Kelima tokoh yang telah disebutkan pada umumnya sepakat bahwa dimensi kapital sosial meliputi jaringan (*network*) dan kepercayaan (*trust*). Namun hanya Pantoja yang memasukkan norma sebagai dimensi kapital sosial. Padahal dari berbagai definisi tentang kapital sosial sebagaimana dikemukakan oleh beberapa tokoh pada pembahasan sebelumnya selalu menyebutkan ketiga unsur tersebut (kepercayaan, norma dan jaringan). Dalam mendefinisikan kapital sosial sebagai pedoman dalam penelitian, dapat

dirumuskan dimensi kapital sosial sebagai berikut: (1) kepercayaan (*trust*), (2) norma (kebiasaan), (3) jaringan (*network*), (4) jumlah keanggotaan, (5) tingkat keberagaman anggota, (6) intensitas pertemuan, (7) tingkat pengambilan keputusan, (8) tingkat kontribusi/partisipasi, (9) solidaritas, (10) kegotongroyongan, (11) kebijakan dan pemberdayaan serta (12) tujuan bersama. Untuk lebih sederhananya dapat dilihat pada matriks kapital sosial berikut:

Tabel 2.2.
Matriks Kapital Sosial
Sumber dan Dimensi Kapital Sosial

Tokoh, Tahun	Sumber dan Dimensi Kapital Sosial
Pantoja, 1999	Sumber kapital sosial yaitu: hubungan kekeluargaan, kehidupan berorganisasi, jaringan kerja, masyarakat politik, aturan formal dan norma serta nilai-nilai. Selanjutnya Pantoja mengemukakan secara tersendiri dimensi kapital sosial yaitu; rasa percaya, norma dan jaringan.
Grootaert, 1999	Jumlah keanggotaan, tingkat keberagaman anggota, intensitas pertemuan, tingkat pengambilan keputusan, besarnya tingkat kontribusi, orientasi masyarakat.
Bank Dunia, 2004	Jaringan/ikatan hubungan, solidaritas dan kepercayaan, kegotongroyongan, komunikasi dan informasi, inklusi dan kohesi sosial dalam masyarakat, kebijakan dan pemberdayaan.
Putnam, 2000	Kebiasaan, tujuan bersama, hubungan dalam pergaulan, sebagai pranata, intensitas hubungan, lokasi hubungan.
Haddad, 2000	Tingkat partisipasi rumah tangga, fungsi kelompok bagi rumah tangga, tingkat kepercayaan rumah tangga dalam kelompok.
Rangkuman Peneliti, 2011	Kepercayaan, norma, jaringan, nilai, resiprositas, jumlah keanggotaan dan tingkat keberagaman anggota, intensitas pertemuan, pengambilan keputusan, kontribusi, solidaritas, kegotongroyongan, kebijakan dan pemberdayaan serta tujuan bersama.

C. Studi-Studi Kapital Sosial Terdahulu

Sejauh ini studi kapital sosial yang telah ada, umumnya dilakukan pada tingkatan analisis yang berbeda. Ada yang pada tingkatan individu (rumah tangga), ada pula pada tingkatan masyarakat (komunitas). Pada tingkatan individu (rumah tangga) antara lain penelitian yang dilakukan oleh Brehm dan Rahn (1997) di Amerika Serikat, yang meneliti jaringan hubungan kerja sama antara penduduk yang memfasilitasi resolusi masalah aksi kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan interpersonal yang lebih tinggi mengarah kepada keterikatan fisik yang lebih dan institusi politik yang lebih mantap. Implikasinya adalah; (a) kepercayaan lebih mengarah pada keterikatan fisik yang lebih tinggi, (b) norma-norma mempengaruhi jaringan kerja.

Narayan dan Pritchett (1999), melakukan penelitian tentang kuantitas dan kualitas kehidupan yang berhubungan dengan norma sosial di Tanzania. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kapital sosial dan pendapatan keluarga. Implikasi dari penelitian ini bahwa kelompok yang lebih heterogen berhubungan erat dengan kapital sosial yang lebih tinggi. Penelitian yang sama dilakukan oleh Grootaert (1998) di Indonesia, menyimpulkan bahwa kapital sosial keluarga mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Implikasinya adalah bahwa kelompok yang lebih heterogen berinteraksi dengan kelompok yang memiliki kapital sosial yang lebih tinggi. Dalam arti bahwa kapital sosial mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Selanjutnya penelitian Tetiani (2005) mengungkapkan bahwa kapital sosial mekanisme, erat kaitannya dengan mobilitas sosial

buruh perkebunan teh di dalam pasar tenaga kerja, sebagai kritisasi teori dualisme Boeke.

Pada tingkatan masyarakat (komunitas) dapat dikemukakan beberapa penelitian, antara lain dikemukakan oleh Sampson (1977) di Amerika Serikat, yang meneliti tentang keterhubungan kolektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterikatan kolektif tidak berhubungan dengan kejahatan. Implikasinya adalah bahwa lingkungan masyarakat yang homogen memiliki tingkat keterikatan kolektif yang tinggi. Dengan kata lain bahwa kapital sosial berhubungan negative dengan keragaman penduduk. Putnam, Leonard dan Naneti (Hobbs, 2000) menemukan bahwa pada masyarakat modern italia, kapital sosial yang meliputi; corak organisasi sosial, kepercayaan, norma dan jaringan sosial dapat meningkatkan efisiensi serta kemudahan berbagai kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas bersama. Sejalan dengan itu Bank Dunia (2000) juga menemukan bahwa, institusi hubungan kemasyarakatan dan norma dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas interaksi sosial masyarakat sehingga pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam keperluan individu maupun kepentingan bersama.

Ostrom dan Lam (1996), menemukan bahwa jaringan sosial dapat membantu dalam berbagai bentuk proyek masyarakat, seperti proyek irigasi. Temuan ini diperkuat oleh Falk dan Kilpatrick (1999) bahwa jaringan sosial di masyarakat dapat melakukan berbagai bentuk akumulasi kapital (ekonomi dan sosial). Winter (2000) menemukan bahwa kapital sosial dapat mempengaruhi kestabilan kehidupan keluarga dan kemandirian masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh

Cleaver (2004) melalui studi etnografi yang dilakukannya mengenai ketidak samaan kapital sosial dan reproduksi kemiskinan kronis di Tanzania, menjawab pertanyaan bahwa kebijakan pembangunan yang membangun kapital sosial dapat siap dibentuk, digunakan, atau diganti untuk aset-aset yang hilang dan tentunya menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jaringan sosial, tindakan kolektif dan kelembagaan secara struktural mereproduksi kapital sosial eksklusifitas dari masyarakat miskin. Bahkan Tau (2003) menemukan bahwa kapital sosial mampu mempengaruhi perekonomian di beberapa Negara Afrika.

Linda Ibrahim (2002) meneliti kehidupan berorganisasi sebagai kapital sosial pada komunitas Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan berorganisasi di tingkat komunitas ketetanggaa (*neighborship community*), meskipun rendah namun masih dapat dikembangkan dengan keberadaan aktor individual sosial, agar rumah tangga komunitas mampu mengakses sumber daya lokal. Fernando (2003), menemukan bahwa kapital sosial merupakan modal alamiah, hubungan solidaritas dan asosiasi produktif. Demikian juga dengan studi Krishna (2002) yang menganalisis tingkat partisipasi demokrasi komunitas perdesaan di India yang menemukan bahwa pengaruh kapital sosial lebih menonjol pada kelompok/komunitas kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan ikatan komunitas akan meningkatkan kapital sosial. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kapital sosial menyediakan perekat dan mampu menggerakkan aksi kolektif bagi demokrasi, meskipun kemampuan agen juga diperlukan.

Ujiyanto singgih Prayitno (2004), dalam studinya mengenai kapital sosial dan ketahanan ekonomi keluarga miskin pada komunitas bantaran Sungai Ciliwung Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi keluarga tidak hanya karena dipengaruhi oleh kapital sosial (kentalnya kekerabatan) komunitas. Akan tetapi faktor yang paling menentukan adalah pilihan ekonomi subsistensi yang mereka pertahankan. Implikasinya adalah bahwa strategi adaptasi hidup merupakan faktor yang sangat menentukan bagi suatu komunitas untuk bertahan hidup, meskipun kapital sosialnya lemah. Tri Pranadji (2006), studi tentang penguatan kapital sosial dalam pengelolaan argoekosistem lahan kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara kuatnya kapital sosial dengan tingginya kemampuan masyarakat dalam mengelolah argoekosistem lahan kering.

Penelitian Ade Rusli (2003), tentang potensi dalam pemberdayaan nelayan dan modal sosial komunitas nelayan di Banten, menemukan bahwa profil kapital sosial komunitas nelayan berpengaruh terhadap keberhasilan proyek pemberdayaan. Rendahnya tingkat kapital sosial pada hubungan antar warga menyebabkan kurang optimalnya hasil program pemberdayaan tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan kekecewaan warga komunitas yang selanjutnya rawan akan terjadinya konflik sosial pada komunitas nelayan, dimana situasi tersebut justru semakin menambah penderitaan mereka. Astriana Baiti Sinaga (2007), tentang pemberdayaan keluarga di perkotaan dan perdesaan mengemukakan bahwa, pemberdayaan yang selama ini berjalan belum mampu

meningkatkan keberdayaan keluarga, karena program yang dicanangkan hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan (*charity*) saja, bukan pada perubahan perilaku anggota keluarga. Suandi (2007), tentang kapital sosial dan kesejahteraan ekonomi keluarga, mengemukakan bahwa kapital sosial keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga, terutama di wilayah pegunungan. Kontribusi kapital sosial terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga terutama melalui aspek: (1). Dimensi asosiasi sosial misalnya; jumlah asosiasi, tingkat partisipasi, manfaat sosial, kepercayaan, solidaritas dan semangat kerja, (2). Mekanisme dan (3). Tipe jaringan.

Tabel 2.3.
Matriks Kapital Sosial
Studi-Studi Kapital Sosial Sebelumnya

Tokoh (Tahun)	Tingkatan (Aras) Kajian	Temuan dan Implikasinya
Brehm dan Rahn, 1997	Rumah tangga (individu)	Kepercayaan interpersonal yang lebih tinggi menyebabkan keterikatan fisik yang tinggi dan institusi politik yang lebih mantap. Implikasinya: kepercayaan lebih mengarah pada keterikatan dan norma-norma mempengaruhi jaringan kerja.
Narayan dan Pritchett, 1999	Rumah tangga (individu)	Terdapat hubungan yang kuat antara kapital sosial dan pendapatan keluarga. Implikasinya, yaitu; kelompok yang lebih heterogen berhubungan dengan kapital sosial yang lebih tinggi.
Grotaert, 1998	Rumah tangga (individu)	Kapital sosial keluarga mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Implikasinya; kelompok yang lebih heterogen berinteraksi dengan kelompok yang memiliki kapital sosial yang lebih tinggi.

Tetiani, 2005	Rumah tangga (individu)	Kapital sosial berkaitan erat dengan mobilitas sosial buruh dalam pasar tenaga kerja.
Sampson, 1977	Masyarakat (kelembagaan)	Keterikatan kolektif tidak berhubungan dengan kejahatan. Implikasinya, lingkungan masyarakat yang homogen memiliki tingkat keterikatan kolektif yang tinggi.
Putnam, Leonardi dan Naneti, 2000	Masyarakat (kelembagaan)	Pada masyarakat modern Italia, kapital sosial berupa corak organisasi sosial, kepercayaan, norma dan jaringan sosial dapat meningkatkan efisiensi serta kemudahan bagi kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan fasilitas bersama.
Bank Dunia, 2000	Masyarakat (kelembagaan)	Institusi, hubungan masyarakat dan norma dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas interaksi sosial masyarakat sehingga pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun bersama.
Ostrom dan Lam, 1996	Masyarakat (kelembagaan)	Jaringan sosial dapat membantu dalam berbagai bentuk proyek masyarakat misalnya irigasi.
Kilpatrick dan Falk, 1999	Masyarakat (kelembagaan)	Akumulasi kapital sosial dapat terbentuk melalui jaringan sosial dalam masyarakat.
Krishna, 2002	Masyarakat (kelembagaan)	Pengaruh kapital sosial lebih menonjol pada kelompok/komunitas kecil dari pada kelompok yang lebih luas.
Winter, 2000	Masyarakat (kelembagaan)	Kapital sosial dapat mempengaruhi kestabilan Kehidupan keluarga dan kemandirian masyarakat.
Tau, 2003	Masyarakat (kelembagaan)	Kapital sosial mampu mempengaruhi perekonomian di beberapa negara Afrika.
Linda Ibrahim, 2002	Masyarakat (kelembagaan)	Kehidupan berorganisasi pada tingkat komunitas ketetangaan, meskipun rendah tapi masih dapat dikembangkan melalui aktor, agar rumah tangga komunitas mampu mengakses sumber daya sosial.

Fernando, 2003	Masyarakat (kelembagaan)	Kapital sosial merupakan kapital alamiah, hubungan sosial dan produktif.
Cleaver, 2004	Masyarakat (kelembagaan)	Jaringan sosial, tindakan kolektif dan kelembagaan secara struktural mereproduksi kapital sosial eksklusifitas dari masyarakat miskin.
Ujianto Singgih Prayitno, 2004	Masyarakat (kelembagaan)	Daya tahan ekonomi keluarga selain dipengaruhi kapital sosial dan yang paling menentukan adalah bertahannya ekonomi subsisten bagi mereka. Implikasinya; strategi adaptasi hidup merupakan faktor yang sangat menentukan bagi komunitas untuk bertahan hidup.
Tri Pranadji, 2006	Masyarakat (kelembagaan)	Terdapat kaitan yang kuat antara kuatnya kapital sosial dengan tingginya kemampuan masyarakat dalam mengelolah agro-ekosistem lahan kering.
Ade Rusli, 2003	Masyarakat (kelembagaan)	Profil kapital sosial komunitas nelayan berpengaruh terhadap keberhasilan proyek pemberdayaan masyarakat.
Suandi, 2007	Masyarakat (kelembagaan)	Kapital sosial keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga terutama di wilayah pegunungan.

Menyimak temuan dari studi-studi di atas, disimpulkan bahwa hingga saat ini penelitian tentang kapital sosial telah mengkaji permasalahan pada aras individu dan aras masyarakat (komunitas). Fokus kajian dan temuannya meliputi fungsi/kontribusi dan pengaruh kapital sosial dalam pembangunan baik di perdesaan maupun di perkotaan. Studi tentang kapital sosial memang telah banyak, namun kajiannya masih terbatas pada dimensi-dimensi tertentu dari kapital sosial. Berdasarkan penelusuran literatur sebagaimana telah dipaparkan di atas, peneliti mencoba membuat dua rumusan sebagai *novelty* (kebaruan) dari studi ini, yaitu; 1). Belum ada studi yang mengkaji bagaimana

kapital sosial pada komunitas nelayan pulau-pulau kecil, sebagai *novelty* pertama dari studi ini. 2). Selama ini belum ada studi yang mengkaji kapital sosial secara komprehensif yakni mengkaji keseluruhan dimensi (jaringan, kepercayaan, kerjasama, nilai dan norma), karena itu studi ini akan mengkaji kapital sosial secara komprehensif sebagai *novelty* kedua dari studi ini. Disamping itu akan dianalisis pada dimensi mana kapital sosial menyusut, bertahan atau mungkin bertambah karena adanya intervensi negara dan penetrasi pasar.

D. Konsep Komunitas dan Pulau-pulau Kecil

Pembahasan poin ini kami dahului dengan terlebih dulu membahas mengenai konsep *community*. *Community* kemudian diterjemahkan menjadi komunitas oleh Koentjaraningrat (1990) dan memiliki pengertian sebagai “suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat serta oleh suatu rasa identitas komunitas yang memiliki ciri-ciri yaitu; adanya kesatuan wilayah, kesatuan adat-istiadat, rasa identitas sebagai suatu komunitas dan rasa loyalitas terhadap komunitas itu sendiri”.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Soekanto (2002) yang mengartikan *community* sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa yang mana para anggotanya hidup bersama sehingga merasakan bahwa kelompoknya dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. Keterikatan secara geografis merupakan suatu ciri dasar

yang sifatnya pokok sebagai suatu komunitas. Tetapi hal ini tidaklah cukup, karena suatu komunitas harus memiliki apa yang dinamakan dengan *community sentiment* atau perasaan komunitas. Perasaan sebagai suatu komunitas memiliki beberapa unsur, yaitu seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. Dari dua pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa komunitas itu memiliki berbagai kesamaan dan ikatan yang menyatukan mereka; antara lain ikatan geografis, perasaan/sikap dan ikatan norma sosial (adat istiadat) serta memiliki ciri ekologis yang spesifik (khas).

Setelah mengerti apa yang dimaksud dengan komunitas, selanjutnya kami akan kemukakan pengertian pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km² dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (*mainland island*). Memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi, tidak mampu mempengaruhi hidroklimat, memiliki daerah tangkapan air (*catchment area*) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut. Serta dari segi sosial, ekonomi

dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Berdasarkan tipenya, pulau-pulau kecil dibedakan menjadi pulau benua, pulau vulkanik dan pulau karang. Masing-masing tipe pulau tersebut memiliki kondisi lingkungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan penentuan pengelolaannya, agar berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap pola permukiman yang berkembang di pulau-pulau kecil berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan kondisi lingkungan biofisik tersebut. Misalnya tipologi pulau kecil lebih dominan ke arah pengembangan budidaya perikanan, maka kemungkinan besar pola permukiman yang berkembang adalah masyarakat nelayan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa komunitas pulau-pulau kecil adalah masyarakat yang jumlahnya maksimal 200.000 jiwa, hidup pada pulau yang secara geografis terpisah dengan pulau induknya dengan luas maksimal 10.000 Km. Dan secara spesifik memiliki kesamaan serta ikatan yang menyatukan mereka antara lain ikatan geografis, perasaan/sikap, dan ikatan norma sosial (adat istiadat).

Komunitas pulau-pulau kecil didalamnya juga terdapat beragam sub komunitas, namun sub komunitas yang paling umum (dominan) ditemukan adalah komunitas pesisir. Pada komunitas pesisir umumnya dihuni komunitas nelayan yang memang identik dengan karakteristik ekologisnya. Komunitas pesisir merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang menempati wilayah pesisir. Dahuri dan Nugroho (2005), menulis bahwa batas wilayah pesisir tidak luput dari tujuan

penggunaan dan pengelolaannya. Penetapan batas wilayah pesisir pada umumnya didasarkan pada tiga kriteria, yaitu; garis linier secara arbiter tegak lurus terhadap garis pantai. Berdasarkan pada batas administrasi dan hukum serta karakteristik dan dinamika ekologis, yakni atas dasar sebaran spasial dari karakteristik alamiah atau kesatuan proses-proses ekologis, seperti daerah aliran air sungai dan area pasang surut.

Komunitas nelayan adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, yang umumnya bekerja mencari ikan atau organisme laut lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai komunitas, ciri-ciri spesifik masyarakat nelayan dapat dibedakan dengan komunitas lainnya yaitu, segala aktifitasnya senantiasa bersentuhan dengan lingkungan laut dan pesisir. Mubyarto, dkk (1984) menyatakan bahwa komunitas nelayan adalah masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sendiri dan bertempat tinggal di tepi pantai, sehingga dapat juga disebut sebagai masyarakat yang berdiam di “desa pantai perkampungan nelayan” yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama (Sastrawidjaya, 2000).

Dahuri dan Nugroho (2005) mengungkapkan sifat dan karakteristik komunitas pesisir, khususnya komunitas nelayan. Sifat dan karakteristik komunitas nelayan ditentukan oleh intra kapital sosial antara faktor-faktor sosial, ekonomi, lingkungan serta faktor ketidakpastian memperoleh penghasilan; karena ketergantungan pada musim atau terjadinya kerusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh polusi atau penangkapan ikan secara berlebihan, yang pada akhirnya

semakin memperburuk hasil tangkapan ikan mereka. Kondisi kehidupan sosial ekonomi para nelayan semakin sulit dengan terjadinya krisis ekonomi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Biaya operasional untuk melaut meningkat menjadi tiga sampai dengan empat kali lipat dari biasanya.

Nelayan akan melaut pada saat laut mengalami ombak kecil, yaitu pada bulan November sampai dengan Mei. Para nelayan akan menganggur serta tinggal di rumah pada saat laut mengalami ombak besar, yaitu pada bulan Juni sampai dengan Oktober. Pada musim ini, penghasilan nelayan menurun drastis, nelayan hanya mencuri waktu disela-sela perubahan angin yang relatif singkat untuk menangkap ikan. Ketergantungan pada musim ini semakin tinggi bagi para nelayan kecil dan *pandhiega* yang tidak mampu mengakses teknologi penangkapan moderen (90% nelayan di Indonesia menguasai teknologi penangkapan tradisional). Kondisi ini memiliki implikasi terhadap perilaku konsumsi. Pada musim penangkapan, nelayan cenderung konsumtif dan relatif kekurangan pada musim paceklik.

Agar para nelayan dapat mempertahankan kelangsungan hidup pada musim paceklik, mereka mengembangkan strategi adaptasi tertentu. Strategi adaptasi menurut Bartlett dalam Kusnadi (2000) merupakan pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks kapital sosial; lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi dimana penduduk tersebut hidup atau bertempat tinggal. Pemilihan tindakan ini dimaksudkan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia di lingkungan guna mengatasi tekanan-tekanan sosial ekonomi.

E. Intervensi Negara dan Penetrasi Pasar terhadap Komunitas Lokal

Intervensi negara melalui program pembangunan, termasuk didalamnya birokrasi dan administrasi. Begitu pula penetrasi pasar melalui proses kapitalisasi dan monetisasi secara nyata, menjadikan komunitas lokal tersubordinasi dimana negara sebagai suprastruktur, sementara komunitas lokal sebagai substruktur. Dalam hal ini telah terjadi interaksi yang tidak seimbang antara negara dan pasar, sebagai suprastruktur menghegemoni komunitas lokal (nelayan) sebagai substruktur (Gramsci, 1971). Melalui proses interaksi tersebut, kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Kelas dominan merekayasa kesadaran kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hegeishtai* yang berarti memimpin, kepemimpinan atau kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Konsep hegemoni menjadi populer setelah digunakan sebagai penyebutan atas pemikiran Gramsci yang dipahami sebagai ide yang mendukung kekuasaan kelompok sosial tertentu. Teori hegemoni yang dicetuskan Gramsci adalah: “Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya tertanam sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik serta seluruh hubungan-hubungan sosial. Khususnya dalam makna intelektual dan moral”.

Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni, sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono, 1999).

Berdasar konsep hegemoni, Gramsci berpendapat bahwa agar kekuasaan dapat abadi (*langgeng*) membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcement*. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (*state*) melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. *Kedua*, perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata lain untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan juga keluarga (Heryanto, 1996). Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (*civil society*) melalui lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial keagamaan, paguyuban dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya (*interest groups*). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi

hegemoni, dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat lokal. Disisi lain berkaitan dengan dominasi langsung atau perintah yang disosialisasikan di seluruh negara dan pemerintahan yuridis (Gramsci, 1971).

Gramsci membuat perbedaan antara “masyarakat sipil” dan “masyarakat politik” yang sesungguhnya tidak jelas terlihat. Perbedaan itu dibuat hanya untuk kepentingan analisis semata. Kedua suprastruktur itu, pada kenyataannya sangat diperlukan satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan. Kedua level itu sangat diperlukan, dapat dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia mengatakan “negara integral” tidak hanya meliputi masyarakat sipil tetapi juga masyarakat politik yang didefinisikan; negara = masyarakat politik + masyarakat sipil. Dengan kata lain hegemoni dilindungi oleh baju besi koersif (Gramsci, 1971). Dia juga mengkarakterisasikan apa yang di maksud dengan negara integral sebagai sebuah kombinasi kompleks antara “kediktatoran dan hegemoni” atau seluruh kompleks aktivitas praktis dan teoritis, dimana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominasinya, tetapi juga berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai. Jadi negara adalah aparatus koersif pemerintah sekaligus aparatus hegemonik institusi swasta.

Lebih jauh dikatakan Gramsci bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasilnya dinamakan “dominasi”. Stabilitas dan keamanan memang tercapai. Sementara gejolak perlawanan tidak terlihat, karena rakyat memang tidak berdaya. Namun hal

ini tidak dapat berlangsung terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapi dominasi dengan perangkat kerja yang hasil akhirnya lebih dikenal dengan sebutan “*hegemoni*”. Dengan demikian supremasi kelompok (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan serta kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni (Hendarto, 1993: 74). Ini berarti bahwa kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui “persetujuan” yang mencakup beragam jenis penerimaan intelektual atas tatanan sosial politik yang ada.

Mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut: Kelas dominan melakukan penguasaan kepada kelas bawah menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan merekrut kesadaran masyarakat kelas bawah sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan. Sebagai contoh dalam situasi kenegaraan, upaya kelas dominan (pemerintah) untuk merekrut kesadaran kelas bawah (masyarakat) adalah dengan melibatkan para intelektual dalam birokrasi pemerintah serta intervensi melalui lembaga pendidikan dan seni. John Storey menjelaskan konsep hegemoni untuk mengacu kepada proses sebagai berikut:

“...sebuah kondisi di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksimalan “kepemimpinan” moral dan intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat dimana terdapat

tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar. Dimana kelas bawah aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat serta menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada.”

Pendek kata, hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramsci bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual. Teori politik Gramsci menjelaskan bagaimana ide-ide atau ideologi menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa.

*“Negara integral” tidak
hanya meliputi masyarakat
sipil tetapi juga masyarakat
politik, yang didefinisikan:
negara = masyarakat
politik + masyarakat sipil.
(Gramsci)*

Bab 3

Dampak Intervensi Negara terhadap Perubahan Kapital Sosial pada Komunitas Nelayan Pulau-Pulau Kecil

A. Tergerusnya Kepercayaan (*Trust*) pada Komunitas Nelayan

Secara umum diketahui bahwa proses pembangunan yang berlangsung pada suatu wilayah atau komunitas akan berdampak pada perubahan aspek fisik dan sosial. Salah satu aspek yang berkenaan dengan perubahan sosial sebagai dampak dari adanya intervensi negara yaitu perubahan kapital sosial. Secara teori, kapital sosial dapat mengalami perubahan dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain,

misalnya berubah menjadi berkurang atau tergerus (*dekapitalisasi*) dan berubah menjadi bertambah (*rekapitalisasi*) atau justru tidak mengalami perubahan (tetap). Pada pembahasan ini, diuraikan bagaimana kapital sosial pada komunitas nelayan pulau-pulau kecil mengalami perubahan menjadi tergerus (*dekapitalisasi*)/bertambah (*rekapitalisasi*).

Kepercayaan (*trust*) diartikan sebagai keyakinan akan kredibilitas seseorang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil atau peristiwa yang mengekspresikan suatu iman (*faith*) terhadap integritas serta cinta kasih orang lain, atau terhadap ketepatan prinsip abstrak (*pengetahuan teknis*) (Giddens, 2005). Kepercayaan (*trust*) warga pada suatu komunitas dapat terbentuk melalui proses hubungan sosial yang intens dan saling menguntungkan satu sama lain. Semakin hubungan-hubungan sosial itu dilakukan atas dasar saling menguntungkan dan secara intens terjadi, maka semakin meningkatkan kepercayaan (*trust*) diantara mereka. Sebaliknya jika hubungan sosial yang terbangun tidak didasari semangat saling menguntungkan, maka semakin melemahkan kepercayaan (*trust*) tersebut.

Hubungan sosial yang terbangun dan diperkuat oleh hadirnya kepercayaan (*trust*) dalam suatu komunitas selanjutnya akan membentuk solidaritas sosial (Durkheim, 1986). Pada masyarakat dengan tipologi perdesaan pada umumnya terbangun solidaritas yang bersifat mekanistik dan sebaliknya pada masyarakat yang bertipologi perkotaan pada umumnya terbangun solidaritas sosial organistik. Pada sub bahasan ini berturut-turut akan dibahas: kepercayaan antar warga (antarpersonal), kepercayaan pada keamanan pulau, kepada

pemerintah dan tokoh masyarakat serta kepercayaan kepada lembaga bentukan masyarakat (LSM).

1. Kepercayaan (*Trust*) Antar Warga

Kepercayaan (*trust*) antar warga merupakan salah satu bagian penting yang menentukan keharmonisan hubungan sosial antar warga dan sekaligus dapat menjadi salah satu modal bagi kemajuan masyarakat atau suatu komunitas. Seperti dikemukakan Fukuyama, bahwa dalam masyarakat yang tingkat kepercayaan (*trust*) antar warganya sangat tinggi (*high trust*) umumnya lebih cepat maju dibanding masyarakat yang tingkat kepercayaan (*trust*) antar warganya rendah (*low trust*). Karena terbentuknya kepercayaan (*trust*) antar warga dalam suatu komunitas akan memudahkan terjadinya kerja sama yang kemudian membentuk jaringan di dalam (intra) maupun di luar (extra) komunitasnya. Untuk mengetahui bagaimana dampak intervensi negara terhadap kepercayaan (*trust*) antar warga dalam komunitas Pulau Barrang Lompo (PBL). Peneliti menganalisis data antara lain persepsi warga mengenai; keyakinan warga akan keamanan rumahnya jika ditinggal pergi beberapa hari. Keyakinan warga bahwa tetangganya adalah orang yang baik, karena pada umumnya warga Pulau Barrang Lompo adalah orang yang jujur dan taat beribadah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebelumnya (sepuluh tahun lalu) warga di PBL sangat yakin bahwa rumahnya akan aman dan diawasi tetangga jika ditinggalkan pergi untuk beberapa hari, namun keyakinan tersebut telah mengalami penurunan (tergerus) pasca

intervensi negara melalui program pembangunan. Dari data tersebut dapat pula dijelaskan bahwa pada sepuluh Tahun lalu (sebelum intervensi negara), jika warga hendak bepergian mereka tidak perlu cemas karena tetangga akan membantu mengawasi rumah yang ditinggalkan penghuninya, namun saat ini keyakinan tersebut juga telah menurun (tergerus). Jadi dalam hal ini, ada kaitan antara keamanan rumah warga dengan keterlibatan tetangga dalam pengawasan. Pengawasan tetangga terhadap rumah yang ditinggalkan pergi pemiliknya untuk beberapa hari, biasanya dilakukan dengan cara salah satu anggota rumah tangga warga menginap di rumah tersebut pada malam hari. Sementara pada siang harinya cukup memantau saja dari rumahnya, karena memang suasana pulau masih sangat aman dari hal-hal yang berbau tindakan kejahatan seperti pencurian. Hal ini semuanya dilakukan oleh tetangga sebagai bukti tanggung jawabnya bagi keamanan rumah dan harta tetangganya yang sementara berjuang mencari nafkah hidupnya di lautan.

Menurunnya keyakinan warga terhadap keamanan dan pengawasan rumah mereka dari tetangga jika ditinggal pergi dalam beberapa hari, juga diikuti oleh menurunnya keyakinan yang terbangun di kalangan mereka akan kebaikan tetangganya. Menurut mereka tetangga yang baik adalah tetangga yang saling peduli dan mau membantu satu sama lain, misalnya turut mengawasi keamanan rumah tetangga saat ditinggal pergi. Hal ini telah menjadi nilai bersama bagi warga, sampai akhirnya kondisi tersebut berubah seiring dengan perkembangan dan kemajuan komunitas pulau

melalui pelaksanaan program pembangunan yang diikuti oleh komersialisasi hasil laut yang dihasilkan oleh warga pulau.

Kejujuran bagi warga PBL merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, agar dapat dipercaya oleh warga lainnya. Itulah sebabnya warga PBL menjadikan kejujuran sebagai nilai yang harus terus dipelihara agar dapat bertahan dalam kehidupan bermasyarakat pada komunitas pulau. Sebab melalui kejujuran, seseorang akan terbangun kepercayaannya (*trust-nya*) kepada warga yang bersangkutan. Akan tetapi nilai kejujuran yang berusaha terus dipelihara, secara perlahan telah mengalami penurunan (*tergerus*) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring dengan proses perubahan yang dialami warga pulau sebagai dampak dari intervensi negara terhadap komunitas PBL.

Berbeda dengan kejujuran dan ketaatan beribadah, justru mengalami peningkatan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir (*pasca intervensi negara*) kepercayaan (*trust*) antar warga Pulau Barrang Lompo telah tergerus. Proses penggerusan ini terjadi sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur di pulau ini, terutama jalanan, jembatan/dermaga pelabuhan. Perbaikan jembatan/dermaga menyebabkan makin ramainya warga luar pulau terutama dari Kota Makassar masuk ke pulau ini untuk berlibur. Begitu pula sebaliknya banyak juga warga pulau yang berpergian ke luar pulau terutama ke Kota Makassar. Kehadiran para pendatang dan adanya pengalaman yang didapatkan oleh warga pulau setelah bepergian, telah

merubah cara pandang dan pola pikir komunitas pulau, terutama mengenai aspirasi hidup. Hidup harus berubah secara materi, misalnya memiliki rumah yang bagus dengan perabot rumah tangga yang juga bagus. Atas dasar itulah warga pulau semakin sibuk bekerja guna menambah pendapatan mereka agar dapat memiliki rumah yang bagus dengan perabot yang bagus pula. Dan semangat kerja keras warga pulau telah membuahkan hasil sebagaimana saat ini terlihat bangunan-bangunan rumah yang tidak kalah dengan di kota.

Sejalan dengan data di atas, hasil wawancara informan menunjukkan bahwa kepercayaan antar warga di Pulau Baraang Lompo telah mengalami penurunan (tergerus). Dalam istilah Fukuyama masyarakat yang demikian disebut masyarakat yang rendah kepercayaan antar warganya (*low trust*). Kondisi ini berimplikasi pada semakin menipisnya stok kepercayaan antar warga di Pulau Barrang lompo. Meskipun hal itu belum sampai pada titik nadir yang sangat rendah. Dalam istilah Fukuyama, apabila stok kepercayaan (*trust*) tersebut terus mengalami penggerusan maka secara perlahan akan tercipta ketidakpercayaan (*distrust*). Selanjutnya pada masyarakat yang demikian akan sangat sulit membangun kebersamaan (*solidaritas*) antar warga. Jika kebersamaan tidak tercipta, maka kerja sama terutama antar warga akan sulit terwujud.

Secara teori hal ini dapat dipahami, bahwa ketika masyarakat semakin terpengaruh dengan aspirasi hidup yang lebih tinggi, maka seseorang cenderung semakin memanfaatkan waktunya untuk bekerja demi kepentingan

diri dan keluarganya. Dalam situasi demikian otomatis mereka kurang memperhatikan kepentingan orang lain termasuk tetangganya. Artinya mereka (warga) lebih memilih memenuhi kepentingan diri dan keluarganya terlebih dahulu dengan memaksimalkan waktu yang dia miliki, dari pada ikut menjaga rumah tetangganya yang ditinggal pergi. Jadi mereka cenderung lebih memilih mendahulukan keselamatan buat diri dan keluarganya kemudian membantu atau memenuhi kepentingan orang lain (*safety first*). Dengan kata lain sifat individualistik sudah mulai merasuk kedalam jiwa komunitas PBL yang selama ini kuat memegang semangat kolektivitasnya. Jika hal ini terus terjadi, maka secara perlahan komunitas PBL akan kehilangan jati dirinya yang berlandaskan pada semangat kolektivitas dan nilai-nilai moral religius sebagai suatu warisan dari para leluhurnya yang sangat berharga.

Fenomena meningkatnya ketaatan beribadah bagi warga PBL merupakan hal menarik untuk dikaji lebih jauh. Sebab ketika unsur lain dari kapital sosial mengalami penurunan atau tergerus (dekapitalisasi), justru ketaatan beribadah mengalami penambahan (rekapitalisasi). Berdasarkan pengamatan peneliti yang didalami melalui wawancara dari sejumlah informan diperoleh gambaran bahwa meningkatnya kesadaran beribadah pada warga Pulau Barrang Lompo berkat adanya perkembangan pembangunan sarana ibadah (masjid) yang disertai masuknya kelompok jama'ah Tabliq ke pulau tersebut.

Sebagaimana dipahami bahwa masjid menjadi simbol keberadaan dan pengaruh agama Islam pada suatu wilayah,

bahkan dalam sejarah dijelaskan pengaruh agama dalam pembangunan karakter masyarakat disekitarnya sangat besar. Demikian halnya di PBL yang hingga saat ini telah berdiri dua masjid yang cukup megah. Masjid pertama di sebut Masjid “Tua” terletak di RW III. Sementara masjid yang kedua disebut Masjid “Baru” terletak di RW IV. Keberadaan kedua masjid ini sangat mewarnai suasana kehidupan (religiusitas) komunitas pulau, terlebih setelah kedua masjid tersebut di renovasi melalui swadaya masyarakat dan bantuan donatur dari luar PBL.

Masjid pertama (“Tua”) kira-kira dibangun pada awal Tahun 1900-an. Pendirian masjid ini diinspirasi oleh seorang penganjur agama Islam yang datang pertama kali di Pulau Barrang Lompo sekitar Tahun 1625, yakni Syekh Tuan Karama’ Bah Alwi Assegaf (keterangan ini diambil dari seorang informan). Kedatangan tokoh ini bertepatan dengan hari Jum’at, atas inisitif beliau yang dibantu oleh tokoh masyarakat setempat, lalu dikumpulkanlah warga untuk melaksanakan sholat jum’at secara berjama’ah. Namun karena jamaahnya tidak mencapai 40 orang, maka beliau hanya melaksanakan sholat zduhur saja. Konon pada tempat sujud syekh itulah kemudian dibangun surau (mushollah) yang kemudian dikembangkan menjadi bangunan masjid sekitar Tahun 1900. Menurut masyarakat setempat, Masjid “Tua” tersebut merupakan masjid ketiga yang didirikan di Kerajaan Gowa ketika itu.

Sementara itu masjid kedua dibangun kira-kira pada Tahun 1960-an juga atas swadaya masyarakat. Masjid kedua (Masjid Baru) yang terletak di RW IV, kebanyakan jama’ahnya

beraliran Muhammadiyah. Sementara Masjid “Tua” jamaahnya kebanyakan beraliran NU. Perlu pula diketahui bahwa kedua masjid ini mulai dibangun ketika pulau ini secara administratif merupakan daerah perdesaan yang ketika itu masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Pangkep dan berstatus sebagai Kota Kecamatan.

Terkait dengan informasi di atas, informan menunjukkan bagaimana beratnya perjuangan para tokoh agama dalam membina kesadaran beragama pada warga pulau. Karena semangat (*spirit*) keberagamaan mereka masih sangat rendah ketika itu, akibatnya nilai-nilai agama kurang dipahami sehingga tidak terpatrit dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya sehingga pada waktu itu sering kali dijumpai perilaku masyarakat yang jauh menyimpang dari ajaran agama. Sebagai contoh perilaku buruk masyarakat yang sering terjadi pada masa itu adalah, kebiasaan minum “tua” (arak) bagi kalangan orang dewasa dan remaja yang kadang-kadang membuat kegaduhan pada malam hari dan tak jarang terjadi perkelahian diantara mereka.

Suasana kehidupan komunitas pulau yang menyimpang berangsur-angsur berubah sejak lancarnya transportasi penyebrangan ke PBL, sehingga menyebabkan semakin banyaknya para penganjur agama datang ke pulau tersebut. Salah satu kelompok agama yang membawa pengaruh besar terhadap kehidupan keberagamaan warga di PBL adalah kelompok “Jamaah Tabliq”, yang mulai masuk awal Tahun 2000-an. Kelompok agama yang saat ini bermarkas di Masjid disekitar Kerung-kerung Kota Makassar, biasa dikenal oleh masyarakat setempat dengan panggilan “Pa’janggal-janggal”.

Disebut demikian karena kelompok ini pada umumnya memelihara jenggotnya hingga panjang sebagai ciri khas mereka. Kelompok ini berdakwah secara bergantian di kedua masjid yang ada di Pulau Barrang Lompo untuk mengajak jamaah masjid dan penganut agama Islam lainnya agar taat menjalankan syariat Islam. “Jamaah tabliq” juga bergerilya dari rumah ke rumah dan di jalan-jalan/gang-gang mengajak warga agar taat menjalankan syariat Islam sekaligus menyeruh mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Salah satu rutinitas “Jama’ah tabliq” setiap selesai sholat berjamaah di masjid ialah, selalu dibacakan riwayat dan hadist Nabi Muhammad SAW (buku Riadussholihin) yang berisi seruan untuk menjalankan syariat agama Islam. Kegiatan dakwah tersebut terus mereka lakukan secara bergantian, dengan cara bermalam dua sampai tiga malam di sekitar masjid.

Berkat kerja keras mereka, secara perlahan mulailah terbentuk gairah (*spirit*) keberagamaan pada warga di PBL. Moment ini segera dimanfaatkan para tokoh agama di PBL dengan membentuk kelompok pengajian yang kegiatannya disertai dengan arisan. Peserta pengajian tersebut pada umumnya kaum perempuan, tetapi tidak jarang ada juga kaum laki-laki meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Kegiatan pengajian dan arisan dilakukan secara bergiliran di rumah-rumah penduduk dan sesekali diadakan di masjid.

Melalui kegiatan tersebut pengetahuan agama warga semakin bertambah yang sekaligus menciptakan interaksi yang intensip antar warga, sehingga terbentuk keakraban diantara mereka. Sikap keakraban yang telah terbentuk itu semakin memperkokoh solidaritas sosial, rasa kebersamaan

dan senasib sepenanggungan yang sangat dirasakan oleh masing-masing warga, sebagaimana diungkapkan seorang tokoh perempuan yang juga sebagai informan. Menurut informan, keberadaan kedua masjid di PBL yang kemudian diikuti dengan masuknya kelompok “Jama’ah tabliq” untuk berdakwah, telah membawah pengaruh besar terhadap perubahan semangat (*spirit*) keberagamaan komunitas Pulau Barrang Lompo. Semangat keberagamaan tersebut kemudian menciptakan suasana keakraban yang selanjutnya membuat jaringan sosial antar teman dan antar tetangga semakin mudah tercipta dan semakin kuat. Pada umumnya dalam masyarakat yang banyak memiliki persamaan, misalnya; kesamaan pandang, kesamaan cita-cita dan kepentingan bersama, biasanya lebih mudah tercipta kerja sama (solidaritas sosial mekanik). Praktik nilai-nilai lokal yang diperkuat oleh pemahaman ajaran agama yang baik telah memperkuat jalinan persaudaraan dan ikatan kekeluargaan warga komunitas Pulau Barrang Lompo.

Gerakan “Jama’ah Tabliq” di Pulau Barrang Lonpo selain berhasil membangun pemahaman aqidah dan syariat Islam kepada warga pulau. Secara perlahan juga mampu merubah kebiasaan warga untuk tidak melakukan ritual-ritual tertentu atau upacara-upacara adat yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat agama Islam. Beberapa kebiasaan yang berubah tersebut antara lain; kebiasaan mandi syafar di masjid menjelang masuknya bulan ramadhan, bakar lilin di masjid pada malam hari menjelang bulan ramadhan, ziarah ke makam leluhur ketika akan ada hajatan dan upacara sesajian (*pa’rappo*) sebelum melaksanakan penang-

kan atau pencarian teripang serta ikan di laut. Meskipun demikian kebiasaan-kebiasaan sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, hingga saat ini masih ada warga Pulau Barrang Lompo yang tetap melakukannya. Namun jumlahnya lebih sedikit dibanding sebelum adanya program pembangunan sarana ibadah (masjid) yang dibarengi dengan masuknya kelompok jama'ah tabliq.

Berdasar kriteria penilaian yang menunjukkan bahwa meskipun hingga saat ini tingkat kepercayaan kepada sesama (antar warga) komunitas pulau masih tinggi. Namun seiring dengan masuknya intervensi negara melalui program pembangunan ke dalam komunitas pulau khususnya pembangunan/perbaikan dermaga pelabuhan, maka secara perlahan tingkat kepercayaan tersebut telah mengalami penurunan (tergerus) sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Tergerusnya tingkat kepercayaan kepada sesama warga pulau, terjadi pada semua strata sosial masyarakat. Penurunan yang paling terasa (nyata) terjadi pada kelompok masyarakat yang berstrata sosial atas. Hal ini berarti bahwa mereka yang berstatus sosial menengah ke bawah lebih tahan (kuat) memelihara kepercayaan (*trust*) antar sesama warga, dibanding warga yang berada pada strata sosial atas (kelas atas). Secara teori hal ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang berada pada strata sosial atas umumnya lebih mementingkan semangat dan jiwa kemandirian yang lebih individualistik (solidaritas organik), daripada semangat kerja sama dan kolektivitas (solidaritas mekanik).

2. Kepercayaan (*Trust*) Warga pada Keamanan Pulau

Keamanan suatu wilayah menjadi faktor yang turut menentukan lancarnya pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan. Apabila situasi keamanan tercipta dengan baik maka akan memudahkan bagi aktor-aktor pembangunan menjalankan fungsi dan kewenangannya. Sebaliknya jika situasi keamanan suatu wilayah tidak terkendali maka proses pembangunan akan terganggu. Itulah sebabnya faktor keamanan sangat penting dan menjadi dambaan setiap orang dan masyarakat pada umumnya. Data penelitian menunjukkan bahwa kondisi keamanan di Pulau Barrang Lompo saat ini (pasca intervensi) tidak lebih baik (kurang aman) dari pada sepuluh Tahun yang lalu (sebelum intervensi).

Meski demikian, pada umumnya warga percaya bahwa saat ini di PBL kurang aman dibanding sepuluh Tahun lalu (sebelum intervensi negara). Namun, warga masih merasa yakin bahwa saat ini (pasca intervensi negara) mereka akan aman berjalan sendirian pada malam hari dibanding pada sepuluh tahun lalu. Adanya perasaan kurang aman (takut) yang dialami oleh warga pulau jika berjalan sendirian di malam hari pada masa lalu (sebelum intervensi), disebabkan karena sebelum intervensi negara melalui pembangunan jaringan listrik, keadaan pulau pada malam hari masih sangat gelap akibat belum adanya penerangan (listrik) jalanan. Disamping itu, beberapa kawasan pulau masih ditutupi oleh pohon-pohon besar dan lebat, sehingga secara psikologis mempengaruhi keberanian warga untuk tidak berjalan pada malam hari meskipun sebenarnya kondisi pulau aman-aman saja atau tidak ada gangguan keamanan dari orang

lain. Hal ini diperkuat dari pandangan seorang tokoh masyarakat (Infroman).

Menurut informan, adanya perasaan takut warga pulau untuk keluar rumah pada malam hari, lebih disebabkan karena tekanan psikologis akan adanya gangguan makhluk halus, bukan karena situasi pulau yang tidak aman karena adanya gangguan dari orang jahat. Ketakutan warga akan adanya makhluk halus menunjukkan masih kuatnya kepercayaan warga pulau kepada hal-hal yang bersifat ghaib. Selain itu di Pulau Barrang Lompo terdapat tujuh kuburan tua yang hingga saat ini masih dikeramatkan oleh komunitas pulau. Namun demikian, saat ini kepercayaan warga terhadap hal-hal yang bersifat ghaib termasuk mengsakralkan kuburan-kuburan tua telah menurun (tergerus). Hal ini bisa dilihat dari keberanian warga pulau membangun rumah berdampingan dengan kuburan-kuburan tua tersebut. Tindakan mendirikan rumah dekat atau bahkan mengambil lahan kuburan untuk tempat membangun rumah bukan hanya disebabkan karena menurunnya kepercayaan warga kepada hal-hal yang bersifat ghaib. Tetapi juga sebagai akibat makin sedikitnya lahan kosong di Pulau Barrang Lompo saat ini. Hal ini terjadi seiring dengan masuknya program-program pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun atas inisiatip dari warga. Salah satu program pembangunan yang telah menciptakan perubahan pada komunitas pulau adalah pembangunan infra struktur jalanan. Meskipun sebelum intervensi negara, seperti jalanan lingkaran pulau serta beberapa ruas jalanan penghubung antar kampung dan gang penghubung antar rumah warga telah

ada. Namun kondisinya masih berupa jalanan tanah berpasir sebagaimana ciri jalanan pada umumnya di pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan dan mungkin saja pada pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia. Kondisi jalanan seperti itu cukup lama dirasakan oleh warga Pulau Barrang Lompo. Situasi itu berubah setelah masuknya program perbaikan jalanan ke Pulau Barrang Lompo, berupa pemasangan pavin blok yang pelaksanaannya terbilang lama karena dilakukan secara bertahap.

Perbaikan jalanan dalam bentuk pemasangan pavin blok tahap I dimulai Tahun 1999 oleh dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dari dana APBN. Pembangunan jalanan lingkaran pulau dan jalanan setapak menyebabkan mobilitas antar warga di dalam pulau semakin tinggi dan menjadi bagian terpenting bagi kemajuan masyarakat. Kemudian berkat pembangunan fasilitas tersebut, ada warga masyarakat yang mampu membeli sepeda motor, bahkan pernah ada mobil angkutan umum di pulau ini. Namun karena penggunaannya tidak efisien, maka pada Tahun 2004 digantikan oleh motor modifikasi (masyarakat setempat menyebutnya bentor) yaitu semacam motor gandeng sebagai tulang punggung moda transportasi lokal di Pulau Barrang Lompo. Selain berfungsi sebagai angkutan barang dan orang ke dermaga atau pelabuhan, bentor juga berfungsi sebagai angkutan rekreatif, terutama pada sore hari sampai menjelang malam (magrib). Pada waktu-waktu tersebut bentor ramai berlalu-lalang membawahi penumpang yang beragam mulai dari anak, remaja hingga orang tua terutama ibu-ibu rumah tangga. Selain itu, bentor juga sangat membantu

meningkatkan intensitas saling kunjung dan keakraban warga pulau, selanjutnya mempermudah terbangunnya perasaan senasib, kebersamaan dan saling peduli. Dalam arti bahwa solidaritas sosial antar warga pulau (*bonding social capital*) sangat nampak dalam kehidupan sehari-hari.

Kemajuan lain yang terjadi seiring dengan membaiknya sarana jalanan adalah, adanya pemasangan lampu di jalan-jalan utama dari PLN dan inisiatif warga, sehingga pada malam hari jalan protokol menjadi terang benderang—begitu juga dengan gang-gang/lorong-lorong. Kondisi demikian membuat para warga terutama kalangan remaja dan tak ketinggalan anak-anak serta orang tua memanfaatkannya untuk bersantai. Tidak jarang diantara mereka ada yang membuat balai-balai atau dipan-dipan yang disimpan di depan rumah untuk bersantai dan bersenda gurau, terutama pada sore hari hingga malam hari. Keberadaan fasilitas tersebut membuat intensitas interaksi antar warga terutama antar tetangga makin tinggi sehingga mereka saling kenal satu sama.

Saling kenal antar sesama warga komunitas sebagaimana terlihat pada komunitas nelayan Pulau Barrang Lompo, akan memudahkan terciptanya solidaritas sosial dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan antar warga yang tinggi (*high trust*). Sebaliknya jika kepercayaan antar warga rendah (*low trust*) karena telah tergerus oleh proses pembangunan, maka akan sulit untuk menciptakan solidaritas. Tergerusnya kepercayaan (*trust*) antar warga dan antar tetangga, disebabkan oleh makin kuatnya keterbangunan semangat persaingan, untuk memiliki penghasilan tinggi agar dapat memiliki

rumah bagus yang dilengkapi dengan perabotan rumah tangga yang harganya mahal sehingga terkesan mewah. Atas dasar itulah mereka dapat memperoleh *prestise* di dalam masyarakat, misalnya semakin dihargai dan dihormati oleh warga lain. Hal ini dapat terlihat ketika mereka menghadiri suatu pesta undangan pada acara-acara resmi, misalnya pesta perkawinan atau aqiqah. Bagi mereka yang telah memperoleh *prestise*, mereka akan diberikan tempat duduk khusus yang berbeda dengan tempat duduk orang pada umumnya. Menempatkan orang pada tempat yang khusus yang sebelumnya ditentukan oleh pelaksana acara merupakan hak *previlese* yang melekat pada diri orang bersangkutan di dalam komunitasnya. Hal itu akan terus berlaku serta dijalankan oleh setiap warga komunitas sampai orang yang bersangkutan kehilangan hak *previlese*.

Perubahan lain yang terjadi sebagai dampak dari membaiknya jalanan di Pulau Barrang Lompo adalah pada prosesi upacara adat pernikahan. Sebelum ada bentor, pengantin pria dan wanita diarak keliling pulau dengan cara ditandu, sebelum disandingkan di pelaminan. Arakan pengantin diikuti rombongan undangan dan sanak keluarga dengan diiringi tabuhan musik gendang yang dipadu dengan alunan musik harmonika yang melatunkan lagu khas masyarakat pulau (warga setempat menamakannya Djidor). Namun sejak pembangunan jalanan selesai maka arakan pengantin pria dan wanita tidak lagi memakai tandu tetapi menggunakan bentor. Meskipun masih tetap memakai upacara adat dengan pola yang sama, penggunaan sarana

bentor dianggap lebih praktis dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dibanding tandu.

Dari wawancara yang dilakukan, informan menyatakan bahwa sebelum dan setelah adanya bentor, kegiatan mengarak pengantin keliling pulau tetap diadakan, meskipun pola dan cara yang dilakukan berbeda—yaitu dari memakai tandu menjadi memakai bentor. Fenomena ini terjadi karena perubahan orientasi (cara berpikir) warga pulau yang lebih pragmatis, yaitu biaya menggunakan bentor (cara baru) lebih murah dan praktis dari pada memakai tandu (cara lama).

Program perbaikan jalanan yang dilanjutkan pada Tahun 2003, adalah pemasangan pavin blok pada ruas jalan tahap II melalui program ABRI masuk Desa (AMD). Pada tahap ini, sejumlah jalanan setapak dipasangi pavin blok sehingga pemukiman warga menjadi lebih tertata rapih. Selanjutnya pada Tahun 2010 perbaikan jalan berupa pemasangan pavin blok tahap III berlangsung melalui program PNPM Mandiri. Sasaran program adalah menambah pavin blok dari lebar dua meter menjadi tiga meter, di sepanjang ruas jalanan lingkar dan pemasangan pavin blok pada jalanan setapak lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh informan. Suasana kebersamaan dan kebahagiaan warga pulau akibat perbaikan jalanan tidak berarti tanpa cacat, karena ternyata pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya melibatkan warga pulau. Pembangunan jalanan yang berbasis proyek, ternyata lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar pulau. Sementara warga pulau (penduduk setempat) jarang dilibatkan. Adapun kerjaan yang diberikan dalam pemasangan pavin

blok, hanya terbatas pada pekerjaan kasar saja. Berbeda dengan pembangunan jalan dari AMD yang melibatkan warga, meskipun hanya terbatas pada penyediaan konsumsi dan tempat menginap saja. Karena masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam pembangunan jalanan, maka muncullah perasaan kurang memiliki terhadap sarana yang telah dibangun tersebut, sehingga mereka kurang terlibat dalam pemeliharannya. Hal ini terbukti ketika ada kegiatan gotongroyong semisal pembersihan jalanan dan selokan, warga pulau kurang berpartisipasi meskipun ketika kerja bakti berlangsung mereka ada di rumah.

Menurut informan lainnya, pelibatan warga dalam pelaksanaan program pembangunan sangat penting agar dapat memperoleh partisipasi mereka, terutama dalam hal pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah faktor ketokohan dan kedekatan emosional seorang pemimpin dengan warganya. Karena pada umumnya masyarakat lokal lebih tunduk kepada pemimpinnya melalui hubungan yang bersifat emosional (informal) daripada karena faktor hubungan yang bersifat rasional dan struktural (formal) semata.

3. Kepercayaan (*Trust*) Warga kepada Pemerintah dan Tokoh Masyarakat.

Penjelasan lain untuk melihat bagaimana perubahan kapital sosial terkait kepercayaan (*trust*) pada warga PBL, yakni kepercayaan warga kepada pemerintah dan tokoh masyarakat. Kepercayaan (*trust*) warga kepada pemerintah, menjadi modal penting bagi keberlangsungan pemerintahan

pada suatu wilayah dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Demikian pula kepercayaan warga terhadap tokoh masyarakat juga sangat menentukan berjalannya roda pemerintahan dan program pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan. Sebab bagi masyarakat perdesaan, seorang kepala desa disamping sebagai kepala pemerintahan atau pemimpin, juga sekaligus sebagai tokoh masyarakat yang selalu menjadi panutan. Pandangan demikian juga berlaku bagi komunitas yang berada dan hidup di PBL.

Data penelitian menunjukkan bahwa saat ini (pasca intervensi negara) warga pulau sudah kurang percaya kepada pemerintah dibanding pada sepuluh Tahun yang lalu (sebelum intervensi negara). Ini berarti dalam kurun waktu sepuluh Tahun terakhir, kepercayaan (*trust*) warga PBL kepada pemerintah telah menurun (tergerus). Hal yang sama juga terjadi pada kepercayaan (*trust*) warga kepada tokoh masyarakatnya.

Tergerusnya kepercayaan (*trust*) warga pulau terhadap pemerintah dan tokoh masyarakat, disebabkan karena kurangnya kepedulian mereka (pemerintah dan tokoh masyarakat) terhadap kepentingan warga. Hal ini terjadi disebabkan karena pada umumnya lurah beserta aparatnya adalah orang luar (pendatang) dan tidak tinggal di PBL. Adapun orang-orang yang telah di tokohkan selama ini, sudah tidak dapat lagi dijadikan panutan oleh masyarakat. Karena tokoh-tokoh masyarakat lebih sibuk dengan urusannya sendiri, dari pada berusaha memberi perlindungan (mengadvokasi) anggota masyarakat yang mengalami permasalahan, terutama terkait dengan perlakuan ketidakadilan dari pihak lain baik dari

warga lain maupun dari oknum pemerintah itu sendiri. Padahal masyarakat mengharapkan perlindungan serta dukungan moral dari orang-orang yang dituakan di kampungnya, apalagi ketika mereka berhadapan dengan berbagai persoalan hidup.

Berdasarkan wawancara dengan informan, diketahui bahwa kepatuhan warga PBL terhadap pemerintah dan tokoh masyarakat saat ini telah memudar (tergerus). Hal ini disebabkan oleh pembangunan struktur kelembagaan pemerintahan dari sistem pemerintahan desa (lama), berubah menjadi sistem pemerintahan kelurahan (baru). Sebagaimana dapat dipahami dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Penunjukkan pemimpin (lurah) yang bukan penduduk setempat, menjadi faktor utama meurunnya kepercayaan warga pulau kepada pemerintah setempat. Sehingga pemerintahan yang dibentuk kurang legitimasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan; tingkat kepercayaan warga pulau kepada pemerintah dan tokoh masyarakat dalam posisi “sedang” (tidak mengalami kenikan atau penurunan), baik pada sepuluh tahun lalu (sebelum intervensi negara) maupun saat ini (pasca intervensi negara). Namun selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi penurunan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan tokoh masyarakat pada komunitas pulau tersebut dan hal itu terjadi pada semua strata sosial masyarakat. Penurunan tingkat kepercayaan yang paling terasa (nyata) terjadi pada kelompok masyarakat yang berstrata sosial rendah. Hal ini terjadi sebagai dampak dari intervensi negara terutama melalui program pembangunan struktur kelembagaan pemerintahan.

Pulau Barrang Lompo pada awalnya memiliki struktur pemerintahan berbentuk desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah wilayah Kecamatan Tumpa Biring Kabupaten Pangkep. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pulau ini kemudian berubah status menjadi pemerintahan kelurahan yang sekaligus secara administratif menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Ujung Tanah, yang berada dalam wilayah Kota Makassar. Perubahan status ini tidak terlepas dari adanya keinginan warga Pulau Barrang Lompo (PBL) untuk berinteraksi dengan Kota Makassar karena secara geografis jarak pulau ini lebih dekat dari Kota Makassar, dibanding jarak ke Kota Pangkep. Motif lain yaitu, pemerintah Kota Makassar ketika itu memiliki tujuan menjadikan PBL sebagai pulau wisata. Berdasar pada dua keinginan tersebut, pada tahun 1971 Desa Barrang Lompo resmi berubah menjadi Kelurahan Barrang Lompo dan masuk kedalam wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, yang ketika itu Patompo sebagai wali kotanya. Selanjutnya beberapa Tahun kemudian diikuti oleh bergabungnya Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi dan dua pulau lainnya berdiri sendiri sebagai satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Nama kelurahan disesuaikan dengan nama masing-masing pulau. Perubahan status pemerintahan tersebut membawa konsekuensi bagi warga Pulau Barrang Lompo.

Hasil wawancara dengan informan lainnya, memperkuat gambaran data yang menunjukkan bahwa loyalitas warga pulau terhadap pemerintahnya telah menurun (tergerus). Tergerusnya loyalitas warga terhadap pemerintahan pasca

menjadi kelurahan karena antara warga dan pemerintah (lurah) tidak ada hubungan kekeluargaan lagi, sehingga ikatan batin di antara mereka pun sangat lemah. Akibatnya kepercayaan warga kepada pemerintahan saat itu tergerus. Selanjutnya membuat warga baik secara individu maupun kolektif (komunitas) kurang terlibat (minim partisipatif) dalam kegiatan pembangunan yang dipelopori oleh lurah. Dalam hal ini lurah telah kehilangan legitimasi dari warganya sendiri. Tentu hal ini sangat tidak menguntungkan bagi kedua pihak (pemerintah dan masyarakatnya). Karena timbul perasaan saling tidak percaya (*distrust*) bahkan cenderung saling curiga sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif. Tentu saja situasi ini berpengaruh terhadap proses pembangunan yang sementara berlangsung.

Penelitian Li di wilayah pegunungan Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa intervensi pembangunan melalui berbagai program yang dibawah oleh para aktor pembangunan justru telah menggerus nilai-nilai lokal. Bahkan cenderung menimbulkan disintegrasi sosial yang kemudian memicu konflik sosial yang berkepanjangan di wilayah tersebut (*The Will to Improve*, 2012). Meskipun penelitian Li dan penelitian ini dilakukan pada tipe wilayah yang berbeda, namun menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda yaitu keduanya menemukan bahwa intervensi pembangunan melalui program pembangunan justru telah menggerus kapital sosial di kedua komunitas tersebut.

Faktor lain yang ikut terpengaruh akibat perubahan status pemerintahan tersebut, adalah berkurangnya kapasitas komunitas Pulau Barrang Lompo antara lain: 1) komunitas

Pulau Barrang Lompo kehilangan kapasitas politiknya. Ketika komunitas tersebut statusnya sebagai desa, maka semua organisasi yang ada di desa baik organisasi pemuda, organisasi nelayan maupun organisasi ibu-ibu, masih merupakan bentukan warga dan dibawah kontrol kepala desa. Namun setelah menjadi kelurahan semuanya menjadi bentukan dan sekaligus di kontrol kuat oleh Negara. Karenannya segala aktivitas organisasi wajib dilaporkan kepada negara melalui bidang sosial politik di kantor walikota. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa negara menghegemoni komunitas desa. Dengan adanya perubahan itu, tidak dengan sertamerta kita dapat menumbuhkan organisasi baru dengan semangat baru dan pola organisasi yang lebih demokratis. Kenyataannya kemampuan rakyat berkumpul dan berserikat (berorganisasi) justru tergerus. Komunitas pulau (warga desa) jelas-jelas kehilangan kapasitasnya dalam berpolitik. Mereka tidak sepenuhnya memahami cara dan mekanisme untuk melakukan tawar-menawar bagi kepentingan aspirasinya secara sehat. Apalagi selama ini warga sering kali mengalami kekecewaan dalam setiap kali pemilihan (legislatif, walikota dan lainnya) yang biasanya melupakan janji-janjinya kepada rakyat pasca pemilihan. 2) aparat kelurahan (pemerintah kelurahan) pun kehilangan kemampuannya di dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya sendiri. Semua pembangunan infrastruktur diselenggarakan oleh pemerintah (negara) itupun ketika Orde Baru (ORBA) dan tentu dengan bantuan ABRI. Kini pembangunan infrastruktur diserahkan kepada pelaksana proyek yang memenangkan tender pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pelaksana proyek atas

nama negara telah menghegemoni kekuasaan pemerintah (kelurahan/desa), sehingga kehilangan kewenangan dalam menjalankan program pembangunan di wilayahnya. Tugas dan fungsi mereka tidak lebih hanya sekedar cap stempel dari pemerintah pusat (negara).

Program pembangunan berbasis proyek yang lebih mengejar keuntungan daripada kualitas atau hasil, menyebabkan para pelaksana cenderung mendatangkan pekerja dari luar pulau dari pada mempekerjakan warga pulau. Kalaupun ada warga pulau yang terlibat, maka hanya bagian kecil—itupun pekerjaan yang paling rendah. Dampak dari kurang dilibatkannya (nonpartisipatif) warga dalam kegiatan proyek, adalah kurangnya rasa memiliki dari warga terhadap hasil pembangunan dari proyek tersebut. Akibatnya ketika pemerintah (lurah dan aparatnya) mengajak warga berpartisipasi dalam pemeliharaan jalanan, misalnya pembersihan got dan lain sebagainya ternyata sangat sedikit yang terlibat. Warga pulau lebih memilih tetap melakukan aktivitasnya sendiri, misalnya mengecat perahu atau memperbaiki jaring dan bahkan beberapa diantaranya hanya asyik bercerita di teras rumahnya. Kondisi ini mempertegas bahwa ketokohan dan kharisma seorang pemimpin sangat menentukan dalam menggerakkan proses pembangunan, terutama pada tingkat komunitas (desa). Karena dari sanalah kemudian akan terbangun loyalitas yang tinggi, itu semua dibuktikan dengan sikap warga yang patuh terhadap ajakan dan himbauan sang aktor pembangunan desa (kepala desa).

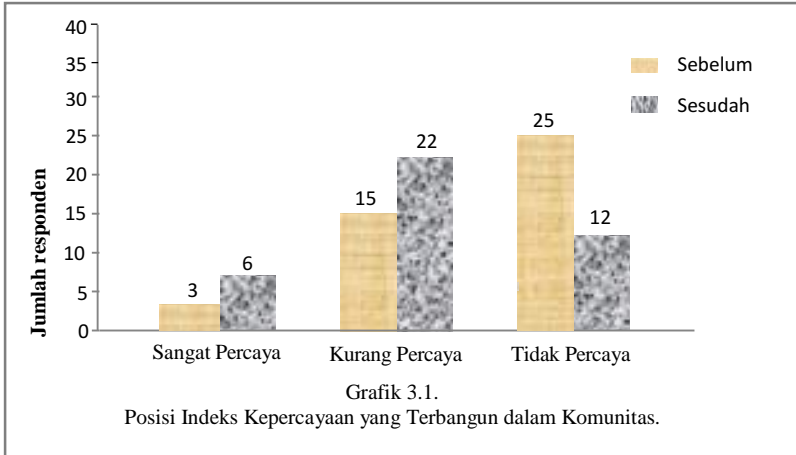
4. Kepercayaan (*Trust*) Warga kepada Lembaga Bentukan Masyarakat

Keberadaan lembaga bentukan masyarakat (LSM) pada suatu wilayah, dapat menjadi ukuran kemajuan bagi warga masyarakat akan kemampuannya mengorganisasikan diri agar dapat mengadvokasi dan memperjuangkan hak-haknya sebagai warga. Bagi LSM yang telah berhasil menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat, maka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat. Sebaliknya jika tidak berhasil dalam menjalankan program-programnya, maka akan mendapatkan ketidakpercayaan (*distrust*) dari masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat kepada LSM dapat terjadi karena boleh jadi mereka belum tau lebih jauh program dan bagaimana latar belakang LSM yang bersangkutan.

Data penelitian menunjukkan bahwa, baik sebelum maupun sesudah intervensi negara melalui program pembangunan, warga PBL kurang percaya terhadap keberadaan kelompok-kelompok bentukan masyarakat (LSM). Rendahnya kepercayaan warga terhadap keberadaan LSM selain karena kegagalan dari LSM yang bersangkutan dalam menjalankan misinya juga karena pada umumnya warga belum tahu apa dan bagaimana LSM tersebut, terlebih program-programnya. Meskipun demikian, data juga menunjukkan bahwa sebelum intervensi negara. Telah ada sejumlah warga yang sudah mengenal keberadaan LSM di PBL, termasuk program-program yang dijalankannya.

B. Posisi Indeks Kepercayaan (*Trust*) pada Komunitas PBL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kepercayaan (*trust*) yang terbangun pada komunitas PBL saat ini (pasca intervensi negara) tidak lebih baik (lebih rendah) dari pada sepuluh tahun lalu (sebelum intervensi negara). Dengan kata lain indeks kepercayaan yang terbentuk dalam komunitas nelayan di PBL sekarang (pasca intervensi) lebih rendah dari pada sepuluh tahun yang lalu (sebelum intervensi). Perlu dipertegas juga bahwa, meskipun dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi penurunan indeks kepercayaan (*trust*) pada komunitas pulau, namun perubahan tersebut bukanlah perubahan dari kondisi baik menjadi buruk, melainkan perubahan dari kondisi baik menjadi biasa saja. Artinya, kenyataan tersebut belum sampai pada kondisi yang membentuk situasi ketidakpercayaan (*distrust*) di dalam komunitas pulau. Sebab jika hal ini terjadi maka yang muncul kemudian adalah suasana tegang, bahkan boleh jadi sampai pada kebencian. Dari situ akan terjadi disharmonisasi (ketidak harmonisan) antar warga di dalam komunitas. Sementara, fakta yang terjadi pada komunitas nelayan PBL masyarakatnya masih harmonis. Meskipun demikian, bibit-bibit ketidakpercayaan antar sesama warga sudah mulai terbentuk. Untuk lebih jelasnya kondisi tersebut lihat data pada Grafik 3.1. sebagai berikut:



Merujuk pada penjelasan keseluruhan data mengenai proses perubahan kepercayaan (*trust*) pada komunitas Pulau Barrang Lompo, dapat dirumuskan simpulan dengan menggunakan kriteria penilaian. Jika angka total skor pilihan jawaban responden pada *item* pertanyaan berada antara (440-734), maka dikatakan kepercayaan (*trust*) pada komunitas pulau rendah. Jika total skor berada antara (735-1028) dikatakan kepercayaan (*trust*) sedang. Namun, apabila angka total skor berada antara (1029-1322) dikatakan kepercayaan (*trust*) pada komunitas pulau tinggi.

Hasil pengolahan data diketahuia bahwa total skor angka kepercayaan (*trust*) pada komunitas pulau saat ini adalah (1032). Sementara pada sepuluh tahun lalu skornya adalah (1088). Berpatokan pada tiga kategori penilaian di atas maka dapat dijelaskan bahwa baik pada sepuluh tahun yang lalu maupun saat ini kepercayaan (*trust*) yang terbentuk pada komunitas PBL masih tinggi, yaitu berada antara (1029-1322). Meskipun demikian indeks (tingkat) kepercayaan (*trust*)

pada komunitas tersebut cenderung mengalami penurunan (tergerus), namun tidak sampai pada terbentuknya sikap ketidkpercayaan (*distrust*).

Secara rinci (pervariabel), proses perubahan kepercayaan (*trust*) pada komunitas PBL dapat diuraikan, bahwa meskipun pada sepuluh tahun lalu maupun saat ini kepercayaan (*trust*) antar warga masih tinggi. Namun, kepercayaan tersebut telah mengalami penurunan kadar dari skor (501) turun menjadi (481). Dalam hal ini kepercayaan antar warga pada sepuluh tahun lalu lebih tinggi dari pada saat ini. Kondisi yang sama juga terjadi pada kepercayaan warga terhadap keamanan pulau, hanya saja kondisinya terbalik. Kepercayaan warga terhadap keamanan pulau pada saat ini (pasca intervensi negara) lebih tinggi dibanding pada sepuluh tahun lalu (sebelum intervensi negara). Jadi data tersebut dapat diartikan bahwa dalam kurun waktu sepuluh Tahun terakhir, terjadi peningkatan derajat kepercayaan (*trust*) warga terhadap keamanan pulau.

Sementara itu, kepercayaan warga terhadap pemerintah pada sepuluh tahun lalu lebih tinggi (total skor 92) dari pada saat ini (total skor 81). Dalam arti bahwa selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi penurunan (penggerusan) derajat kepercayaan warga terhadap pemerintah. Kepercayaan warga kepada tokoh masyarakat baik pada sepuluh tahun lalu maupun saat ini masih tinggi. Namun, secara perlahan juga telah mengalami penurunan (penggerusan) seiring dengan perkembangan waktu berdasarkan total skor dari 108 menjadi 95. Hal yang sebaliknya terjadi pada kepercayaan warga terhadap lembaga bentukan masyarakat (LSM). Selama

sepuluh tahun terakhir kepercayaan warga terhadap LSM justru mengalami peningkatan (dari total skor 84 naik menjadi 88), meskipun peningkatannya tidaklah terlalu besar (kurang signifikan), namun angka tersebut sudah cukup memberi indikasi, bahwa terjadi peningkatan kepercayaan (*trust*) warga kepada LSM. Peningkatan kepercayaan (*trust*) tersebut terjadi karena meningkatnya pemahaman warga pulau terhadap fungsi dan kegiatan yang diperankan oleh LSM selama ini di Pulau Barrang Lompo.

Secara umum kepercayaan (*trust*) pada komunitas nelayan di PBL pasca intervensi negara melalui pelaksanaan program-program pembangunan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah tergerus. Terdapat tiga program pembangunan yang berdampak pada perubahan kapital sosial di PBL, yaitu: Pembangunan struktur kelembagaan pemerintah, dari pemerintah desa menjadi kelurahan, pembangunan infra struktur jalan—yaitu pembangunan/perbaikan jalanan lingkaran pulau dan gang-gang dalam pulau serta pembangunan jembatan/dermaga pelabuhan.

Sebagai rangkuman dari perubahan kepercayaan (*trust*) pada komunitas nelayan PBL dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel: 3.1.

Perubahan Kepercayaan (*Trust*) pada Komunitas PBL
Terkait dengan Strata Sosial Masyarakat

Strata Sosial	Perubahan Kepercayaan (<i>Trust</i>) pada Komunitas PBL terkait dengan Strata Sosial.	
	Dulu (Sebelum Intervensi)	Sekarang (Setelah Intervensi)

Lapisan Bawah	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Trust</i> kepada sesama warga pulau baik. ○ <i>Turst</i> warga kepada pemerintah dan tokoh masyarakat baik. ○ <i>Trust</i> warga kepada pengusaha lokal baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Trust</i> kepada sesama warga pulau baik (tetap). ○ <i>Turst</i> warga kepada pemerintah dan tokoh masyarakat menurun. ○ <i>Trust</i> warga kepada pengusaha lokal sangat buruk (turun/tergerus).
Lapisan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Trust</i> kepada sesama warga pulau tinggi. ○ <i>Turst</i> warga kepada pemerintah dan tokoh masyarakat baik. ○ <i>Trust</i> warga kepada pengusaha lokal baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Trust</i> kepada sesama warga pulau tinggi (tetap). ○ <i>Turst</i> warga kepada pemerintah dan tokoh masyarakat buruk (turun). ○ <i>Trust</i> warga kepada pengusaha lokal buruk (turun/tergerus).
Lapisan Atas	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Trust</i> kepada sesama warga pulau tinggi. ○ <i>Turst</i> warga kepada pemerintah dan tokoh masyarakat baik. ○ <i>Trust</i> warga kepada pengusaha lokal baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Trust</i> kepada sesama warga pulau sudah menurun/tergerus ○ <i>Turst</i> warga kepada pemerintah dan tokoh masyarakat buruk (turun/tergerus). ○ <i>Trust</i> warga kepada pengusaha lokal buruk (turun/tergerus).

C. Jaringan Sosial pada Komunitas PBL

Jaringan sosial adalah hubungan antar individu yang berkaitan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan. Simpul dilihat melalui aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan merupakan hubungan antar para aktor tersebut. Dalam kenyataan dimungkinkan terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Jaringan sosial merupakan asset yang sangat bernilai bagi suatu komunitas atau masyarakat. Jaringan memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain. Bukan hanya dengan orang yang mereka kenal secara langsung

untuk memperoleh manfaat timbal balik, akan tetapi juga terhadap orang-orang yang tidak mereka kenal.

Jaringan menjadi sumber daya dari komunitas sosial, karena melalui kepemilikan “hubungan antar individu bermakna subyektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan” maka para aktor memiliki kapital sosial yang mampu diinvestasikan dalam suatu struktur hubungan sosial. Sepanjang jaringan sosial itu menjadi sumber daya maka ia dipandang sebagai kapital sosial. Dalam arti bahwa, semakin banyak mengenal orang dan semakin banyak kesamaan cara pandang dengan orang lain intra maupun ekstra komunitas, maka semakin kaya kapital sosial seseorang atau suatu komunitas.

Apabila seseorang ingin membantu sesamanya, mereka perlu merasa senang melakukannya dan merasa bahwa mereka memiliki kesamaan satu sama lain. Selanjutnya jika mereka memiliki kesamaan nilai, maka mereka lebih cenderung bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kendati jumlah cakupan kompleksitas dan kesementaraan menjadi ciri hubungan sosial modern. Namun Durkheim mencatat bahwa sebenarnya masyarakat itu tidak seperti (menjadi) ikatan atom yang saling berhadap-hadapan. Melainkan, anggotanya disatukan oleh ikatan yang semakin melampaui momen singkat terjadinya pertukaran tersebut. Ikatan sosial yang terbangun dalam suatu komunitas atau masyarakat dapat didasarkan atas kesamaan kepentingan (solidaritas mekanik) dan dapat juga karena perbedaan kepentingan (solidaritas organik) (Durkheim, 1993).

Terbentuknya jaringan sosial terutama jaringan keluar pada suatu komunitas, dapat menjadi pintu keluar masuknya berbagai pengaruh yang datang dari luar, baik di dalam kelompok (*bonding social capital*), antar kelompok (*bridging social capital*) maupun dari luar kelompoknya (*linking social capital*). Terbukanya jaringan sosial keluar pulau, akan mendorong masuknya pengaruh dari luar. Masuknya pengaruh dari luar terhadap suatu komunitas dapat memperluas jaringan sosialnya, sehingga relasi baru dapat bertambah atau terbentuk. Relasi baru tersebut akan melahirkan beragam kerja sama yang tentu saja didasari prinsip saling menguntungkan satu sama lain. Apabila relasi yang terbentuk itu melahirkan kerja sama yang tidak saling menguntungkan satu sama lain, maka kerja sama yang telah terbangun tersebut tidak akan langgeng. Bagaimana jaringan sosial berubah (bertambah) pada komunitas nelayan di PBL akan diuraikan dalam sub pokok bahasan yaitu; Jaringan sosial di dalam komunitas pulau yang meliputi jaringan sosial antar tetangga, jaringan sosial antar teman dan keluarga serta jaringan sosial diluar komunitas pulau.

1. Jaringan Sosial Antar Tetangga

Jaringan sosial antar tetangga merupakan hubungan sosial antar warga pulau yang mencakup lingkup ketetanggaan (*neighborshif*). Makin intens hubungan-hubungan sosial antar tetangga, akan menunjukkan bahwa jaringan sosial antar tetangga suatu komunitas terbangun dengan baik. Sebaliknya apabila hubungan-hubungan sosial antar tetangga suatu komunitas kurang intens, maka dapat berarti bahwa jaringan

sosial antar warga pada komunitas tersebut tidak terbangun dengan baik. Terbangunnya hubungan sosial yang baik (*intens*) pada lingkup bertetangga dalam suatu komunitas menjadi modal penting dalam pelaksanaan proses pembangunan. Dalam situasi demikian, sangat memungkinkan terjadinya proses transformasi/perubahan sosial pada komunitas tersebut lebih mudah terjadi. Dalam rangka itulah maka aspek jaringan sosial antar tetangga menjadi penting dalam penelitian ini.

Perubahan jaringan sosial antar tetangga pada komunitas PBL dalam penelitian ini, antara lain dapat dilihat dari kecenderungan angka-angka pada data hasil penelitian sebagai berikut: kebiasaan warga pulau menitipkan anak saat bepergian dalam beberapa hari, Sumber bantuan yang diterima saat mengalami kesusahan hidup, usaha untuk mempererat hubungan silaturahmi dan pentingnya warga dalam suatu komunitas untuk saling kenal satu sama lainnya. Hasil studi memperlihatkan bahwa secara umum telah terjadi perubahan dalam jaringan sosial antar tetangga pada komunitas PBL. Perubahan dimaksud adalah bahwa warga yang menitipkan anaknya ke tetangga jika hendak bepergian saat ini (pasca intervensi negara), lebih sedikit dibanding pada sepuluh tahun lalu (sebelum intervensi negara). Demikian juga jika warga mengalami kesusahan dalam hidup, saat ini lebih sedikit yang mengandalkan bantuan tetangganya dibanding pada sepuluh tahun yang lalu.

Hal ini berarti bahwa sikap warga yang lebih memilih berjejaring dengan tetangganya pada sepuluh tahun lalu

kini telah bergeser yaitu lebih memilih berjejaring dengan keluarga (*family*). Kondisi ini terjadi karena kepercayaan warga kepada tetangga telah mengalami penurunan (*tergerus*). Sebaliknya warga lebih percaya kepada keluarganya (*family*). Kuatnya kepercayaan (*trust*) warga kepada keluarga dari pada tetangganya, disebabkan karena keluarga (*family*) masih ada hubungan pertalian darah yang lebih dekat, sehingga kedekatan secara emosionalnya sangat kuat, dimana hal tersebut tidak mereka peroleh dari tetangganya. Sementara jaringan bertetangga hanya merupakan hubungan emosional yang biasa saja, yang mungkin terabaikan ketika individu-individu tersebut merasa urusannya lebih penting dari pada urusan tetangganya.

Penjelasan lain untuk melihat perubahan jejaring sosial antar tetangga, adalah dengan melihat usaha warga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dalam komunitasnya. Data penelitian menunjukkan bahwa pada sepuluh tahun yang lalu (sebelum intervensi negara), usaha warga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga lebih cenderung memilih kunjungan ke rumah tetangga dibanding dengan usaha lain misalnya; suka menolong tetangga, rajin menghadiri undangan, rajin kerja bakti dan bersikap ramah. Sementara pada saat ini (pasca intervensi negara) usaha untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sudah lebih variatif lagi yaitu antara lain: melalui kunjungan ke tetangga, suka menolong tetangga dan rajin menghadiri undangan. Dengan kata lain bahwa pada sepuluh Tahun lalu (sebelum intervensi negara) usaha warga pulau untuk membangun silaturahmi masih terfokus atau lebih

didominasi pada cara-cara lama yaitu saling mengunjungi rumah. Namun saat ini usaha untuk membangun silaturahmi antar warga tersebut lebih variatif yaitu: selain saling kunjungan rumah, juga mereka rajin menghadiri undangan, suka menolong tetangga, rajin kerja bakti dan bersikap ramah.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan atau pergeseran dalam usaha membangun jaringan antar tetangga pada komunitas pulau. Berubah atau bergesernya usaha warga pulau untuk mempererat tali silaturahmi dari yang didominasi oleh kunjungan ke tetangga menjadi lebih variatif sebagaimana disebutkan di atas, berimbas pada pandangan warga akan pentingnya bagi mereka untuk saling kenal satu sama lain. Data penelitian menunjukkan bahwa pada sepuluh tahun yang lalu lebih banyak warga pulau yang menganggap bahwa usaha untuk saling kenal satu sama lain sangat penting dibanding dengan sekarang. Hal ini berarti bahwa, meskipun warga pulau menganggap usaha saling kenal antar warga masih sangat penting, namun seiring dengan proses perubahan yang terjadi pada komunitas PBL maka secara perlahan usaha tersebut telah mengalami penurunan (*tergerus*).

Menurunnya usaha untuk saling kenal antar warga pulau, disebabkan karena adanya aktivitas lain yang menyita waktu mereka. Misalnya semakin banyaknya warga yang memiliki peralatan elektronik terutama televisi. Adanya tayangan televisi menyebabkan kebutuhan masyarakat akan hiburan cukup terpenuhi meskipun hanya di rumah, sehingga mereka (terutama ibu-ibu rumah tangga) betah di rumah.

Alasan lain yang tak kalah penting adalah karena dibanding pada sepuluh tahun lalu (sebelum intervensi negara), saat ini (pasca intervensi negara) warga lebih banyak disibukkan atau tersita waktunya oleh rutinitas pekerjaan. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari perubahan orientasi mata pencaharian warga, dari nelayan subsistensi menjadi nelayan komoditas perdagangan (komersial). Prinsip komersial inilah yang menjadi pendorong utama makin cermatnya warga pulau dalam memanfaatkan waktu yang ada bagi mereka untuk kepentingan berusaha guna mendapatkan hasil tangkapan/pencarian yang lebih banyak agar dapat menambah penghasilan rumah tangga mereka.

Sebagai bagian akhir dari upaya untuk menjelaskan bagaimana perubahan kapital sosial dari aspek jaringan sosial antar tetangga. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir indeks luasan/cakupan jaringan sosial antar tetangga pada komunitas nelayan di PBL telah mengalami penurunan (*tergerus*). Sementara indeks luasan atau cakupan jaringan sosial komunitas PBL pada sepuluh tahun yang lalu lebih baik dari pada sekarang.

Penurunan indeks luasan/cakupan jaringan sosial ternyata berimplikasi pada struktur sosial masyarakat di Pulau Barrang Lompo. Data menunjukkan bahwa baik pada sepuluh tahun lalu (sebelum intervensi negara), maupun saat ini (pasca intervensi negara), secara umum tingkat luasan (cakupan) jaringan sosial antar tetangga pada komunitas PBL tinggi. Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi peningkatan indeks luasan (cakupan) jaringan sosial antar tetangga pada

komunitas itu. Peningkatan yang dimaksud yaitu bertambahnya jumlah jaringan sosial antar tetangga, misalnya makin banyaknya tetangga yang dikenal oleh warga. Dalam wawancara diketahui bahwa, diantara satu warga komunitas pulau, minimal dapat mengenal lebih dari tiga puluh orang warga lainnya yang ada dalam pulau, bahkan ada warga yang mengenal sampai ratusan warga lainnya. Suasana saling kenal tersebut didukung oleh bentuk pemukiman yang berjejar dan rapat, dimana hampir setiap rumah memiliki dipan-dipan didepannya sebagai tempat bersendagurau antar tetangga. Selain itu karena memang pulau ini tidak terlalu luas serta didukung oleh ketersediaan gang-gang antar kampung, sehingga mudah dijangkau dari sudut yang satu ke sudut yang lain meskipun hanya dengan jalan kaki. Apalagi saat ini telah tersedia moda transportasi umum/lokal (bentor) yang semakin mempermudah akses bagi warga untuk saling kunjungan dan saling kenal satu dengan lainnya.

Data di atas juga menunjukkan bahwa meningkatnya luasan (cakupan) jaringan sosial antar tetangga pada komunitas pulau tersebut terjadi pada semua strata sosial. Namun yang paling nampak (nyata) adalah pada golongan strata sosial bawah. Hal ini terjadi karena dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat golongan bawah masih tergantung pada bantuan tetangga. Sementara, pada masyarakat golongan menengah atas, cenderung lebih mandiri. Karenanya, usaha untuk memperluas jejaring sosial atau mempererat hubungan sosial antar tetangga bagi warga kelas bawah, terus mereka lakukan. Sehingga tidak mengherankan jika di antara mereka (tetangga)

hampir saling kenal satu sama lain dalam satu komunitas pulau yang memang tidak luas tersebut.

2. Jaringan Sosial antar Teman dan Keluarga

Hasil studi menunjukkan bahwa intensitas warga PBL menghubungi, bertemu dan berbicara dengan keluarga saat ini (pasca intervensi negara) lebih tinggi dibanding sebelumnya (sebelum intervensi negara). Dalam hal ini terjadi peningkatan intensitas warga menghubungi, bertemu dan berbicara dengan keluarganya. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, terjadi peningkatan kualitas interaksi antar keluarga pada komunitas PBL. Hal ini disebabkan karena semakin baiknya jalanan desa yang ditunjang oleh keberadaan sarana transportasi (*bentor*) di dalam pulau yang memudahkan warga dalam menjangkau rumahnya dan rumah warga lainnya dalam waktu singkat. Disamping itu maraknya pemakaian *handphone* (HP) terutama bagi kalangan muda-mudi turut mendukung kelancaran interaksi/hubungan antar keluarga pada komunitas PBL.

Sementara itu data menunjukkan bahwa intensitas makan bersama dengan keluarga justru mengalami penurunan (tergerus). Hal ini disebabkan karena selain warga semakin disibukkan oleh pekerjaannya, sehingga kadang-kadang mereka mengabaikan waktu makan bersama dengan keluarga. Selain itu karena adanya kesibukan lain, terutama bagi kepala keluarga misalnya pergi berkunjung ke rumah teman kerja dan tetangga sekaligus makan malam disana atau ke tempat permainan bilyar sambil bersosialisasi dengan warga lain.

Usaha untuk membangun jaringan sosial terhadap teman juga cenderung meningkat, terutama usaha menghubungi, bertemu dan berbicara dengan teman. Tingginya intensitas menghubungi, bertemu dan berbicara dengan teman (pacsu intervensi negara), menunjukkan bahwa usaha untuk membangun jaringan dalam ketetanggaan lebih tinggi dibanding sepuluh Tahun yang lalu (sebelum intervensi negara). Situasi ini terjadi karena penduduk yang masuk sebagai buruh nelayan atau pencari teripang (pattaripang) di PBL telah banyak dibanding sepuluh tahun yang lalu. Buruh-buruh tersebut pada umumnya mengontrak rumah penduduk di sekitar rumah ponggawa/juragangnya. Pada saat mereka bertamu atau sementara bekerja, misalnya; memperbaiki kapal/perahu dan saat itu jadwal makan di rumah ponggawa/juragang tiba, maka merekapun (buruh) dipanggil makan bersama. Peristiwa makan bersama antara tamu (baik buruh maupun tetangga dan pendatang baru) dengan tuan rumah khususnya ponggawa/juragang sudah mentradisi dan hingga saat ini masih dilakukan oleh warga Pulau Barrang Lompo.

Data lain yang menjelaskan jaringan sosial antar warga di PBL adalah intensitas orang yang datang (tamu) dan tempat asal tamu yang datang ke rumahnya. Data menunjukkan bahwa intensitas warga kedatangan tamu saat ini lebih tinggi dibanding sepuluh tahun yang lalu. Ini berarti bahwa telah terjadi penurunan intensitas warga kedatangan tamu ke rumahnya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Sementara asal tamu yang datang ke rumah warga tersebut masih didominasi oleh tetangga rumah, dan yang lainnya

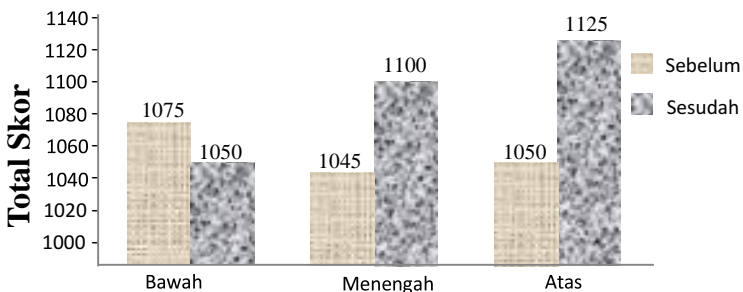
berasal dari tetangga pulau, dari Kota Makassar dan ada juga yang datang dari pulau yang jauh dari PBL itu sendiri.

Membantu sesama warga pulau merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat jaringan sosial yang telah terbangun di antara warga komunitas PBL. Hal ini dapat dijelaskan dari data penelitian sebagai berikut: saat ini warga yang sering membantu keluarga dan temannya apabila kesusahan dalam hidup, lebih sedikit dibanding pada sepuluh tahun lalu. Ini berarti bahwa kepedulian warga terhadap sesama pada masa lalu (sebelum intervensi) lebih baik dari pada sekarang (pasca intervensi). Artinya kepedulian warga terhadap sesama warga pulau telah menurun (tergerus). Tingginya kepedulian warga terhadap sesama warga pulau pada masa lalu, didasari oleh adanya kesadaran bahwa mereka merupakan satu hubungan keluarga luas (*family*). Sementara saat ini suasana kekeluargaan seperti itu sudah mulai luntur atau terkikis (tergerus). Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan orientasi berpikir warga komunitas pulau dari nelayan subsistensi ke nelayan komersial. Atas dasar itu mereka sudah sangat cermat memperhitungkan waktu mereka untuk bekerja, begitu pula dengan hasil tangkapan yang mereka hasilkan.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan kepada sesama warga pada sepuluh tahun yang lalu lebih dominan berupa bahan makanan, selebihnya berupa uang dan motivasi/-nasehat. Sementara saat ini bentuk bantuan yang diberikan lebih banyak berupa motivasi/nasehat saja daripada berupa uang atau bahan makanan. Data ini menunjukkan bahwa ada perubahan bentuk pemberian warga sebagai kepedulian

kepada sesamanya, dari bantuan yang bisa langsung dinikmati secara fisik menjadi bantuan yang sifatnya lebih rohaniah atau mental spritual. Situasi ini terjadi disamping karena adanya kemudahan memasarkan hasil komoditas, juga karena semakin naiknya harga jual komoditas hasil laut. Karena itu mereka lebih cenderung menjual hasil tangkapannya, lalu memberikan bantuannya dalam bentuk uang daripada memberikannya dalam bentuk barang kepada tetangga atau keluarga.

Aspek lain yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai perubahan jaringan sosial antar teman dan keluarga pada komunitas nelayan di Pulau Barrang Lompo (PBL) dapat dijelaskan dengan memperhatikan kecendrungan data pada posisi kualitas hubungan antar teman dan keluarga dalam komunitas. Data penelitian menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi penurunan kualitas hubungan sosial antar teman dan keluarga dalam komunitas pulau. Dimana pada sepuluh tahun yang lalu (sebelum intervensi) jaringan sosial antar teman dan keluarga lebih baik dibanding saat ini (pasca intervensi). Untuk lebih jelasnya, tingkat luasan jaringan sosial warga PBL dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.2 Tingkat Luasan Jaringan Sosial Antar Teman dan Keluarga Terkait dengan Strata Sosial.

Guna menjelaskan data pada tabel dan grafik 3.2 digunakan pengkategorian penilaian sebagai berikut; 440-734 (rendah), 735-1028 (sedang) dan 1029-1322 (tinggi).

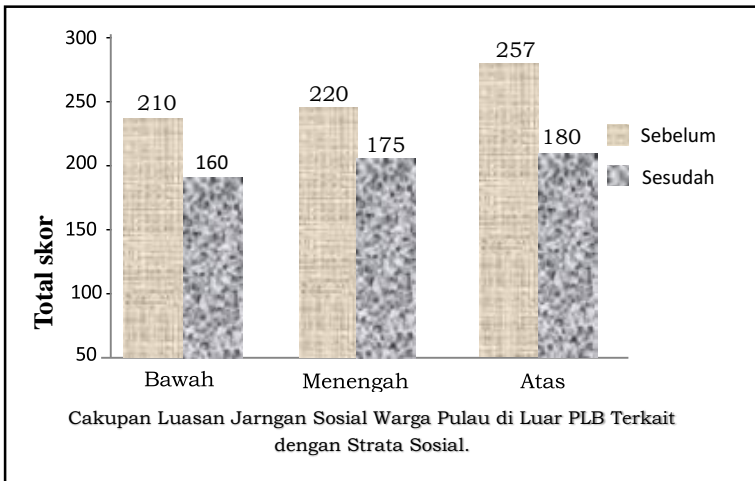
Berpatokan pada kriteria penilaian di atas, data pada Grafik 3.2 menunjukkan bahwa baik pada sepuluh tahun lalu maupun saat ini tingkat luasan (cakupan) jaringan sosial antar teman dan keluarga pada komunitas Pulau Barrang Lompo tinggi. Meskipun pada kedua periode waktu tersebut, jaringan sosial antar teman dan keluarga pada komunitas pulau PBL sama-sama tinggi. Namun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah mengalami perubahan yaitu ada yang meningkat ada juga yang menurun. Peningkatan terjadi pada strata sosial menengah dan atas, sementara pada strata sosial bawah justru mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa warga pulau yang berstrata menengah ke atas lebih luwes dan terbuka dalam berinteraksi dengan sesama warga pulau dari pada warga yang berada pada strata bawah.

3. Jaringan Sosial di Luar Komunitas PBL

Perubahan jaringan warga pulau di luar komunitasnya dapat dijelaskan dengan memperhatikan variabel antara lain: intensitas warga bekerja di luar komunitas, banyaknya teman yang bekerja diluar pulau, banyaknya warga bekerja diluar pulau dan posisi kualitas jaringan kerja di luar komunitas pulau. Data penelitian menunjukkan bahwa mobilitas sosial warga pulau saat ini jauh lebih tinggi dari pada sepuluh tahun lalu. Hal ini terlihat bahwa saat ini lebih banyak warga bekerja diluar pulau dibanding sepuluh tahun lalu. Banyaknya warga

yang bekerja di luar pulau menyebabkan mobilitas mereka keluar pulau saat ini juga lebih tinggi dibanding sepuluh tahun lalu.

Tingginya mobilitas warga keluar pulau saat ini terutama untuk bekerja, berimbas pada semakin meluasnya jaringan kerja warga dengan orang-orang yang berada di luar pulau. Data menunjukkan bahwa saat ini lebih banyak warga pulau yang memiliki teman di luar pulau dibanding pada sepuluh tahun lalu. Fakta ini diperkuat oleh data bahwa posisi kualitas jaringan sosial antar pulau saat ini lebih baik dibanding sepuluh tahun lalu. Cakupan luasan jaringan sosial warga pulau di luar PBL terkait dengan strata sosial dapat dilihat dari Grafik dibawah ini:



Guna menjelaskan data pada grafik digunakan pengkategorian penilaian sebagai berikut: 120-200 Rendah, 201-280 Sedang dan 281-360 Tinggi.

Berpatokan pada kriteria penilaian di atas, data pada Grafik 3.3 menunjukkan bahwa tingkat luasan (cakupan)

jaringan sosial komunitas Pulau Barrang Lompo di luar komunitasnya pada sepuluh tahun terakhir telah mengalami peningkatan (dari rendah menjadi sedang). Ini berarti bahwa dalam sepuluh tahun terakhir jaringan sosial warga di luar komunitas pulau bertambah. Bertambahnya jaringan sosial warga di luar komunitas pulau tersebut terjadi pada semua strata sosial, namun yang paling nyata adalah pada strata sosial atas, sementara pada strata sosial menengah dan bawah kurang nyata. Data tersebut menunjukkan bahwa warga pulau pada strata sosial atas, lebih memiliki jaringan sosial yang luas di luar komunitas pulau dari pada warga yang berada pada strata sosial menengah ke bawah. Hal ini dapat terjadi karena warga yang berstrata atas lebih memiliki akses keluar pulau karena adanya dukungan terutama dana dan fasilitas.

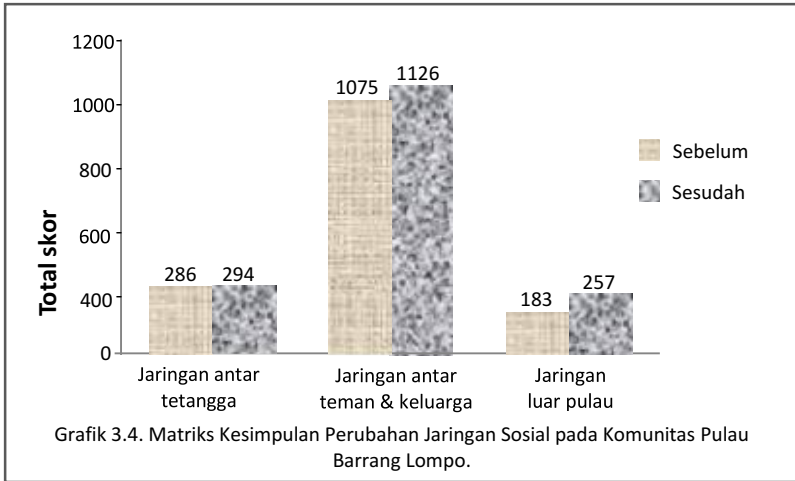
Berdasarkan sajian dan penjelasan dari keseluruhan data mengenai proses pembentukan jaringan pada komunitas Pulau Barrang Lompo dalam pokok bahasan ini, dirumuskan simpulan dengan menggunakan kriteria penilaian data sebagai berikut: jika total skor hasil hitung berada antara (680-1134) maka dikatakan jaringan sosial pada komunitas pulau menjadi sempit (berkurang). Jika total skor berada pada (1135-1588) maka dikatakan jaringan sosial pada komunitas pulau tetap, namun apabila angka total skor berada antara (1589-2042) maka dikatakan jaringan sosial yang sudah terbentuk sebelumnya pada komunitas pulau bertambah.

Hasil olahan data diperoleh total skor perubahan jaringan pada komunitas pulau saat ini yaitu (1677), sementara pada

sepuluh tahun lalu total skornya yaitu (1544). Berpatokan pada tiga pengkategorian data di atas, dapat disimpulkan bahwa pada sepuluh tahun yang lalu jaringan sosial pada komunitas Pulau Barrang Lompo secara umum skala cakupannya kurang luas. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan masyarakatnya, maka saat ini jaringan sosial pada komunitas tersebut telah mengalami perluasan cakupan (bertambah). Dengan kata lain bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jaringan sosial pada komunitas Pulau Barrang Lompo menjadi bertambah luas.

Secara rinci (per-variabel) proses perubahan jaringan sosial pada warga Pulau Barrang Lompo dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa baik pada sepuluh tahun lalu maupun saat ini jaringan sosial antar tetangga pada warga sama-sama luas cakupannya. Namun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir jaringan sosial antar tetangga pada komunitas pulau telah mengalami penguatan atau pertambahan luas cakupan dari (286) menjadi (294). Kondisi yang sama juga terjadi pada jaringan sosial antar teman dan keluarga pada komunitas pulau. Dimana selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah mengalami perluasan cakupan dari (1075) menjadi (1126). Kondisi berbeda terjadi pada perubahan jaringan sosial komunitas pulau ke luar pulau, dimana pada sepuluh tahun yang lalu cakupannya tidak luas, atau sempit (183) saja dan saat ini jaringan sosial warga diluar komunitas pulau telah mengalami peningkatan cakupan luasan mencapai (257). Perubahan angka tersebut memperlihatkan tren perluasan cakupan jaringan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun pada sepuluh

tahun lalu jaringan sosial di luar warga Pulau Barrang Lompo cakupannya masih sempit. Namun seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan masyarakat, cakupan jaringan sosial di luar pulau secara perlahan menjadi luas. Ringkasan dari kesimpulan data ini dapat dilihat pada matriks Grafik 3.4 berikut:



Intervensi negara melalui program pembangunan yang tak kalah besar dampaknya terhadap perubahan kapital sosial di PBL adalah program perbaikan atau renovasi dermaga sebagai tempat sandarnya kapal dagang, nelayan teripang dan kapal transportasi barang dan orang (jasa). Pembangunan ini meliputi dua dermaga yaitu dermaga I dan dermaga II. Pembangunan dermaga I di Pulau Barrang Lompo dilaksanakan dengan swadaya murni masyarakat pada Tahun 1950-an. Dermaga I pernah dijadikan tempat kapal Jepang berlabuh (membuang jangkar istilah komunitas PBL), sehingga itulah yang menjadi dasar pemilihan lokasi pembangunan. Setelah pembangunan dermaga I selesai

mulailah ramai perahu-perahu motor bersandar sehingga turut mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang rumahnya berdekatan dengan dermaga.

Semakin berkembangnya teknologi mesin kapal motor yang diikuti dengan semakin banyak warga pulau memiliki kapal-kapal motor, membuat suasana Dermaga I semakin ramai disandari oleh kapal dengan beragam ukuran. Beberapa Tokoh masyarakat menggalang pengumpulan dana dan partisipasi (tenaga) warga, guna membangun dermaga baru yang kemudian diberi nama Dermaga II. Sumber dana pembangunan dermaga II, berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 1970-an. Pembangunan ini dirasa perlu karena Dermaga I sudah tidak layak lagi disandari perahu/kapal mesin yang berkapasitas besar. Hal ini terjadi karena disamping kondisinya sudah rusak juga karena lokasinya yang tidak strategis dan sempit.

Keberadaan dermaga II lebih meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa dari luar pulau masuk ke Pulau Barrang Lompo begitupun sebaliknya. Secara langsung dan tidak langsung, hal tersebut berpegaruh terhadap kemajuan perekonomian warga. Pada Tahun 2012 (sampai penelitian ini selesai) Dermaga II diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) melalui program PNPM Mandiri, yakni melakukan renovasi jembatan/dermaga. Pembangunan meliputi pelebaran dan menambah panjang dermaga pelabuhan, sehingga lebih banyak kapal-kapal motor yang berlabuh dengan bobot besar dan berkapasitas 200-an penumpang.

Selain itu, penataan taman dan pintu gerbang dermaga pelabuhan turut dibangun sehingga tampak lebih indah. Peningkatan kapasitas tampung Dermaga II menyebabkan jumlah kapal-kapal yang sandar semakin meningkat dengan kapasitas dan bobot yang bervariasi, serta menambah volume bongkar muat barang, jasa dan orang. Dampak dari peningkatan perekonomian warga pulau, terlihat dari semakin banyaknya bentuk rumah warga yang sudah semi permanen dan atau permanen dengan arsitektur yang tidak kalah dengan bangunan rumah di kota. Peningkatan kesejahteraan yang ditampakkan lewat bangunan rumah secara nyata telah mempertegas stratifikasi sosial pemiliknya. Sebagaimana pada umumnya masyarakat desa termasuk pada komunitas pulau, bahwa ukuran utama untuk melihat strata sosial masyarakat adalah bagaimana kondisi dan model rumahnya. Bagi warga yang memiliki kondisi dan model rumah mewah (sesuai ukuran komunitas), tentu berada pada strata sosial atas, demikian seterusnya hingga pada warga yang berstrata sosial bawah.

Meningkatnya kesejahteraan warga pulau berimplikasi pada perubahan aspirasi dan gaya hidup. Konsekwensi lain adalah semakin tingginya hasrat warga pulau untuk berkunjung ke kota, baik karena motivasi pekerjaan, bersekolah maupun hanya sekedar jalan-jalan (rekreasi). Demikian juga semakin banyak orang yang datang ke pulau terutama yang ingin bekerja sebagai buruh nelayan teripang, mahasiswa dan peneliti yang melakukan praktek (studi lapang). Banyaknya warga luar menjadi buruh nelayan teripang dipicu oleh tingginya permintaan tenaga kerja karena harga

komoditas teripang di pasaran sangat tinggi, sehingga para pemilik kapal termasuk ponggawa dan sawi terpacu untuk meningkatkan produksinya.

Sehubungan dengan situasi tersebut, maka tidak heran jika beberapa warga pulau dapat melakukan interaksi dengan orang luar pulau. Dari interaksi itu mereka membangun jaringan sosial baik sebagai hubungan pertemanan maupun sebagai hubungan kerja.

Informasi dari informan menjelaskan bahwa dampak pasca perbaikan jembatan/dermaga adalah semakin terjalinnya hubungan atau interaksi antar warga PBL dengan orang-orang di luar pulau. Hubungan atau interaksi yang terjadi tidak hanya pada kelas sosial yang sama (antara buruh nelayan lokal dan pendatang) tetapi juga dengan kelas sosial yang berbeda (antara buruh nelayan dengan para ponggawa atau juragan yang tinggal di PBL).

Interaksi sosial yang terbangun di kalangan buruh nelayan yang melintasi wilayah pulau, telah membangun atau menjadi penyambung talian persahabatan/persaudaraan yang makin lama semakin kuat, sehingga tercipta solidaritas sosial diantara mereka (*bridging social capital*). Sedangkan interaksi sosial yang terbangun antara buruh nelayan dengan para juragan dan ponggawanya yang melintasi wilayah geografis dan tingkatan strata sosial, menumbuhkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan (*linking social capital*). Interaksi sosial tersebut tetap terpelihara dan terus terbangun pada kedua belah pihak, meskipun hubungan kerja diantara keduanya sudah tidak terjadi lagi (putus kontrak). Sebagai rangkuman dari perubahan jaringan

sosial pada komunitas nelayan PBL dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 3.2.
Perubahan Jaringan Sosial (*Natworking*)

Strata Sosial	Perubahan Jaringan (<i>Networking</i>) pada Komunitas PBL Terkait dengan Strata Sosial.	
	Dulu (Sebelum)	Sekarang (Setelah)
Lapisan Bawah	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jaringan sosial antar tetangga baik. ○ Jaringan sosial antar teman dan keluarga baik. ○ Jaringan sosial di luar pulau kurang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jaringan sosial antar tetangga sangat baik (sangat meningkat). ○ Jaringan sosial antar teman dan keluarga buruk (turun). ○ Jaringan sosial di luar pulau makin baik (meningkat).
Lapisan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jaringan sosial antar tetangga baik. ○ Jaringan sosial antar teman dan keluarga kuat. ○ Jaringan sosial di luar pulau kurang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jaringan sosial antar tetangga tambah baik (meningkat). ○ Jaringan sosial antar teman dan keluarga tambah kuat (meningkat). ○ Jaringan sosial di luar pulau makin baik (meningkat).
Lapisan Atas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jaringan sosial antar tetangga baik. ○ Jaringan sosial antar teman dan keluarga baik. ○ Jaringan sosial di luar pulau kurang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jaringan sosial antar tetangga tambah baik (meningkat). ○ Jaringan sosial antar teman dan keluarga tambah baik (meningkat). ○ Jaringan sosial di luar pulau sangat baik (sangat meningkat).

Orang tokoh-tokoh selama ini sudah tidak dapat lagi dijadikan panutan, karena tokoh-tokoh masyarakat lebih sibuk dengan urusan sendiri dari pada berusaha memberi perlindungan (mengadvokasi) anggota masyarakat yang mengalami permasalahan. (hasil penelitian lapangan Sakaria S Anwar).

Bab 4

Dampak Penetrasi Pasar terhadap Perubahan Kapital Sosial pada Komunitas Nelayan Pulau-Pulau Kecil

Secara umum, dipahami bahwa sejak orde baru berkuasa, intervensi negara melalui berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial dan politik telah terjadi dan hingga saat ini meningkat secara meluas menjangkau wilayah terpencil sekalipun. Situasi tersebut diikuti pula oleh penetrasi pasar sebagai konsekwensi dari perubahan masyarakat karena adanya program-program pembangunan tersebut. Penetrasi pasar dapat menerobos sampai ke wilayah-wilayah terpencil misalnya, pada komunitas nelayan pulau-

pulau kecil. Pada satu sisi penetrasi pasar telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, pada sisi lain juga telah menggerus nilai-nilai atau kearifan lokal (kapital sosial) yang selama ini menjadi kekuatan komunitas agar tetap eksis. Apa dan bagaimana proses penggerusan itu terjadi pada komunitas nelayan pulau-pulau kecil? Untuk itu pada bab ini akan diuraikan secara berurut:

A. Tergerusnya Kepercayaan (*Trust*) Komunitas PBL Kepada Pengusaha Lokal.

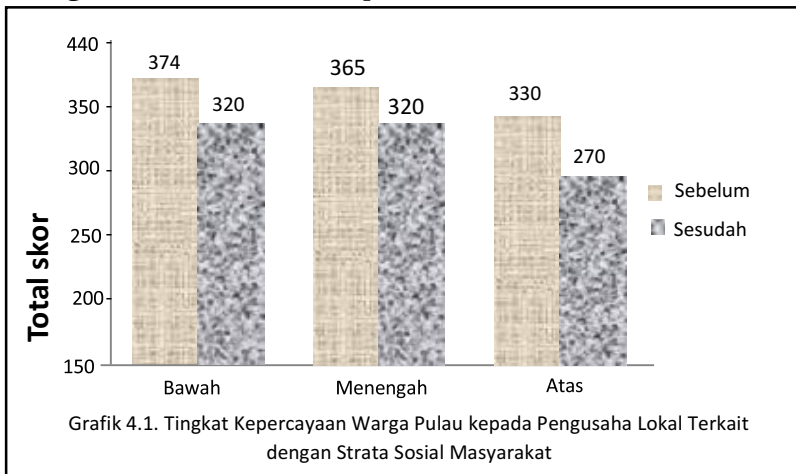
Pengusaha merupakan golongan yang sangat memegang peran penting dalam kemajuan masyarakat. Mereka merupakan kelompok elit yang atas inisiatif dan tindakannya, sehingga terjadi perubahan (*agen of change*) dalam masyarakat. Bahkan tidak sedikit para ahli pembangunan yang sering mengkaitkan keberadaan golongan elit ini dengan kemajuan suatu wilayah, negara ataupun suatu bangsa. Demikian halnya dengan keberadaan para pengusaha (juragan) di PBL. Selama ini, para pengusaha telah banyak memberi sumbangsi yang sangat besar dalam memajukan perekonomian di wilayahnya. Namun pada sisi lain mereka juga telah meruntuhkan kepercayaan (*trust*) warga komunitas PBL yang telah tertanam sejak lama. Kepercayaan dimaksud anantara lain adalah kejujuran dalam kerjasama dengan para buruh atau anak buah kapal, misalnya dalam sistem pembagian hasil. Kalau dulu para pengusaha (juragan) masih jujur dalam melakukan pembagian hasil tangkapan, namun setelah masuknya penetrasi pasar, mereka (para pengusaha) atau juragan sudah tidak jujur

lagi. Kepercayaan (*trust*) yang begitu lama disematkan kepada mereka turun temurun secara perlahan melemah atau turun akibat perubahan perilaku terutama terkait dengan pekerjaan sebagai pelaut dan pengusaha (juragan). Data dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa saat ini (pasca penetrasi pasar), warga pulau sudah kurang percaya lagi kepada pengusaha lokal (juragan) dibanding sepuluh tahun yang lalu (sebelum penetrasi pasar). Dengan kata lain bahwa selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, kepercayaan (*trust*) warga kepada pengusaha lokal (juragan) telah mengalami penurunan (tergerus).

Penurunan (tergerusnya) kepercayaan (*trust*) warga Pulau Barrang Lompo (PBL) terhadap para pengusaha lokal, disebabkan karena para pengusaha lokal khususnya yang bergerak dalam usaha pencarian teripang, sering kali tidak jujur (curang) dalam menghitung hasil pencarian bersama. Hal ini kemudian berimbas pada terjadinya manipulasi dalam pembagian keuntungan (hasil). Oleh komunitas pulau, perilaku ketidakjujuran atau curang dalam pembagian hasil pencarian tersebut mereka sebut dengan istilah “*nalukkaki kalenna*”, artinya mencuri miliknya (hasil usahanya) sendiri. Maknanya adalah para pengusaha teripang selalu berusaha untuk berlaku tidak jujur dalam menentukan pembagian hasil tangkapan/pencarian. Sehingga para buruh nelayan merasa di rugikan. Meskipun demikian mereka (buruh) tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk melakukan perlawanan secara nyata. Karena mereka takut menerima resiko atas sikap perlawanannya itu. Misalnya, adanya sanksi pengurangan bonus atau tidak mendapatkan bonus dan

bahkan sampai tingkat pemecatan sebagai karyawan/buruh dari ponggawa/juragannya. Kondisi yang dialami para buruh tersebut, benar-benar dirasakan sebagai hal yang merugikan bagi mereka. Namun demi menjaga kelangsungan hidupnya, maka kondisi tersebut dengan terpaksa harus mereka terima yang penting bisa makan bersama keluarga (*safety first*). Sebagai upaya buat menambah pendapatan di kapal, para buruh memanfaatkan waktu senggang mereka untuk memancing ikan. Hasil pancingan yang dilakukan buruh tersebut, dijadikan ikan asin lalu dijualnya setelah tiba di darat kepada para pedagang yang sudah siap membelinya. Dimana hasil tersebut tidak termasuk sebagai hasil tangkapan bersama dengan ponggawa, sehingga tidak dihitung ke dalam sistem pembagian hasil tangkapan.

Tergerusnya kepercayaan (*trust*) warga kepada pengusaha lokal, berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat PBL sebagaimana terlihat data pada Grafik 4.1 berikut:



Guna menjelaskan data pada Grafik 4.1 digunakan pengkategorian penilaian sebagai berikut: 160-267 Rendah, 268-374 Sedang dan 375-481 Tinggi.

Berpatokan pada kriteria penilaian di atas. Data pada grafik 4.1 menunjukkan bahwa, tingkat kepercayaan warga pulau kepada pengusaha lokal baik sebelum penetrasi pasar (sepuluh tahun lalu), maupun pasca penetrasi pasar (saat ini) berada pada posisi sedang. Namun dalam kurung waktu sepuluh tahun terakhir kepercayaan (*trust*) warga kepada pengusaha lokal sebagaimana dimaksud telah mengalami penurunan (tergerus). Kondisi tersebut terjadi pada semua strata sosial masyarakat, dan yang paling nyata terjadi pada kelompok masyarakat yang berstrata sosial rendah (bawah). Hal ini disebabkan karena golongan yang berstrata sosial bawah lebih sensitif dan rentan terhadap perubahan dibanding masyarakat yang berstrata sosial menengah dan atas.

Fakta di atas menunjukkan bahwa setelah penetrasi pasar, telah terjadi ketidakadilan hubungan kerja antara juragan/ponggawa dengan buruh (sawi). Dalam hal ini buruh berada pada posisi yang lemah (tersubordinasi). Situasi tersebut dikatakan oleh Gramsci bahwa, kelas penguasa (pengusaha) menghegemoni atau mendominasi kelas bawah (buruh/sawi). Sementara Marx menyatakan bahwa terjadi eksploitasi buruh nelayan (proletar) oleh ponggawa/juragan atau pemilik modal (borjouasi). Kondisi ini terjadi karena para buruh berada pada posisi tawar yang rendah, sebagai dampak dari melimpahnya persediaan tenaga kerja (buruh) yang didatangkan dari luar pulau yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu,

ketika itu para ponggawa/juragan tidak berani melakukan hal-hal yang merugikan pihak buruh misalnya; manipulasi (curang) dalam pembagian hasil, karena pada masa itu para pengusaha memang sangat membutuhkan tenaga kerja untuk meningkatkan produksinya, sementara stok tenaga kerja (buruh) sangat terbatas.

B. Pergeseran dan Tergerusnya Nilai/Norma pada Komunitas Nelayan

Nilai dipahami sebagai gagasan mengenai apakah suatu pengalaman berarti, berharga, bernilai dan pantas atau malah tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai dan tidak pantas. Nilai berkaitan dengan ide yang dimiliki secara bersama, tentang sesuatu yang baik atau buruk dan diharapkan atau tidak diharapkan (William, 1970 dikutip Damsar, 2009). Misalnya, mendengar musik dangdut bukan menjadi persoalan benar atau salah secara moral. Namun bagi orang tertentu mendengar alunan musik dangdut merupakan pengalaman yang berharga. Sedangkan bagi orang lain, bisa saja menjadi sesuatu yang memuakkan dan dipandang cengeng. Banyak nilai-nilai yang dapat menjadi sumber komunitas sosial, namun dari sekian banyak sumber komunitas sosial yang relepan dalam studi ini, hanya beberapa yang dimasukkan antara lain: nilai hidup dan kehidupan, resiprositas, partisipasi sosial dan toleransi.

1. Pergeseran Nilai Hidup pada Komunitas Nelayan PBL

Nilai merupakan bagian yang tak terpisahkan atas tumbuh kembangnya suatu komunitas, bahkan menjadi jatidiri komunitas bersangkutan. Oleh karena itu setiap

masyarakat memiliki suatu persepsi atau pandangan tentang apa yang mereka anggap berharga, dihormati atau baik bagi mereka dalam kehidupannya maupun masyarakat. Sesuatu yang berharga atau dihormati dalam kehidupan bermasyarakat oleh Selo Soemardjan (1989) disebut bahwa, nilai yang dianut oleh suatu komunitas belum tentu sama bahkan lebih banyak berbeda dari pada kesamaannya dengan komunitas yang lain. Apalagi pada suatu komunitas yang terisolir, misalnya terisolir oleh daratan, pegunungan, sungai maupun lautan, tentu perbedaannya lebih kental lagi. Karenanya nilai yang dianut pada suatu masyarakat atau komunitas, dapat menjadi kekhasan bagi masyarakat atau komunitas bersangkutan. Dimana nilai yang dianut tersebut, terus dipelihara secara turun-temurun sampai menjadi tradisi setempat dan dari tradisi akhirnya membudaya (customs).

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana nilai yang dianut pada komunitas pulau-pulau kecil melalui variabel antara lain: sikap saling menghargai dan faktor yang menjadi penyebab orang dihargai oleh warga lainnya. Data penelitian menunjukkan bahwa meskipun sikap saling menghargai antar warga pulau pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar), maupun saat ini (pasca penetrasi pasar) sama-sama tinggi. Namun pada saat sebelum penetrasi pasar kondisinya masih lebih baik dari pada setelah penetrasi pasar. Dengan kata lain bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sikap saling menghargai antar warga PBL telah menurun (tergerus).

Menurunnya sikap saling menghargai antar warga pada komunitas PBL, terutama disebabkan oleh perubahan

orientasi hidup mereka. Misalnya, kehidupan rumah tangga yang lebih baik adalah jika sebuah keluarga memiliki rumah yang bagus dan perabotan rumah tangga yang mewah. Akibatnya warga berusaha, bahkan terkesan bersaing untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut. Atas usaha pemenuhan kebutuhan, warga pulau terkadang sudah kurang memperhatikan aspek tata krama dalam bermasyarakat, misalnya sikap saling menghargai antar warga terkadang kurang diindahkan lagi. Perubahan orientasi hidup tersebut didorong oleh keberadaan para pedagang yang memberi kemudahan kepada warga pulau untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya menawarkan harga barang dengan cara dikredit (oleh warga setempat disebut *paccicili*). Kemudahan yang ditawarkan oleh para pedagang "*paccicili*" tersebut disambut baik oleh warga. Kondisi tersebut merupakan manipulasi dari proses perubahan yang sedang terjadi dalam komunitas PBL, bahwa penetrasi pasar telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Adanya atau terbentuknya sikap saling menghargai antar warga PBL baik pada sepuluh tahun lalu maupun saat ini pada umumnya didasari karena adanya faktor yang dimiliki bersama oleh warga bersangkutan antara lain; faktor kekayaan, kejujuran, keberanian, kebaikan, kesholehan, keturunan dan kepandaianya. Meskipun demikian setelah penetrasi pasar kekayaan dan kepandaian (pendidikan) merupakan dua faktor yang paling dominan mendasari seseorang dihargai dalam masyarakat. Ini berarti bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, bahwa faktor kejujuran, keberanian, kesholehan, kebaikan dan keturunan

tidak lagi menjadi prioritas utama bagi seseorang untuk menghargai orang lain, melainkan lebih kepada faktor kekayaan dan kepandaianya saja. Dengan kata lain sikap saling menghargai antar warga PBL telah bergeser dari yang didasarkan pada faktor yang berorientasi sosial berubah menjadi faktor yang lebih berorientasi ekonomi.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan alasan atau faktor yang mendasari mengapa seseorang itu dihargai atau mengapa seseorang menghargai orang lain. Sebelum penetrasi pasar (sepuluh tahun yang lalu) faktor paling dominan yang mendasari atau mendorong seseorang menghargai orang lain disebabkan karena keberanian dan kejujurannya. Sementara saat ini (pasca penetrasi pasar) alasan paling dominan yang mendasari atau mendorong seseorang untuk menghargai orang lain yaitu karena yang bersangkutan memiliki kekayaan dan kepandaian (pendidikan) dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan (pergeseran) nilai hidup pada komunitas PBL. Jika pada sepuluh tahun yang lalu (sebelum penetrasi pasar) keberanian masih menjadi alasan utama agar seseorang dihargai/menghargai orang lain dalam masyarakat namun sekarang (pasca penetrasi pasar) hal itu telah bergeser. Seseorang menghargai atau dihargai orang lain karena atas dasar kekayaannya. Meskipun demikian kejujuran masih menjadi faktor utama seseorang agar dihargai dalam masyarakat baik sebelum penetrasi pasar (masa lalu) maupun pasca penetrasi pasar (saat ini). Hal ini berarti bahwa kejujuran merupakan nilai hidup yang terus dipertahankan oleh komunitas PBL hingga saat ini.

Sementara keberanian, sudah tidak lagi menjadi nilai utama bagi mereka dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan hadirnya faktor kekayaan sebagai alasan utama untuk menghargai atau dihargai orang lain merupakan nilai lama yang baru ramai dipraktikkan oleh mereka (warga) PBL pasca penetrasi pasar. Fakta-fakta di atas menjadi indikasi bahwa komunitas PBL telah dilanda oleh semangat materi-alisme, sebagaimana telah di bahas pada bagian lain dari tulisan ini.

Wawancara dari informan semakin menegaskan bahwa; meskipun pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar), komunitas PBL sangat menghargai satu sama lain. Namun saat ini (pasca penetrasi pasar), sikap saling menghargai tersebut secara perlahan telah mengalami pergeseran. Pergeseran dimaksud, yaitu dari nilai yang lebih berorientasi sosial (motivasi sosial) ke nilai yang lebih berorientasi ekonomis (motivasi ekonomi).

Adapun perubahan dalam pencapaian hidup bagi komunitas PBL, data penelitian menunjukkan bahwa pencapaian segi ekonomi warga pulau dalam kehidupan saat ini (pasca penetrasi pasar), telah mengalami peningkatan dibanding pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasara). Meskipun terjadi peningkatan kehidupan sebagaimana di sebutkan di atas, akan tetapi warga pulau masih merasa kurang bahagia atas pencapaian hidup yang mereka alami, baik pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar) maupun saat ini (pasca penetrasi pasar). Data dari penelitian yang telah dilakukn tersebut dapat berarti bahwa, meskipun saat ini telah terjadi perbaikan dan kehidupan warga pulau

telah meningkat, namun kondisi tersebut belum membuat mereka merasakan kebahagiaan dalam hidupnya.

Fakta dari hasil penelitian mengatakan bahwa, masih adanya perasaan kurang bahagia bagi warga PBL yang disebabkan karena seringnya terjadi perpisahan antar anggota keluarga (antara ayah dengan ibu dan anak-anaknya). Perpisahan tersebut terjadi pada saat musim melaut tiba, dengan jangka waktu minimal seminggu bahkan hingga mencapai tiga bulan lamanya. Dengan kata lain bahwa kebahagiaan hidup bagi warga pulau tidak saja diukur dengan materi semata, namun kumpul bersama keluarga merupakan bagian dari kebahagiaan. Meskipun demikian, hidup terpisah antar anggota keluarga merupakan bagian dari resiko hidup yang harus ditempuh oleh mereka sebagai komunitas nelayan di pulau-pulau kecil seperti di PBL.

2. Tergerusnya Prinsip Resiprositas pada Komunitas Nelayan PBL

Resiprositas menunjuk pada gerakan diantara individu-individu, atau antar kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Gerakan yang dimaksud dapat terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antar kelompok-kelompok sering dilakukan. Hubungan simetris terjadi jika hubungan antara berbagai pihak memiliki posisi dan peranan yang relatif sama dalam suatu proses pertukaran kehidupan bermasyarakat. Seperti yang ditunjukkan oleh komunitas nelayan pulau-pulau kecil, misalnya komunitas PBL. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana perubahan resiprositas terjadi pada komunitas PBL, melalui

variabel antara lain; intensitas saling membantu, dan intensitas saling memberi makanan kepada tetangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas saling membantu dan saling memberi bantuan makanan antar warga pulau dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah mengalami penurunan (tergerus). Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, bahwa baik sebelum penetrasi pasar (sepuluh tahun yang lalu) maupun pasca penetrasi pasar (sekarang). Intensitas saling membantu antar warga terutama jika ada musibah masih sering terjadi, namun telah mengalami penurunan (tergerus). Demikian juga usaha warga untuk saling memberi bantuan makanan, pada sepuluh tahun yang lalu (sebelum penetrasi pasar) lebih baik dari pada saat ini (pasca penetrasi pasar).

Kondisi tersebut dipertegas oleh data pada posisi indeks kualitas resiprositas yang terjadi antar warga pulau. Pada sepuluh tahun yang lalu indeks kualitas resiprositas antar warga pulau lebih baik dari pada saat ini. Ini berarti bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir kadar resiprositas antar warga telah mengalami penyusutan (tergerus) seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan jaman. Tergerusnya prinsip resiprositas pada komunitas PBL sebagai dampak dari adanya penetrasi pasar yang menerobos masuk pada komunitas PBL, sebagaimana dapat dijelaskan pada dua pokok persoalan berikut yaitu: 1). Derasnya arus barang, orang dan jasa masuk ke PBL dan 2). Bagaimana komunitas pulau menjadikan pasar sebagai bagian penting dalam sistem sosial dan budayanya. Dalam hal ini masyarakat menempatkan uang sebagai sumber mutlak dalam menjalani

kehidupan sehari-hari (monetisasi). Artinya masyarakat atau komunitas pulau telah menjadikan hasil tangkapan atau pencarian mereka sebagai barang komoditas perdagangan (komersialisasi).

a. Derasnya Aliran Barang, Orang dan Jasa Masuk ke Komunitas PBL

Pasca perbaikan jembatan dan dermaga pelabuhan. Secara otomatis meningkatkan jumlah dan besarnya kapasitas kapal-kapal yang sandar di dermaga. Hal ini kemudian berimplikasi pada peningkatan volume bongkar muat barang dan jasa termasuk keluar–masuknya orang ke PBL. Kondisi tersebut membawa pengaruh tersendiri terhadap perilaku konsumtif warga pulau terutama pada peningkatan hasrat pemilikan produk-produk industry, misalnya barang elektronik seperti HP, TV, VCD dan komputer serta perabotan rumah tangga. Pada tahap inilah penetrasi pasar mulai terlihat pada komunitas PBL.

Selain itu karena semakin lancarnya arus penyeberangan ke pulau, membuat para nelayan dapat langsung menjual hasil tangkapannya ke Makassar, Maros dan Pangkep, walau tetap tergantung pada kesepakatan antara ponggawa dan sawi termasuk dengan mandor. Hal ini kemudian menyebabkan para nelayan sangat jarang atau bahkan tidak lagi memasarkan hasil tangkapannya di pulau tempat tinggal mereka. Hal ini terjadi karena di pulau tempat mereka tinggal, selain harganya yang tidak tinggi dan konsumennya sangat terbatas juga karena sudah terbangun kesepakatan antara pemodal dengan ponggawa kapal, bahwa hasil tangkapan

akan di pasarkan di Makassar, Maros atau Pangkep tergantung kesepakatan atau dimana keinginan para pengusaha (pemodal) atau dimana para juragang/pengusaha berdomisili. Sebab ketika para nelayan membongkar hasil tangkapannya disana juga hadir juragang atau pengusaha (pemodal) memantau hasil tangkapan nelayan (buruh) yang telah mereka modali tersebut. Bahkan tidak jarang para pemodal itu sendiri yang langsung menghitung hasil tangkapan para nelayan.

Kuatnya pengaruh hasrat kepemilikan barang industri tersebut, serta semakin mudahnya pemasaran hasil tangkapan telah membangun pola pikir komunitas pulau, mengenai pentingnya nilai uang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada berkembangnya jasa perdagangan lokal. Situasi ini ditandai dengan semakin banyak dan bervariasinya pedagang-pedagang gerobak yang menjajakan kebutuhan pokok masyarakat. Barang-barang kebutuhan dapur yang di jajakan antara lain ikan, bumbu dapur misalnya garam, cabe, asam cuka, kunyit, bawang dan sayuran. Disamping itu ada juga yang khusus menjajakan buah-buahan dan kue penganan khas pulau. Kue penganan dijajakan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan berjalan dari rumah-rumah penduduk melewati gang-gang sempit hingga menjangkau keseluruhan wilayah pulau. Para ibu-ibu tersebut berangkat berjualan dari pagi buta hingga maksimal jam 8 pagi dan pada umumnya habis terjual. Keberadaan pedagang gerobak dorong (*pa'lili*), membuat warga semakin dimanjakan dalam hal ketersediaan kebutuhan dapurnya hingga ke pintu rumah mereka. Hal ini kemudian berdampak pada melemahnya prinsip saling

pinjam atau meminta kekurangan kebutuhan bumbu dapur ke tetangga. Fakta ini menunjukkan bahwa masuknya penetrasi pasar di PBL telah menyebabkan prinsip saling tukar dan berbagi (resiprositas) kebutuhan (makanan) di kalangan warga PBL telah tergerus.

b. Komersialisasi Pada Komunitas PBL

Pasca perbaikan jalan dan jembatan serta dermaga pelabuhan, semakin memperjelas bagaimana kuatnya penetrasi pasar di Pulau Barrang Lompo yang dicirikan antara lain, semakin cermatnya nelayan memperhitungkan hasil pencarian/tangkapannya sebagai komoditas perdagangan (komersialisasi hasil laut). Setiap pulang melaut (menangkap ikan/mencari teripang), para nelayan langsung menjual hasil tangkapannya ke luar pulau sehingga sudah jarang terjadi adanya pembagian ikan ke tetangga meskipun hasil tangkapan melimpah. Dengan kata lain penetrasi pasar berupa sikap terhadap hasil pencarian/tangkapan sebagai barang komoditas perdagangan (monetisasi) atau komersialisasi hasil laut yang menggiurkan, telah merubah pandangan masyarakat mengenai pentingnya nilai uang. Pada tahap ini, telah terjadi perubahan rasionalitas sosial warga pulau yang semula berlandaskan pada norma-norma sosial, adat istiadat dan tradisi menjadi rasionalitas ekonomik yang berlandaskan pada pemikiran rasional pragmatis. Sebagai contoh sifat kikir pada masyarakat penganut rasionalitas sosial dianggap perilaku menyimpang (tidak logis/rasional dan tidak umum). Tetapi pada masyarakat penganut rasionalitas ekonomik kikir adalah

prilaku yang logis (terpuji), sebab kikir adalah prilaku hemat. Demikian pula prilaku warga yang membagikan ikan kepada warga lainnya jika tangkapannya melimpah merupakan perbuatan yang terpuji dan bernilai ibadah bagi penganut rasionalitas sosial. Akan tetapi oleh penganut rasionalitas ekonomik dianggap sebagai prilaku yang tidak menguntungkan dan cenderung pemborosan.

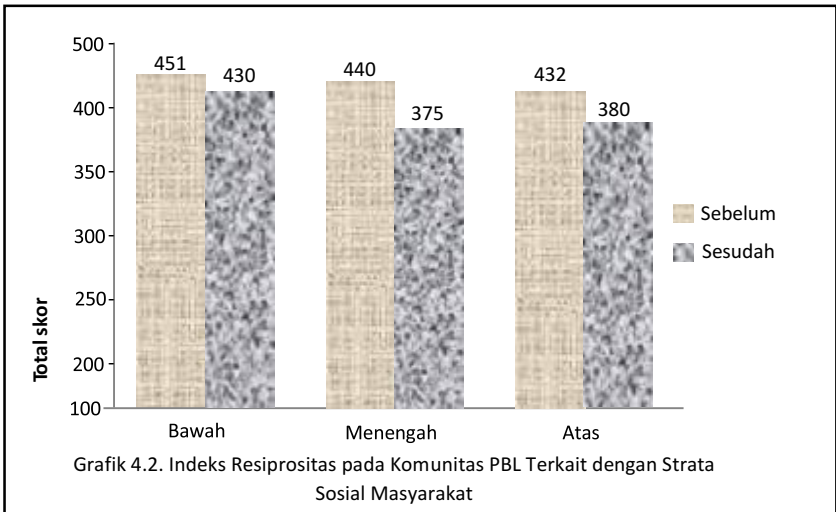
Perubahan tersebut menyebabkan prinsip berbagi (resiprositas) di kalangan warga sudah mulai luntur (tergerus), karena semua hasil pencarian atau tangkapan sudah diperhitungkan sebagai barang komoditas perdagangan (komersial). Jika harga ikan sedang tinggi, tidak jarang para nelayan penangkap ikan beserta ponggawanya menjual semua hasil tangkapannya dan tidak untuk konsumsi keluarga. Tetapi mereka akan menyisihkan hasil tangkapan ikan jika ada tamu yang berkunjung ke rumah mereka. Perubahan yang terjadi pada komunitas nelayan PBL menunjukkan bahwa, telah terjadi perubahan orientasi berpikir bagi warga dari rasionalitas sosial ke rasionalitas ekonomik.

Perilaku komersialisasi hasil tangkapan/pencarian telah berdampak pada ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pembagian hasil antara ponggawa dan juragan. Ungkapan salah seorang informan tentang fenomena ini adalah sebagai berikut:

Dulu kita (nelayan atau sawi) sangat senang ikut melaut karena ponggawa dan juragang sangat jujur dalam melakukan pembagian hasil malah kita sering mendapatkan bonus. Tapi sekarang para ponggawa dan juragang kadang-

kadang curang dan tidak adil dalam melakukan pembagian hasil, termasuk dalam memperhitungkan modal awal ketika akan berangkat. Makanya hasil pembagian yang kita dapatkan sekarang sering tidak mencukupi untuk membayar utang. Untuk itu ketika melaut kami biasanya memancing ikan (sebagai pekerjaan tambahan) lalu dijemur (diasinkan) setelah sampai di darat kemudian dijual ke pedagang (yang memang sudah siap menunggu) untuk menambah pendapatan” (Wawancara, 10/9/2012).

Sikap berbagi (resiprositas) dikalangan warga pulau sudah tergerus, namun masih tetap ada pada hari-hari/-situasi dalam acara yang berbeda. Seperti beberapa kasus yang pernah terjadi misalnya, pada saat menjelang bulan puasa, maka warga yang sukses ekonominya mengadakan acara makan bersama dengan mengundang kerabat dan tetangga. Pada saat menjelang lebaran mereka juga membagi-bagikan uang kepada para pekerjanya (sawi) dan para tetangga, tergantung besarnya hasil yang didapatkan pada tahun itu. Tergerusnya prinsip resiprositas pada komunitas nelayan Pulau Barrang Lompo berdampak terhadap struktur sosial masyarakatnya sebagaimana terlihat data pada Grafik 4.2. sebagai berikut:



Guna menjelaskan data pada Grafik 4.2 digunakan pengkategorian penilaian sebagai berikut: 120-200 Rendah/-buruk, 201-280 Sedang/biasa aja dan 281-360 Tinggi/baik.

Berpatokan pada kriteria penilaian di atas. Data grafik 4.2 menunjukkan bahwa, tingkat resiprositas komunitas PBL pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar) maupun saat ini (pasca penetrasi pasar) meskipun sama-sama tinggi, namun selama sepuluh tahun terakhir tingkat resiprositas pada komunitas pulau tersebut telah mengalami penurunan (tergerus). Penurunan (tergerusnya) tingkat resiprositas itu terjadi pada semua strata sosial masyarakat. Namun penurunan yang paling nyata terjadi pada strata sosial menengah atas, sementara pada strata sosial bawah kurang nyata. Hal ini disebabkan karena pada masyarakat kelas menengah atas pada umumnya lebih mengandalkan hitungan-hitungan ekonomi (rasioalitas ekonomik) dalam berinteraksi dengan sesama warga dari pada rasionalitas

sosial. Namun sebaliknya pada masyarakat kelas bawah, lebih mengandalkan hubungan personal yang terbangun atas dasar pertimbangan senasib sepenanggungan (rasionalitas sosial). Mereka (kelas atas) lebih mengandalkan semangat kemandirian (individualistik) dan sangat cepat menerima pengaruh/inovasi baru termasuk prinsip-prinsip dalam hidup. Penerimaan terhadap pengaruh/inovasi baru menunjukkan bahwa masyarakat kelas atas di PBL lebih terbuka dari pada masyarakat kelas menengah bawah.

3. Tergerus dan Bertambahnya Partisipasi Sosial pada Komunitas Nelayan PBL

Partisipasi sosial pada umumnya diartikan sebagai turut sertanya setiap warga sebagai anggota masyarakat dalam berbagai aktivitas kehidupan bersama (proses pembangunan) dalam suatu komunitas. Keterlibatan atau turut sertanya setiap anggota masyarakat dalam proses pembangunan sangat menentukan keberhasilan proses pembangunan yang telah dicanangkan. Tanpa partisipasi yang kuat dari warga, maka proses pembangunan yang sedang berjalan dalam suatu komunitas niscaya tidak akan mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu partisipasi sosial setiap warga komunitas dalam proses pembangunan menjadi suatu kekuatan yang harus terus dibina dan ditingkatkan kualitasnya.

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana perubahan partisipasi sosial sebagai salah satu dimensi kapital sosial dari komunitas pulau dalam proses pembangunan, melalui dua sub pokok bahasan yaitu: partisipasi warga

di dalam komunitas pulau dan partisipasi warga di luar komunitas pulau.

a. Tergerusnya Partisipasi Sosial Warga di dalam Komunitas PBL

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana perubahan partisipasi sosial sebagai salah satu dimensi kapital sosial pada komunitas pulau dalam proses pembangunan, melalui beberapa variabel antara lain: intensitas warga menghadiri undangan, keaktifan warga sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) dan intensitas keterlibatan warga dalam organisasi kemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan warga sebagai pengurus dan sekaligus aktif mengikuti organisasi kemasyarakatan saat ini (pasca intervensi negara) lebih rendah dari pada sepuluh tahun lalu (sebelum intervensi negara).

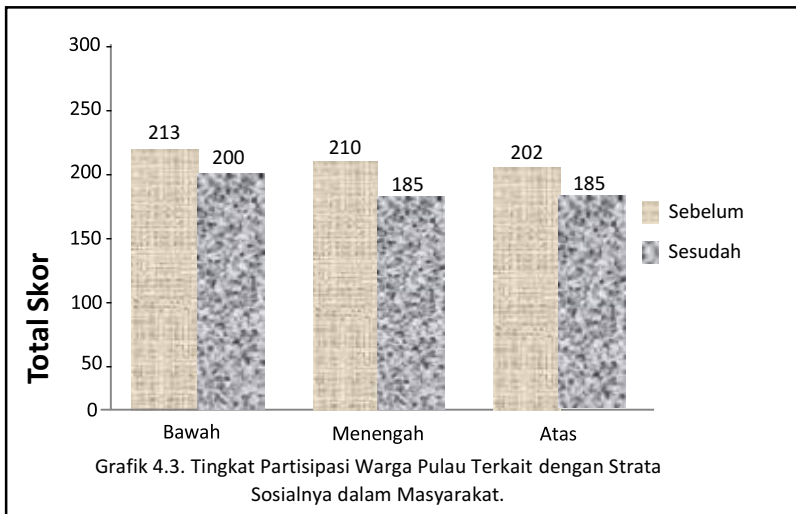
Kondisi atau fakta yang ditunjukkan dari data yang telah dikumpulkan, mengindikasikan bahwa partisipasi warga berupa keterlibatan dalam kegiatan maupun sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan dalam komunitas PBL telah tergerus. Hal ini terjadi karena saat ini (pasca penetrasi pasar) warga lebih memilih aktivitas yang lebih produktif misalnya bekerja sebagai nelayan atau jadi buruh nelayan dari pada terlibat dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan yang menurut mereka tidak jelas tujuannya. Tersedianya lapangan kerja yang luas bagi warga pulau sebagai akibat dari penetrasi pasar, berupa tingginya harga hasil laut misalnya teripang. Akibatnya para pemilik modal/-

kapal berlomba-lomba meningkatkan produksi tangkapan. Untuk itu mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja baik sebagai buruh nelayan (sawi) maupun sebagai ponggawa kapal (juragang kapal). Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh warga pulau dan bahkan tidak sedikit warga luar pulau (pendatang) yang menjadi tenaga kerja di pulau ini.

Masuknya tenaga kerja dari luar pulau pada satu sisi sangat membantu kalangan pengusaha (pemiliki modal) untuk meningkatkan produksinya dan bahkan makin menambah keramaian pulau. Namun pada sisi yang lain telah menimbulkan persaingan tenaga kerja dengan penduduk setempat, yang mana dari persaingan tersebut justru menguntungkan bagi kalangan pemodal (juragang). Hal lain yang terjadi dengan kehadiran tenaga kerja dari luar pulau, adalah terbukanya peluang kerja baru bagi warga PBL yaitu penyewaan rumah tinggal (kost). Karena pada umumnya, tenaga kerja dari luar tinggal di Pulau Barrang Lompo, minimal enam bulan (satu musim tangkapan) dan bahkan hingga tahunan. Namun ada juga yang tinggal serumah dengan juragangnya. Karena begitu lamanya waktu bagi para pekerja pendatang tinggal di PBL maka secara perlahan terjadi pertukaran budaya diantara mereka bahkan ada yang menikah dengan penduduk setempat, sehingga hubungan kekerabatan diantara mereka semakin terjalin dengan baik. Makanya tidak heran jika di pulau yang kecil ini ditemukan orang Ambon, Bima, Palu dan Bitung yang sudah menjadi penduduk pulau.

Data yang ada menunjukkan bahwa, indeks partisipasi warga di dalam pulau pasca penetrasi pasar mengalami

penurunan. Hal ini berarti bahwa sejak sepuluh tahun terakhir, kualitas partisipasi warga di dalam pulau berupa keaktifan sebagai pengurus dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan telah menurun (tergerus). Penurunan (tergerusnya) tingkat partisipasi sosial warga di dalam komunitas pulau berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakatnya sebagaimana terlihat pada Grafik 4.3 berikut:



Guna menjelaskan data pada Grafik 4.3 digunakan pengkategorian penilaian sebagai berikut: 120–200 Rendah, 201–280 Sedang dan 281–360 Tinggi.

Berpatokan pada kriteria penilaian di atas. Data pada Grafik 4.3 menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi sosial warga di dalam komunitas pulau pada saat ini lebih rendah dari pada sepuluh tahun lalu. Ini berarti bahwa tingkat partisipasi sosial warga di dalam komunitas pulau telah mengalami penurunan sejak sepuluh tahun terakhir (dari rendah menjadi sedang). Penurunan derajat partisipasi sosial

warga tersebut terjadi pada semua strata sosial masyarakat. Namun yang paling nyata terjadi pada strata sosial menengah dan atas, sementara pada strata sosial rendah kurang nyata. Penelitian Linda D. Ibrahim, 2002 juga menunjukkan bahwa kehidupan berorganisasi pada tingkat ketetangaan komunitas, meskipun rendah namun masih dapat dikembangkan melalui partisipasi sosial agar rumah tangga komunitas mampu mengakses sumber daya sosial.

Kejelian dari para pemilik modal memanfaatkan peluang pasar (tingginya harga hasil dan akses pemasarannya) yang diikuti oleh pemanfaatan lapangan kerja yang luas tersebut, berdampak pada meningkatnya ekonomi warga pulau. Melalui aktivitasnya tersebut, terjadilah perubahan status sosial dari buruh (sawi) menjadi ponggawa kapal (juragang) dan dari juragang menjadi pemilik kapal (pemilik modal). Bahkan tidak sedikit dikalangan pemilik kapal (pemilik modal) yang banting setir dari nelayan pedagang (padangkang) menjadi nelayan teripang dan ada pula pengusaha dari nelayan ikan (pa'ES) berubah menjadi nelayan teripang. Banyaknya nelayan yang berubah haluan menjadi nelayan teripang karena harga teripang lebih menggiurkan, terutama pada Tahun 2000-an hingga saat ini. Jadi sebagai akibat penetrasi pasar di PBL, telah menyebabkan tergerusnya partisipasi sosial warga di dalam pulau. Namun pada sisi yang lain, juga telah menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat, yaitu pada aspek status sosial warga pulau dan struktur (jenis) pekerjaan.

b. Bertambah (Menguatnya) Partisipasi Sosial Warga di Luar Komunitas PBL.

Tumbuh kembangnya atau maju tidaknya suatu komunitas, selain dipengaruhi oleh mensyarat dan partisipasi sosial di dalam komunitas itu sendiri, juga harus dibarengi dengan adanya partisipasi warganya di luar komunitasnya. Sebab melalui aktivitas tersebut akan terbentuk jaringan sosial di luar komunitas dan sekaligus menciptakan berbagai kesempatan lain; misalnya memudahkan akses informasi dan peluang kerja bagi warga PBL yang sebelumnya terisolir. Untuk menjelaskan bagaimana partisipasi sosial warga di luar komunitas pulau, peneliti mencoba mengumpulkan data tentang intensitas keterlibatan dan keaktifan warga komunitas pulau sebagai pengurus organisasi masyarakat di luar pulau. Disamping itu juga dilihat bagaimana keaktifan dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan di luar pulau dan yang terakhir yaitu posisi kualitas partisipasi sosial warga di luar pulau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar) maupun saat ini (pasca penetrasi pasar), intensitas keterlibatan warga sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan di luar pulau secara umum rendah. Namun demikian keterlibatan warga dalam organisasi kemasyarakatan saat ini (pasca penetrasi pasar) lebih baik dari pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar). Tingginya intensitas keterlibatan warga pulau sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan seiring dengan keaktifan warga sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun intensitas keaktifan warga PBL sebagai

pengurus dan terlibat dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan di luar pulau masih rendah, namun kondisinya saat ini lebih baik dari pada sepuluh tahun yang lalu.

Dari fakta yang ada, dapat menunjukkan bahwa, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, partisipasi sosial warga di luar komunitas pulaunya menjadi bertambah atau mengalami penguatan. Hal ini terjadi karena semakin lancarnya arus transportasi penyeberangan melalui dermaga/pelabuhan PBL. Fenomena ini berdampak pada meningkatnya mobilitas orang keluar masuk ke PBL. Disamping itu karena semakin terbukanya demokrasi bagi seluruh kalangan masyarakat, hingga mejangkau sampai kepada komunitas nelayan pulau-pulau kecil.

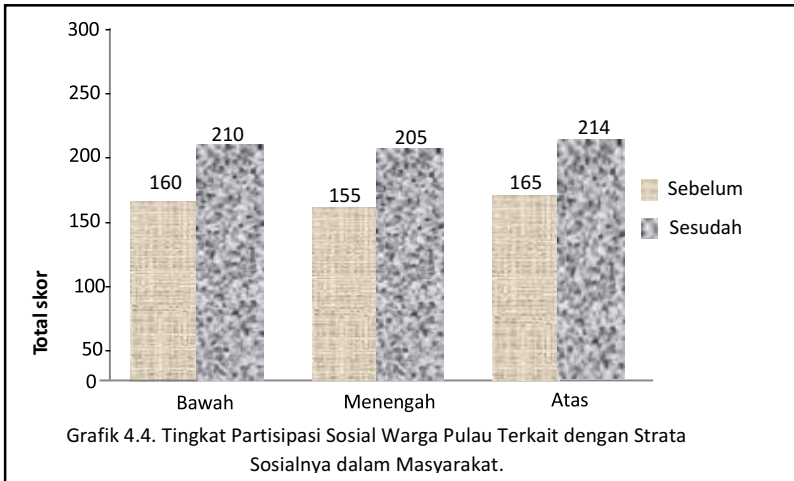
Bertambah atau menguatnya partisipasi sosial warga PBL dalam organisasi kemasyarakatan di luar pulau, diper-tegas oleh data dari hasil penelitian. Data dari penelitian menunjukkan bahwa, partisipasi sosial warga PBL terhadap organisasi sosial kemasyarakatan di luar pulau pada saat ini (pasca penetrasi pasar) lebih baik dari pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar). Dengan kata lain, partisipasi sosial warga di luar komunitas pulau selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat (menguat).

Rendahnya partisipasi sosial warga PBL terhadap organisasi kemasyarakatan di luar pulau pada masa lalu (sebelum penetrasi pasar), terutama disebabkan oleh kurang lancarnya arus transportasi keluar-masuk pulau ketika itu. Sehingga akses warga PBL terhadap informasi dan dunia luar juga masih terbatas. Faktor lain yang turut mepenga-

ruhi, ialah masih kurangnya pengetahuan warga terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan tersebut. Hal ini berakibat pada rendahnya motivasi dan animo warga untuk ikut berpartisipasi pada organisasi kemasyarakatan di luar pulau. Analisis ini sejalan dengan pandangan informan, sebagai berikut:

“Pada masa lalu warga Barrang kurang tertarik dengan adanya organisasi kemasyarakatan, karena menurut mereka pekerjaan seperti itu hanya membuang-buang waktu. Kalaupun ada yang mau berpartisipasi, tapi terkendala dengan kelancaran arus transportasi pada masa itu. Tapi sekarang meskipun transportasi sudah lancar namun warga juga masih jarang yang berpartisipasi karena mereka belum tau apa tujuan dan manfaat ikut dalam organisasi tersebut. Tapi kalau saat ini sudah ada tokoh masyarakat yang masuk, mungkin akan ada beberapa warga yang mengikuti jejak tokoh masyarakat tersebut. Hanya saja tokoh masyarakat disini sangat jarang yang tertarik terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang datang dari luar pulau” (Wawancara, 8/8/2012).

Partisipasi sosial warga PBL di luar komunitas pulau berdampak terhadap struktur sosial masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh data pada Grafik 4.4 berikut:



Guna menjelaskan Grafik 4.4 digunakan pengkategorian penilaian sebagai berikut: 120–200 Rendah, 201–280 Sedang dan 281–360 Tinggi.

Berpatokan pada kriteria penilaian di atas. Pada Grafik 4.4 menunjukkan bahwa, meskipun tingkat partisipasi sosial warga PBL di luar komunitas pulau pada saat ini (pasca penetrasi pasar) maupun pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar) berada pada posisi sedang. Namun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir partisipasi sosial warga tersebut telah mengalami peningkatan (menguat). Peningkatan atau menguatnya partisipasi sosial warga PBL sebagaimana dijelaskan di atas secara umum terjadi pada semua strata sosial masyarakat. Namun yang paling terasa (nyata) terjadi pada golongan masyarakat yang berstrata sosial atas. Hal ini terjadi karena warga PBL yang berada pada golongan menengah ke atas memiliki akses dan fasilitas yang mendukung keterlibatannya jika ada kegiatan atau aktivitas

baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi lain yang di adakan di luar pulaunya. Sementara warga yang berada pada strata sosial bawah tidak memiliki fasilitas dan uang sehingga aksesnya sangat terbatas untuk melibatkan diri.

c. Menguatnya Toleransi Sosial pada Komunitas Nelayan PBL

Toleransi sosial diartikan sebagai tingkat penerimaan atau persetujuan seseorang maupun kelompok atas keberadaan orang atau kelompok lain. Toleransi sosial biasa juga diartikan sebagai kohesi sosial atau lubricant pada suatu komunitas atau masyarakat. Apabila suatu masyarakat atau komunitas tingkat toleransi sosialnya tinggi, maka pada komunitas tersebut akan mudah tercipta persatuan dan kesatuan, yang kemudian melahirkan kebersamaan sebagai salah satu potensi atau kapital sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Sebaliknya jika toleransi sosialnya rendah, maka akan sangat susah menciptakan persatuan dan kesatuan pada komunitas tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tanpa persatuan dan kesatuan, maka pelaksanaan program pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Karenanya persoalan bagaimana menciptakan toleransi sosial yang baik antar berbagai elemen dalam masyarakat menjadi persoalan yang sangat urgen bagi kesuksesan program pembangunan pada suatu wilayah. Untuk itu pembahasan mengenai toleransi sosial sebagai salah satu elemen dari kapital sosial menjadi penting pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar) maupun saat ini (pasca penetrasi pasar), warga pulau atau penduduk setempat menerima dengan baik kehadiran para pendatang. Meskipun demikian pasca penetrasi pasar (saat ini), penerimaan penduduk setempat terhadap para pendatang tersebut jauh lebih baik daripada sebelum penetrasi pasar (sepuluh tahun yang lalu).

Tingginya antusias warga pulau saat ini terhadap penerimaan warga pendatang tidak serta merta sejalan dengan sikap mereka. Sebab pada umumnya mereka tidak suka (benci) kepada warga pendatang yang berbeda sikap atau pandangan dengannya. Terlebih jika pendatang tersebut sudah lebih sukses dari pada dirinya. Meskipun demikian penerimaan mereka terhadap perbedaan sikap tersebut pada saat ini (pasca penetrasi pasar) lebih baik dari pada sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar). Dengan kata lain bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir warga PBL (penduduk setempat) sudah tidak mempersoalkan lagi jika ada dari warga pendatang yang berbeda sikap dan pandangan dengannya. Hal ini berarti bahwa pasca penetrasi pasar, toleransi sosial warga PBL telah mengalami peningkatan.

Kuatnya penolakan (kebencian) warga pulau atas perbedaan sikap yang ditunjukkan para pendatang pada sepuluh tahun yang lalu, disebabkan karena adanya anggapan di kalangan penduduk asli bahwa selaku warga pendatang seharusnya menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat. Secara teori hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada umumnya masyarakat setempat merasa

ingin selalu dihargai (lebih superior) dari para pendatang. Karenanya muncul egosentrisme terhadap apa yang sudah dimiliki dan tidak mau menerima pengaruh dari luar. Akan tetapi sikap demikian secara perlahan mulai luntur digantikan dengan sikap terbuka untuk menerima kehadiran orang lain beserta pengaruhnya. Makanya sikap kebencian atas perbedaan sikap dengan para pendatang pada sepuluh tahun lalu mengalami penurunan hingga saat ini. Ini berarti bahwa saat ini warga penduduk asli di pulau itu lebih terbuka terhadap pengaruh dari luar, dibanding pada masa lalu. Melalui sikap keterbukaan tersebut sehingga dapat menjadi pendorong bagi mereka untuk lebih maju.

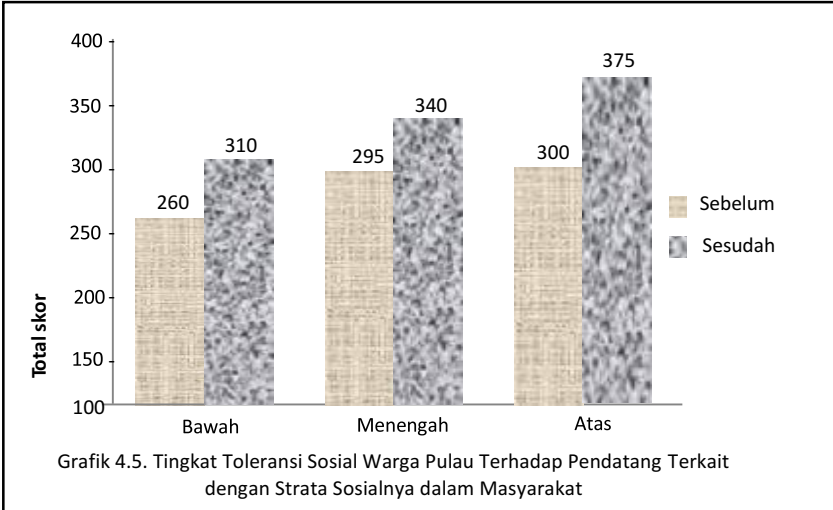
Penjelasan lain yang dapat dikemukakan terkait dengan toleransi warga ini adalah sikap warga jika dipimpin oleh warga pendatang, serta kesediaan warga pulau bergaul dengan sesama warga lain tanpa mempersoalkan latar belakang sosial budaya dan ekonominya. Data menunjukkan bahwa terjadi perubahan sikap pada warga pulau dari resisten/kontra, menjadi permisif terhadap warga pendatang. Selain itu juga dapat bermakna bahwa saat ini warga lebih terbuka dari pada sepuluh tahun lalu. Hal ini ditunjukkan dari data penelitian yang telah dilakukan, bahwa saat ini (pasca penetrasi pasar), lebih banyak warga yang setuju jika dipimpin oleh pendatang dari pada sepuluh tahun yang lalu (sebelum penetrasi pasar).

Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh kesediaan warga untuk bergaul dengan siapa saja tanpa mempersoalkan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi warga. Kesediaan warga setempat untuk menerima kehadiran para

pendatang dan adanya sikap terbuka dalam bergaul dengan siapa saja tanpa mempersoalkan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi seseorang menunjukkan bahwa toleransi warga PBL saat ini lebih baik dari pada sepuluh tahun lalu.

Fakta terakhir untuk menjelaskan perubahan sikap toleransi komunitas PBL adalah dengan melihat posisi kualitas toleransi warga. Data menunjukkan bahwa saat ini toleransi warga pulau terhadap keberadaan warga pendatang lebih tinggi dibanding sepuluh tahun lalu. Sikap toleransi tersebut telah bergeser dari sekedar hubungan-hubungan sosial yang cenderung karena faktor kesamaan kepentingan, senasib sepenanggungan, sesuku dan sebagainya, berubah menjadi toleransi yang terbina atas dasar perbedaan kepentingan, suku, asal daerah dan sebagainya. Pergeseran sikap toleransi yang terjadi pada warga PBL sebagaimana telah dijelaskan di atas, Durkheim menyebutnya sebagai perubahan dari masyarakat yang bertipe solidaritas sosial mekanik menjadi masyarakat yang bertipe solidaritas sosial organik. Istilah lain oleh F. Tonnies ialah sebagai pergeseran dari masyarakat yang bertipe *gemeinschaft* menjadi masyarakat yang bertipe *gesellschaft*.

Perubahan sikap toleransi pada warga PBL berdampak terhadap struktur sosial masyarakatnya sebagaimana terlihat data pada Grafik 4.5 berikut:



Guna menjelaskan data pada Grafik 4.5 digunakan pengkategorian penilaian sebagai berikut: 160-267 Rendah, 268-374 Sedang dan 375-481 Tinggi.

Berpatokan pada kriteria penilaian di atas, data pada Grafik 4.5 menunjukkan bahwa secara umum tingkat toleransi sosial pada komunitas PBL pada saat ini berada pada posisi sedang begitu pula pada sepuluh tahun yang lalu. Meskipun demikian dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terjadi peningkatan tingkat toleransi sosial terhadap pendatang pada komunitas PBL. Peningkatan tersebut terjadi pada semua strata sosial dan yang paling menonjol terjadi pada strata sosial atas. Tingginya tingkat toleransi terhadap pendatang terutama yang terjadi pada warga yang berstrata sosial atas, disebabkan oleh faktor-faktor antara lain yaitu: karena warga pulau yang berstrata sosial atas lebih terbuka dibandingkan warga yang berstrata sosial menengah dan bawah. Faktor lain yang menjadi

penyebab adalah karena bagi warga yang berstrata sosial atas, pada umumnya memiliki pengalaman yang luas. Dampak dari luasnya cakupan jaringan sosial yang telah mereka miliki, membuat akses keluar yang lebih baik pula. Disamping itu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terutama terkait dengan perubahan pola pikir dan pandangan hidup.

Berdasarkan sajian dan penjelasan dari keseluruhan data mengenai perubahan nilai (norma) pada komunitas nelayan Pulau Barrang Lompo (PBL) dalam pokok bahasan ini. Dapat dirumuskan simpulan dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut: jika angka total skor berada antara (760-1267) maka dikatakan stok nilai pada komunitas pulau sudah berkurang (tergerus), dan jika total skor berada antara (1268-1744) maka dikatakan stok nilai pada komunitas pulau tetap (tidak berkurang dan tidak bertambah), namun apabila angka total skor berada antara (1775-2281) maka dikatakan stok nilai pada komunitas pulau telah meningkat (bertambah).

Hasil olahan data diperoleh angka perubahan stok nilai pada komunitas pulau saat ini ialah (1742) skor. Sementara pada sepuluh tahun lalu total skornya ialah (1656). Dengan berpatokan pada tiga pengkategorian data di atas, dapat disimpulkan bahwa baik pada saat ini maupun pada sepuluh tahun yang lalu secara umum stok nilai pada komunitas pulau masi tetap. Dalam arti bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir stok nilai pada komunitas pulau tidak berkurang dan tidak bertambah (tetap). Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa stok nilai pada

komunitas pulau pada sepuluh tahun lalu lebih sedikit dari pada saat ini. Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan data pada pokok bahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir terjadi penambahan stok nilai pada komunitas PBL.

Secara rinci (per-variabel) perubahan stok nilai pada warga di PBL dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa baik pada 10 tahun lalu maupun saat ini stok nilai pada warga pulau dalam hal pencapaian kehidupan menurut kategori penilaian masih tetap. Namun demikian stok nilai warga pada kehidupan pada saat ini lebih tinggi (313) dari pada sepuluh tahun yang lalu yaitu berubah dari (278) menjadi (313). Kondisi ini juga terjadi pada pembentukan jaringan sosial antar teman dan keluarga pada warga pulau masih kuat, dimana jaringan sosial antar teman dan keluarga yang telah terbentuk pada sepuluh tahun yang lalu hingga saat ini telah mengalami penguatan dari (233) menjadi (200). Sementara itu jaringan sosial di luar komunitas pulau pada sepuluh tahun yang lalu masuk dalam kategori pupus atau tidak ada (451). Sedangkan jaringan sosial warga pulau diluar komunitas pulau saat ini masuk kategori lemah (431). Namun dari angka ini memperlihatkan tren penguatan, sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun pada sepuluh tahun yang lalu jaringan sosial warga di luar pulau belum terbentuk namun seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan masyarakat di pulau tersebut secara perlahan dapat terbentuk. Meskipun jaringan sosial di luar pulau yang terbentuk itu masih lemah, dalam arti bahwa

jaringan sosial warga ke luar pulau memang sejak dulu telah terbentuk namun masih kurang.

d. Pergeseran Norma pada Komunitas Nelayan PBL

Norma dipahami sebagai aturan main bersama yang menuntun perilaku seseorang. Norma memberikan kita suatu cara dimana kita mengorientasikan diri terhadap orang lain. Norma menuntun kita dalam melakukan defenisi situasi. Sullivan dan Thompson (1984) membagi norma atas: kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores) dan hukum (law). Kebiasaan adalah cara-cara yang lazim, wajar dan berulang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sesuatu. Apabila kebiasaan dikaitkan dengan gagasan tentang salah dan benar, maka ia dipandang sebagai tata kelakuan. Dengan demikian tata kelakuan merupakan gagasan yang kuat mengenai salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Ini berarti adat istiadat dan tata kelakuan berkaitan erat dengan moral. Berbagai tabu dan pantangan yang terdapat dalam masyarakat adalah bentuk dari tata kelakuan. Apabila tata kelakuan diformalkan dan dikodifikasikan dengan penerapan sanksi dan hukuman oleh otoritas pemerintah, maka ia dipandang sebagai hukum.

Sehubungan dengan konteks pembahasan komunitas sosial pada studi ini, karena itu norma tidak bisa dilepaskan dengan jaringan, kepercayaan dan nilai. Sebab dengan menggunakan pendekatan pertukaran, yaitu mempertimbangkan untung dan rugi baik dalam dimensi intrinsik maupun ekstrinsik. Jika suatu pertukaran mendapatkan suatu keuntungan, maka akan muncul pertukaran selanjutnya yang

diharapkan mendapatkan keuntungan pula. Jika beberapa kali pertukaran yang berlangsung memperoleh keuntungan maka muncullah norma sebagai aturan main bersama yang menuntun perilaku seseorang, yaitu suatu proses pertukaran yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini semua pihak yang terlibat harus memiliki tanggung jawab menjaga norma yang berlaku. Jika ada orang yang melanggar norma dan berdampak pada berkurangnya keuntungan para pihak yang terlibat, maka ia diberi sanksi atau hukuman berat. Jika pertukaran berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama, maka akan mengkrystalkan suatu jaringan hubungan sosial yang didalamnya mengandung suatu kepercayaan bahwa para pihak yang terlibat dalam pertukaran akan memperoleh keuntungan yang merata. Hal itulah yang memunculkan norma yang berkeadilan, dan jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman berat pula.

e. Norma-norma yang Masih Dipegang Teguh (Dianut)
Komunitas PBL

Masyarakat atau komunitas di PBL sejak dulu memiliki norma-norma dan adat istiadat (kebiasaan) yang hingga saat ini sebahagian besar masih kuat dipertahankan oleh warganya. Disamping itu ada juga yang sudah mulai ditinggalkan warga, meskipun belum meluas eskalasinya. Bahkan ada yang sudah hampir tidak dilaksanakan lagi (sudah mulai dilupakan) oleh warga pulau. Norma-norma dan kebiasaan yang masih kuat dipertahankan oleh warga pulau antara lain: maudu baku' (perayaan maulid besar),

zdkir tahunan menyambut 1 muharram, barazandji tiap malam jum'at, anggiori (bawaan ketika menghadiri pesta/-hajatan), songkabala, gepe asyura, zikir rebana pada setiap hajatan, barazandji setiap malam jum'at bagi keluarga yang keluarganya sedang melaksanakan ibadah haji, apparuru biseang (upacara menurunkan perahu ke laut) dan appassili (upacara keselamatan) bagi ibu dan bayinya yang dihamilkan tujuh bulan.

Adapun norma yang sudah mulai longgar atau hanya sebagian kecil warga yang kadang-kadang melakukannya lagi antara lain: pa'rappo (ritual memohon izin dan perlindungan sebelum melakukan penangkapan/pencarian ikan atau teripang), mattoa, passare, abbiritta, andele (arisan), ziarah ke makam leluhur menjelang hajatan, atturungan dan buka pintu lebar-lebar di pagi hari. Selain pada kedua kondisi di atas, ada juga norma dan kebiasaan yang saat ini sudah hampir punah, atau hanyah segelintir orang saja yang melakukannya antara lain: mandi syafar pada bulan sya'ban untuk tolak bala, nisfu sya'ban dan mattawa' (prosesi memanggil angin ketika akan melaut).

Selain beberapa kebiasaan yang telah disebutkan di atas juga terdapat prosesi adat berupa mengarak pengantin mengelilingi pulau. Kebiasaan ini tetap ada (dilaksanakan warga) namun telah mengalami perubahan bentuk. Dulu dilakukan dengan berjalan kaki untuk mengarak pasangan pengantin dengan memakai tandu sambil mengelilingi pulau yang diiringi oleh musik djidor (semacam musik tandjidor ala Betawi). Dibelakang pengantin diikuti oleh rombongan warga sambil menyanyikan sholawat badar diiringi tabuhan

gendang. Saat ini prosesi mengarak pengantin keliling pulau dilakukan dengan menggunakan bentor (motor yang dipasangi gendangan) tapi tata cara pelaksanaannya masih sama dengan tata cara yang lama namun sedikit modifikasi. Untuk lebih jelasnya gambaran tersebut dapat dilihat data pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Norma-norma yang Masih Dianut
oleh Komunitas PBL

No	Hal-hal yang masih menjadi kebiasaan warga	Pilihsn Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Maudu Baku' (Mualid besar).	100,0	0,0
2	Zdikir tahunan menyambut 1 Muharram.	100,0	0,0
3	Baranzandji tiap malam jumat.	100,0	0,0
4	Pa'rappo (upacara memohon izin kepada penguasa laut sebelum pencarian teripang dimulai).	95,0	0,5
5	Mattoa' (kunjungan ke warga lain saat berduka atau kenamusibah).	95,0	0,5
6	Passare (bawaan saat ke rumah duka)	90,0	10,0
7	Abbiritta' (orang yang mengundang saat ada hajatan).	95,0	5,0
8	Anggiori (bawaan saat ke undangan pesta seperti acara pernikahan, khitanan dsb).	100,0	0,0
9	Songkabala (tolak bala).	100,0	0,0
10	Andele (semacam arisan).	97,5	2,5
11	Siarah ke makam leluhur menjelang hajatan (nikah, haiqiqah, ibadah haji).	97,5	2,5
12	Mandi syafar pada bulan syafar untuk tolak bala.	25,0	75,0
13	Bakar lilin di masjid saat purnama bulan sa'ban.	35,0	65,0
14	Gepe Asyura (upacara hari-hari tasyrik).	100,0	0,0
15	Zdikir rebbana pada setiap hajatan atau pesta.	100,0	0,0
16	Barandji bagi rumah tangga yang keluarganya melaksanakan ibadah haji setiap malam jumat sampai keluarga tiba dari tanah mekkah.	100,0	0,0
17	Apparuru biseang (Prosesi peresmian bagi perahu baru yang akan digunakan melaut).	100,0	0,0

18	Appasili bagi perempuan hamil pada bulan ketujuh.	100,0	0,0
19	Prosesi turun rumah setelah 11 hari melahirkan (atturungan).	97,5	2,5
20	Prosesi memanggil angin ketika akan berlayar (Mattawa).	2,5	92,5
21	Buka pintu rumah lebar-lebar di pagi hari agar rezeki mudah datang.	97,5	2,5
22	Prosesi mengarak pengantin mengelilingi pulau.	95,0	5,0

f. Norma-norma yang Ditabukan (Kassipalli) Bagi Komunitas PBL

Selain norma-norma dan kebiasaan yang menjadi tata kelakuan (dianut) oleh warga pulau. Ada juga terdapat norma-norma dan kebiasaan yang ditabukan atau tidak boleh dilakukan (kassipalli) bagi warga pulau. Dari norma-norma dan kebiasaan yang tidak boleh dilakukan atau ditabukan (“kassipalli”) tersebut pada umumnya secara perlahan sudah mengalami perubahan (pergeseran), meskipun pergeseran itu masih kurang berarti. Norma-norma dan kebiasaan yang masih ditabukan (kassilapalli) oleh warga pulau antara lain: tidak boleh mengatakan “tena” jika dimintai sesuatu, tidak boleh berselisih/cekcok saat melaut, tidak boleh bepergian atau memulai pekerjaan pada hari buruk (nakasa’), tidak boleh berkata kasar atau takabur saat melaut, tidak boleh melakukan pekerjaan menjelang jum’at atau magrib, perempuan hamil tidak boleh duduk di tangga, perempuan hamil ketika mandi tidak boleh memakai baju tapi harus pakai sarung, perempuan hamil tidak boleh makan udang dan rumput laut, tidak boleh keluar rumah menjelang magrib, nelayan teripang tidak boleh buang hajat di sekitar lokasi pencarian sebelum melakukan pa’rappo,

warga tidak boleh duduk ditangga di pagi hari dan menjelang magrib, warga tidak boleh melakukan hajatan pada bulan taggepe dan warga tidak boleh menutup pintu rumah di pagi hari.

Norma-norma dan kebiasaan yang sudah dilanggar atau hampir tidak ditabukan lagi oleh warga pulau antara lain: main judi, perempuan hamil jika makan tidak boleh sembarang wadah sebagai tempat menaruh makanannya, warga tidak boleh mandi di laut pada siang hari jum'at, warga tidak boleh membelanjakan uang untuk keperluan rumah tangga pada malam jum'at, warga tidak boleh cuci piring pada malam hari, warga tidak boleh menghabiskan nasi di belanga pada malam jum'at, warga tidak boleh menyapu di dalam rumah, warga tidak boleh melayat orang mati dan menurunkan barang dari atas rumah selama masih ada keluarga yang melaut. Untuk lebih jelasnya gambaran perubahan tersebut lihat data pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2
Norma-norma yang Ditabukan
(Kassipalli) oleh Komunitas PBL.

No	Hal-Hal yang Masih Dilarang/Ditabukan (Kassipalli) oleh Komunitas Pulau	Pilihsn Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Tidak boleh mengatakan “ <i>tena</i> ” jika dimintai sesuatu namun diganti dengan kata “ <i>toal</i> ”.	79,5	2,5
2	Tidak boleh berselisih/cekcock terutama saat melaut.	79,5	2,5
3	Tidak boleh main judi.	45,0	55,0
4	Tidak boleh memulai pekerjaan (bepergian) pada hari buruk (<i>nakasa</i>).	79,5	2,5
5	Tidak boleh berkata kasar/takabur saat melaut.	95,0	5,0
6	Tidak boleh melakukan pekerjaan menjelang magribatau jum'at.	97,5	2,5
7	Perempuan hamil tidak boleh duduk di tangga.	90,0	10,0

8	Perempuan hamil jika mandi dilarang pakai baju tapi harusnya pakai sarung guna menutupi badan.	90,0	10,0
9	Perempuan hamil dilarang makan rumput laut, udang dan siput atau kerang laut.	90,0	10,0
10	Perempuan hamil jika makan tidak boleh memakai sembarang wadah sebagai tempat makan. Harusnya piring yang sebenanrnya.	25,0	75,0
11	Tidak boleh keluar rumah menjelang magrib.	95,0	5,0
12	Tidak boleh mandi di laut pada tengah hari pada hari jum'at.	45,0	55,0
13	Tidak boleh membelanjakan uang untuk keperluan rumah tangga pada malam jum'at.	35,0	65,0
14	Tidak boleh cuci piring pada malam hari.	25,0	75,0
15	Tidak boleh menghabiskan nasi di belanga pada malam jum'at.	25,0	75,0
16	Tidak boleh menyapu dalam rumah selama keluarga melaut.	35,0	65,0
17	Tidak boleh melayat orang mati saat keluarga melaut.	30,0	70,0
18	Tidak boleh menurunkan barang dari rumah selama keluarga masih melaut.	30,0	70,0
19	Saat baru saja tiba di lokasi penangkapan tidak boleh buang hajat sebelum melakukan "pa'rappo".	97,5	2,5
20	Tidak boleh duduk ditangga di pagi hari dan menjelang magrib.	90,0	10,0
21	Tidak boleh melakukan hajatan pada bulan <i>taggepe</i> .	97,5	2,5
22	Tidak boleh tutup pintu di pagi hari.	90,0	10,0

g. Tergerusnya Kepatuhan Komunitas Nelayan PBL terhadap Norma

Setiap komunitas masyarakat memiliki norma yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Keberadaan suatu norma di dalam masyarakat sesungguhnya dimaksudkan untuk mengatur agar tata kelakuan dan kehidupan bagi komunitas bersangkutan berjalan teratur. Keteraturan suatu komunitas sangat bergantung pada kepatuhan warga terhadap norma-norma yang berlaku pada komunitasnya. Sepanjang warga masih patuh terhadap norma-norma yang

berlaku dalam komunitasnya, maka komunitas tersebut akan berjalan teratur dan norma-norma yang mereka anut (jalankan) akan tetap bertahan. Namun sebaliknya jika norma-norma yang ada pada suatu komunitas sudah tidak dipatuhi lagi oleh warganya, maka secara perlahan norma-norma tersebut akan mengalami pergeseran dan bahkan mengalami penyusutan (tergerus). Apabila proses penggerusan suatu norma-norma sebagai modal sosial bagi suatu komunitas tetap berjalan, dalam arti tidak ada usaha untuk mempertahankannya. Maka secara perlahan akan hilang sama sekali atau paling tidak akan mengalami modifikasi bentuk dan tampilan sehingga keasliannya sudah tidak nampak lagi. Dalam situasi demikian, kita akan tiba pada suatu kondisi dimana suatu komunitas semakin tipis stok kapital sosialnya (kemiskinan kapital sosial) yang berimplikasi pada hilangnya jati diri suatu komunitas atau masyarakat. Untuk melihat bagaimana proses perubahan norma pada komunitas nelayan di PBL, peneliti menelaah dua aspek sebagai sub variabel dari tulisan ini yaitu: kepatuhan warga terhadap kebiasaan dan kepatuhan warga pada tata kelakuan.

Data penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan warga terhadap norma pada komunitas nelayan PBL sepuluh tahun yang lalu (sebelum penatarasi pasar), lebih baik dari pada saat ini (pasca penetrasi pasar). Hal ini berarti bahwa dalam sepuluh tahun terakhir kepatuhan komunitas nelayan PBL terhadap norma dalam masyarakat, telah mengalami penyusutan (tergerus).

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada kepatuhan warga PBL terhadap tata kelakuan. Data menunjukkan bahwa baik sepuluh tahun lalu (sebelum penetrasi pasar) maupun saat ini (pasca penetrasi pasar), warga pulau masih patuh pada tata kelakuan yang berlaku dalam masyarakat. Hanya saja kepatuhan warga terhadap tata kelakuan dalam bermasyarakat pada sepuluh tahun yang lalu, masih jauh lebih baik dari pada saat ini. Dalam hal ini juga telah terjadi penurunan tingkat kepatuhan warga terhadap tata kelakuan. Kondisi yang ditunjukkan berdasarkan data hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, setelah penetrasi pasar menerobos masuk ke komunitas Pulau Barrang Lompo (PBL) berdampak pada penurunan indeks kepatuhan warga kepada norma.

Fakta yang ditunjukkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terjadi penurunan tingkat kepatuhan warga terhadap norma dan tata kelakuan dalam masyarakat. Dengan kata lain kepatuhan warga PBL terhadap norma pasca penetrasi pasar telah tergerus. Tergerusnya kepatuhan warga PBL terhadap norma terutama disebabkan oleh kuatnya penetrasi pasar melalui semangat komersialisasi hasil laut yang secara tidak langsung memunculkan sikap persaingan atau “permusuhan” laten di antara warga dalam mengejar materi. Sehingga demi mengejar kepuasan materi, warga sudah tidak segan-segan melakukan perbuatan sesuka mereka meskipun itu melanggar norma dan tata kelakuan dalam masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung maka secara perlahan norma-norma yang selama ini dipelihara dengan

baik oleh warga pulau akan hilang. Demikian pula tata kelakuan yang selama ini telah dijalankan dengan baik, berganti dengan tata kelakuan yang mungkin tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai yang diyakini oleh mereka. Pada situasi demikian warga komunitas akan kehilangan jati diri sehingga tidak memiliki pegangan dalam bertindak. Yang dimana Dhurkheim mengistilakan fenomena ini sebagai “masyarakat yang berada pada situasi anomalis” (masyarakat yang bingung tanpa pegangan). Dimana pada masyarakat yang demikian biasanya terlalu mudah di ombang-ambingkan oleh perubahan jaman, tanpa mengetahui bagaimana caranya untuk keluar dari situasi yang mereka alami.

Sebagai rangkuman dari perubahan norma-norma yang terjadi pada komunitas nelayan PBL sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Nilai/Norma Sosial pada Komunitas Nelayan PBL terkait dengan Strata Sosial Masyarakat.

Strata Sosial	Perubahan Nilai/Norma sosial pada Komunitas PBL Terkait dengan Strata Sosial.	
	Dulu (Sebelum)	Sekarang (Setelah)
Lapisan Bawah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat resiprositas komunitas pulau tinggi. • Tingkat partisipasi warga didalam komunitas pulau tinggi. • Tingkat partisipasi di luar pulau rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat resiprositas komunitas pulau rendah (turun/tergerus). • Tingkat partisipasi warga di dalam komunitas pulau turun. • Tingkat partisipasi di luar pulau tinggi (naik).
Lapisan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat resiprositas komunitas pulau tinggi. • Tingkat partisipasi di dalam komunitas pulau tinggi. • Tingkat partisipasi di luar pulau rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat resiprositas komunitas pulau sangat rendah (turun/tergerus) • Tingkat partisipasi di dalam komunitas pulau sangat rendah (turun/tergerus). • Tingkat partisipasi di luar pulau tinggi (naik).

Lapisan Atas	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat resiprositas komunitas pulau tinggi.• Tingkat partisipasi di dalam komunitas pulau tinggi.• Tingkat partisipasi di luar pulau rendah.	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat resiprositas komunitas pulau sangat rendah (turun/ tergerus).• Tingkat partisipasi di dalam komunitas pulau sangat rendah (turun/ tergerus).• Tingkat partisipasi di luar pulau sangat tinggi (naik).
--------------	---	---

Penetrasi pasar melalui derasnya arus barang dan jasa masuk ke pulau dan komersialisasi hasil laut (monetisasi) telah berdampak pada: meningkatnya perilaku konsumtif terutama pada barang-barang hasil industri, perubahan sistem mata pencaharian dari pola konsumtif (nelayan subsistensi) menjadi pola perdagangan (nelayan komersial), perubahan orientasi hidup dan kehidupan dari yang dijiwai oleh semangat spiritualistik menjadi semangat materialistik (monetisasi), tergerusnya prinsip saling berbagi (resiprositas) dalam komunitas dan kejujuran dalam pembagian hasil.

Proses perubahan kapital sosial pada komunitas PBL tidak saja disebabkan oleh adanya intervensi negara dan penetrasi pasar, namun pembangunan/perkembangan rumah ibadah (masjid) turut menyumbang terjadinya perubahan di pulau tersebut yaitu: meningkatnya spirit keagamaan dan solidaritas sosial di komunitas PBL, terbentuknya/meningkatnya jaringan sosial baru, tergerusnya kepatuhan warga kepada norma/nilai-nilai dan adat istiadat setempat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam digantikan oleh kepatuhan pada norma/nilai-nilai dan adat istiadat yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Menguatnya (rekapitalisasi) kapital sosial yang diakibatkan oleh intervensi negara tidak sebanding dari dampak yang diakibatkan oleh penetrasi pasar (Suparman Sanwar).

Bab V

Implikasi Teoritis dan Kebijakan

A. Kesimpulan

Dari fakta yang telah ditemukan di lapangan melalui proses penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Intervensi negara melalui program pembangunan struktur kelembagaan pemerintahan, infrastruktur jalan dan pembangunan dermaga (pelabuhan) telah berdampak pada:
 - a. Tergerusnya kepercayaan (*trust*) dan loyalitas warga terhadap pemerintah.
 - b. Tergerusnya kapasitas politik dan partisipasi komunitas PBL terhadap pelaksanaan program pembangunan.
 - c. Tergerusnya kapasitas kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya.

- d. Meningkatnya solidaritas sosial antar warga pulau (*bonding social capital*).
 - e. Meningkatnya mobilitas keluar dan masuk pada warga pulau sehingga terbentuk jaringan sosial baru. Hal ini dicirikan dengan terbangunnya solidaritas sosial antar kelas di dalam pulau (*bridging social capital*) dan di luar pulau (*linking social capital*).
 - f. Terjadinya pergeseran nilai/norma dalam komunitas PBL.
2. Penetrasi pasar melalui derasnya aliran barang, jasa/orang dan komersialisasi hasil laut yang masuk di PBL, berdampak pada perubahan orientasi hidup warga PBL dari yang dijiwai oleh semangat spiritualistik, menjadi semangat materialistik. Hal ini ditandai oleh berubahnya sistem mata pencaharian dari pola konsumtif (*subsistensi*) menjadi pola perdagangan (*komersialisasi*). Meningkatnya perilaku konsumtif warga pulau terutama pada barang-barang industri, menyebabkan tergerusnya prinsip saling berbagi (*resiprositas*) dan kejujuran dalam pembagian hasil laut pada komunitas nelayan pulau-pulau kecil. Perubahan lain dari adanya penetrasi pasar masuk ke PBL adalah bertambahnya jaringan sosial pada warga baik di dalam maupun di luar pulau.
 3. Perubahan kapital sosial di PBL tidak saja disebabkan oleh adanya intervensi negara dan penetrasi pasar, namun pembangunan/perkembangan rumah ibadah (*masjid*) juga turut menyumbang terjadinya perubahan pada komunitas Pulau Barranga Lompo. Perubahan yang dimaksud yaitu meningkatnya spirit keagamaan, solidaritas sosial dan

bertambahnya jaringan sosial baru. Namun pada sisi lain menyebabkan tergerusnya kepatuhan warga terhadap nilai/norma setempat. Dari yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam digantikan oleh kepatuhan pada nilai/norma yang sesuai dengan syariat agama Islam.

4. Merujuk pada simpulan di atas maka dapat dirumuskan pernyataan bahwa penelitian ini tidak menolak dan atau menerima sepenuhnya kedua proposisi penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Intervensi negara melalui program-program pembangunan dan penetrasi pasar melalui aliran masuknya barang, jasa/orang dan komersialisasi hasil laut, berdampak terhadap tergerusnya (*dekapitalisasi*) kapital sosial pada dimensi tertentu. Akan tetapi juga terjadi penambahan/penguatan (*rekapitalisasi*) pada dimensi yang lain. Disamping itu juga terdapat dimensi kapital sosial yang hanya mengalami pergeseran bentuk.
5. Berdasarkan point-point kesimpulan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan umum bahwa bertambah atau menguatnya (*rekapitalisasi*) kapital sosial yang diakibatkan oleh intervensi negara tidak sebanding dari dampak yang diakibatkan oleh penetrasi pasar. Dalam arti bahwa meskipun intervensi negara menambah/menguatkan kapital sosial pada dimensi tertentu, namun penambahan/penguatan tersebut pada akhirnya akan tetap tergerus. Hal ini dapat terjadi karena daya rusak penetrasi pasar terhadap kapital sosial jauh lebih dahsyat dari pada proses penambahan/penguatan kapital sosial

sebagai dampak dari intervensi negara melalui program pembangunan.

B. Implikasi Teoritis

Dampak intervensi negara melalui program pembangunan struktur kelembagaan pemerintahan, infrastruktur jalan dan pembangunan dermaga (pelabuhan), telah menggerus kepercayaan (*trust*) dan solidaritas sosial antar warga pulau (*bonding social capital*). Tergerusnya kepercayaan (*trust*) dan loyalitas warga terhadap pemerintah dan tokoh masyarakat, menggerus kapasitas politik dan partisipasi warga Pulau Barrang Lompo terhadap pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, juga menggerus kapasitas kewenangan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya. Walaupun disisi lain, berdampak pada meningkatnya mobilitas keluar dan masuk warga pulau sehingga terbentuk jaringan sosial baru. Yaitu terbangunnya solidaritas sosial antar kelas di dalam pulau (*bridging social capital*) dan di luar pulau (*linking social capital*). Hal lain yang juga mengalami perubahan adalah pergeseran nilai/norma.

Tergerusnya kepercayaan dan solidaritas sosial antar warga pulau sebagai dampak dari pembangunan inpra-struktur di Pulau Barrang Lompo. Perbaikan jembatan/-dermaga menyebabkan makin ramainya warga luar pulau terutama dari Kota Makassar, masuk ke pulau ini untuk berlibur. Begitu pula sebaliknya banyak juga warga pulau yang berpergian ke luar pulau terutama ke Kota Makassar. Kehadiran para pendatang dan adanya pengalaman yang didapatkan oleh warga pulau setelah bepergian, telah merubah

cara pandang dan pola pikir komunitas pulau terutama mengenai aspirasi hidup, bahwa hidup harus berubah secara materi. Atas dasar itulah membuat warga pulau sangat cermat menggunakan waktu yang ada untuk bekerja, guna menambah pendapatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hal itu dilakukan untuk memiliki rumah yang bagus dengan perabot yang bagus pula. Sementara kepentingan dan kepercayaan dengan sesama warga sudah kurang diindahkan lagi. Kondisi ini berimplikasi pada semakin menipisnya stok kepercayaan antar warga. Dalam istilah Fukuyama masyarakat yang demikian disebut masyarakat yang rendah kepercayaan antar warganya (*low trust*). Itulah sebabnya kebersamaan (solidaritas sosial) antar warga PBL saat ini tidak terbangun dengan baik. Hal ini ditandai oleh semakin sulitnya membangun kerja sama antar warga pulau terutama partisipasi dalam pembangunan.

Secara teori, hal ini dapat dipahami bahwa ketika masyarakat semakin terpengaruh dengan aspirasi hidup yang lebih tinggi, maka seseorang cenderung semakin memanfaatkan waktu yang ada untuk bekerja demi kepentingan diri dan keluarganya. Dalam situasi demikian otomatis mereka kurang memperhatikan kepentingan orang lain, termasuk tetangganya. Artinya mereka (warga) lebih memilih memenuhi kepentingan diri dan keluarganya terlebih dahulu dengan memaksimalkan waktu yang dia miliki, dari pada kepentingan orang lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa, sifat individualistik telah merasuk kedalam jiwa komunitas PBL yang selama ini kuat memegang semangat kolektivitasnya. Tentu kondisi seperti ini kurang mengun-

tungkan bagi warga PBL, karena membuat mereka kehilangan jati dirinya yang berlandaskan pada semangat kolektivitas dan nilai-nilai moral religius.

Tergerusnya kepercayaan dan loyalitas warga PBL terhadap pemerintah, karena antara warga dan pemerintah (lurah) sudah tidak ada lagi ikatan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan yang dipelopori oleh pemerintah. Disamping itu pemerintah setempat kehilangan kewenangannya dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Tentu saja hal ini sangat tidak menguntungkan terutama kepada pemerintah setempat karena mengganggu keberlangsungan proses pembangunan di wilayahnya. Penelitian Li di wilayah pegunungan Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui program-program pembangunan yang digagas dan di bawah oleh para aktor-aktor pembangunan (nabi pembangunan) justru telah menggerus nilai-nilai lokal, bahkan cenderung menimbulkan disintegrasi sosial. Kondisi demikian kemudian memicu konflik sosial yang berkepanjangan di wilayah tersebut (*The Will To Improve*, 2012). Meskipun penelitian Li dan penelitian ini dilakukan pada tipe wilayah yang berbeda, namun ternyata menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Yaitu keduanya menemukan, bahwa intervensi pembangunan melalui program pembangunan menggerus kapital sosial di kedua komunitas tersebut.

Program pembangunan yang berlangsung di PBL, umumnya berbasis proyek dan lebih mengejar keuntungan dari pada kualitas. Karenanya tidak mengherankan jika pemenang tender cenderung mendatangkan pekerja dari

luar pulau dari pada mempekerjakan warga pulau. Akibatnya partisipasi warga dalam pembangunan rendah. Secara teori hal ini dapat dipahami bahwa ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, maka partisipasinya terhadap proses pembangunan di wilayah tersebut cenderung rendah. Begitu pula ketika masyarakat semakin terpengaruh dengan aspirasi hidup yang lebih tinggi, maka mereka cenderung memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif untuk bekerja demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sementara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan cenderung diabaikan.

Program pembangunan jalanan dan dermaga (pelabuhan) memberi kontribusi yang sangat besar bagi komunitas PBL. Salah satu aspek yang sangat menonjol kemajuannya adalah terbangunnya jaringan sosial baik di dalam pulau maupun di luar pula. Terbangunnya jaringan sosial di dalam pulau menyebabkan solidaritas soail antar warga berubah dari solidaritas sosial organik menjadi solidaritas sosial mekanik. Bertambahnya jaringan sosial warga PBL ke luar pulau secara tidak langsung dapat menciptakan berbagai peluang diantaranya adalah peluang kerja dan berusaha. Masuknya pemilik modal dari luar pulau untuk menanamkan modalnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha bagi warga. Melalui peluang tersebut warga PBL semakin meningkat pendapatannya sehingga mereka dapat membangun rumah yang dilengkapi perabotan yang cukup mewah. Selain itu masuknya pendatang baru dari luar pulau sebagai pekerja/buruh pada satu sisi menguntungkan warga PBL, namun pada sisi yang lain juga membawa

konsekwensi baru. Antara lain misalnya terjadi persaingan kesempatan kerja, menambah kepadatan pulau yang berimplikasi pada semakin sempitnya lahan terbuka di PBL.

Dampak penetrasi pasar melalui derasnya aliran masuk barang, jasa/orang dan komersialisasi hasil laut, menyebabkan perubahan orientasi hidup warga di PBL dari sikap yang dijiwai oleh semangat spiritualistik menjadi semangat materialistik. Perubahan tersebut ditandai oleh berubahnya sistem mata pencaharian dari pola konsumtif (subsistensi), menjadi pola perdagangan (komersialisasi). Kondisi tersebut menyebabkan tergerusnya prinsip saling berbagi (resiprositas) dan kejujuran dalam pembagian hasil laut pada komunitas nelayan pulau-pulau kecil. Pada tahap ini telah terjadi perubahan rasionalitas sosial warga pulau yang semula berlandaskan pada norma-norma sosial, adat istiadat dan tradisi, menjadi rasionalitas ekonomik yang berlandaskan pada pemikiran rasional pragmatis. Perubahan tersebut menyebabkan prinsip berbagi (resiprositas) dikalangan warga sudah luntur (tergerus), karena semua hasil pencarian/tangkapan senantiasa diperhitungkan sebagai barang komoditas perdagangan (komersial). Jika harga ikan sedang tinggi, tidak jarang para nelayan penangkap ikan (pa'ES) beserta ponggawanya menjual semua hasil tangkapannya dan tidak untuk konsumsi keluarga. Tetapi mereka akan menyisihkan hasil tangkapan ikan jika ada tamu yang berkunjung ke rumah mereka. Perubahan yang terjadi pada komunitas nelayan PBL menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan orientasi berpikir bagi warga dari rasionalitas sosial ke rasionalitas ekonomik.

Perubahan lain dari adanya penetrasi pasar masuk ke PBL adalah bertambahnya jaringan sosial pada warga baik di dalam maupun di luar pulau. Interaksi sosial yang terbangun dikalangan buruh nelayan yang melintasi wilayah pulau telah membangun atau menjadi penyambung pertalian persahabatan/persaudaraan yang makin lama semakin kuat, sehingga tercipta solidaritas sosial diantara mereka (*bridging social capital*). Sedangkan interaksi sosial yang terbangun antara buruh nelayan dengan juragan dan ponggawanya yang melintasi wilayah geografis dan tingkatan strata sosial menumbuhkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan (*linking social capital*). Interaksi sosial tersebut tetap terpelihara dan terus terbangun pada kedua belah pihak, meskipun hubungan kerja diantara keduanya sudah tidak terjadi lagi (putus kontrak).

Penetrasi pasar masuk ke PBL juga menggerus kepercayaan warga kepada pengusaha lokal. Tergerusnya kepercayaan (*trust*) warga PBL terhadap pengusaha lokal terutama disebabkan karena terbangunnya perilaku tidak jujur (curang) dalam pembagian hasil. Oleh komunitas pulau perilaku ketidakjujuran atau curang tersebut mereka sebut dengan istilah “*nalukkaki kalenna*”, artinya mencuri miliknya (hasil usahanya) sendiri. Maknanya adalah para pengusaha teripang tidak jujur dalam pembagian hasil tangkapan/-pencarian, sehingga para buruh nelayan merasa di rugikan. Hal ini menunjukkan bahwa penetrasi pasar di PBL telah menyebabkan ketidakadilan hubungan kerja antara juragan (ponggawa) dengan buruh (sawi). Dalam hal ini buruh berada pada posisi yang lemah (tersubordinasi). Gramsci menye-

butnya sebagai kelas penguasa (pengusaha), menghegemoni atau mendominasi kelas bawah (buruh/sawi). Sedangkan Marx menyebutnya eksploitasi buruh nelayan (*proletar*) oleh ponggawa/juragan atau pemilik modal (*borjouasi*). Kondisi ini terjadi karena buruh berada pada posisi tawar yang rendah sebagai dampak dari melimpahnya persediaan tenaga kerja (buruh) yang didatangkan dari luar pulau.

Perubahan kapital sosial di PBL tidak saja disebabkan oleh adanya intervensi negara dan penetrasi pasar. Namun pembangunan serta perkembangan rumah ibadah (masjid) turut menyumbang terjadinya perubahan pada komunitas. Perubahan dimaksud yaitu meningkatnya spirit keagamaan, solidaritas sosial dan bertambahnya jaringan sosial baru. Namun pada sisi lain menyebabkan tergerusnya kepatuhan warga terhadap nilai/norma setempat, dari yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam digantikan oleh kepatuhan pada nilai/norma yang sesuai dengan syariat agama Islam.

Masuknya kelompok “*Jama’ah tabliq*” untuk berdakwah, memiliki pengaruh besar terhadap perubahan semangat keberagamaan warga. Semangat keberagamaan tersebut, menciptakan suasana keakraban yang selanjutnya membuat jaringan antar teman dan antar tetangga semakin mudah tercipta. Pada umumnya dalam masyarakat yang telah memiliki kesamaan pandang, kesamaan kebutuhan dan kepentingan bersama, biasanya mudah tercipta kerja sama (solidaritas sosial mekanik). Praktik nilai-nilai lokal yang diperkuat oleh pemahaman ajaran agama yang baik memperkuat jalinan persaudaraan dan ikatan kekeluargaan komunitas PBL. Adanya gerakan “*Jama’ah Tabliq*” di PBL

selain berhasil membangun pemahaman aqidah dan syariat Islam, juga secara perlahan merubah kebiasaan warga untuk tidak melakukan ritual-ritual atau upacara-upacara adat yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Antara lain; kebiasaan mandi syafar di masjid menjelang masuknya bulan ramadhan, bakar lilin di masjid pada malam hari menjelang bulan ramadhan, ziarah ke makam leluhur ketika akan ada hajatan, upacara sesajian (pa'rappo) sebelum melaksanakan pencarian/penangkapan.

Merujuk pada paparan di atas dapat dirumuskan simpulan bahwa bertambah/menguatnya (*rekapitalisasi*) kapital sosial yang diakibatkan oleh intervensi negara pada komunitas PBL tidak sebanding dari dampak yang diakibatkan oleh penetrasi pasar. Dalam arti bahwa meskipun intervensi negara menguatkan kapital sosial pada dimensi tertentu namun penambahan/penguatan tersebut pada akhirnya akan tetap mengalami penggerusan (*dekapitalisasi*). Hal ini dapat terjadi karena daya rusak penetrasi pasar terhadap kapital sosial jauh lebih dahsyat dari pada proses penambahan/penguatan kapital sosial sebagai dampak dari intervensi negara melalui program-program pembangunan.

C. Implikasi Kebijakan

Tingkat pengembangan teoritik sebagai upaya untuk memenuhi pengembangan teori-teori sosiologi dalam kajian sosiologi ekonomi, maka dianjurkan menggunakan kombinasi (triangulasi) metode dan teknik penelitian terutama pada proses dan instrumen pengumpulan data penelitian. Sebagaimana yang telah dilakukan dalam peneliti ini untuk

mendapatkan fakta-fakta yang lebih meyakinkan yaitu tidak saja dalam memberikan penjelasan bagaimana proses terjadinya perubahan kapital sosial, namun lebih jauh dari itu. Penjelasan mengenai bagaimana dampak intervensi negara melalui program pembangunan dan penetrasi pasar melalui arus barang dan orang masuk ke pulau, serta komersialisasi yang terjadi pada komunitas atau masyarakat. Sebagai upaya untuk memperkuat analisa dari fakta dan data yang diperoleh tidak hanya mengandalkan penjelasan kualitatif semata, akan tetapi juga diperkaya dengan data kuantitatif.

Kapital sosial yang di miliki oleh komunitas (masyarakat) dapat menjadi kekuatan yang potensial dalam mendukung pelaksanaan proses pembangunan, baik pada level nasional (negara), daerah (provinsi dan kabupaten) terlebih lagi pada level komunitas (perdesaan). Namun selama ini, kapital sosial dalam hal ini nilai-nilai lokal komunitas sering kali diabaikan manfaatnya dalam proses pembangunan, sehingga semakin lama proses pembangunan berlangsung menyebabkan nilai-nilai lokal justru tergerus. Hal ini kemudian berdampak pada hilangnya identitas diri masyarakat dan menggoyahkan harmoni kehidupan sosial yang telah tercapai. Selanjutnya kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial yang berujung pada konflik sosial. Oleh karena itu pemanfaatan potensi lokal (kapital sosial) yang dimiliki masyarakat, harusnya dimanfaatkan dalam hal pelibatan masyarakat secara langsung dalam semua tahapan proses pembangunan. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah. Begitu pula upaya untuk

membangkitkan kembali nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh masyarakat harus terus dilaksanakan. Bukan lagi hanya sekedar wacana tetapi memang harus dilaksanakan pada tataran implementasi. Dengan pelibatan masyarakat tersebut, akan muncul rasa tanggung jawab dan dukungan kuat dari masyarakat itu sendiri. Jika hal ini terjadi, maka proses pembangunan akan berjalan lancar sehingga dapat mencapai target dan sasaran yang diharapkan.

Kuatnya penetrasi pasar hingga sampai pada level komunitas yang terpencil, pada satu sisi memang berhasil mengubah tampilan kehidupan masyarakat (gaya hidup modern). Akan tetapi pada sisi lain, memunculkan semangat konsumerisme yang begitu kuat dikalangan masyarakat. Sehingga tanpa disadari melemahkan (menggerus) prinsip berbagi (resiprositas) pada masyarakat. Sebaliknya semangat individualis semakin kuat tertanam pada jiwa masyarakat. Untuk itu perlu ada kebijakan yang sistematis untuk memproteksi masyarakat terutama komunitas lokal dari kepunahan nilai-nilai lokal (kapital sosial) yang selama ini dimiliki. Ada banyak pilihan sebagai upaya untuk itu, antara lain: terus menggalakkan even-even berupa kontes yang menampilkan pesona budaya dan nilai-nilai lokal, memberi apresiasi dan penghargaan bagi mereka yang konsern membangun serta mempertahankan keunggulan budaya dan nilai-nilai lokal melalui sosialisasi dari generasi ke generasi. Yang paling penting adalah terus menggalakkan studi-studi yang menggali nilai-nilai lokal, sebagai kapital sosial masyarakat.

Masuknya kelompok “*Jama’ah
Tabliq*” untuk berdalalah,
memiliki pengaruh besar
terhadap perubahan semangat
keberagaman warga.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Suparman, 2013. Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas, *Jurnal Socius* Volume XII, Sosiologi Fisip Unhas, Makassar.
- Anwar J., Sakaria, 2012. Pengetahuan Lokal (Indigenous Knowledge) “Pasompe” Bugis–Makassar dalam Menjelajah Nusantara, *Jurnal Sosiologi Reflektif* Volume VII, Yogyakarta.
- Agger, Ben, 2009, *Teori Sosial Kritis, Kritik Penerapan dan Implikasinya*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Akram-Lodhi, A.H. et. Al. 2007. *Land, Poverty, and livelihoods in an Era of Globalization (Perspective from developing and Transition Countries)*. Routledge. London and New York.
- Allen, T and Thomas A. 2000. *Poverty and Development into 21st Century*. Oxford University Press. Oxford.
- Ancok, Djamaluddin, 2003, *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 3 Mei 2003.
- Barlet, P.F. 1980. Adaptive Strategies in Peasant Agricultural Production. *Annual Review of Anthropology*, vol. 9, pp. 545-573.

- Bebbington, et al. 2006. *The Search For Empowerment Social Capital as Idea and Practice at The World Bank*. Kumarian Press inc.
- Bourdieu, Pierre, 1985. the Forms of Capital. In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. John Richardson, New York: Greenwood.
- _____. 2010. *Arena Produksi Kultural Sebagai Kajian Sosiologi Budaya (Terjemahan Yudi Santoso)*, Kreasi Wacana, Bantul.
- Bowles, Samuel. 1999. "Social Capital" and Community Governance. *Focus: Newsletter of the Institute for Research on Poverty* 20(3): 6-10.
- Burt, R.S., 2000, *The Network Structure of Social Capital*, in R.I. Sutton, B.M. Staw (edt), *Research in Organisational Behavior*, Greenwich, Jai Press.
- Cleaver, Frances. 2005. the Inequality of Social Capital and The Reproduction of Chronic Poverty. *Elsevier Journal World Development* Vol. 33, No.6, PP. 893-906, 2005.
- Chupp, Mark. 1999. *Investing in People through Place: The Role of Social Capital in Transforming Neighborhoods. A Literature Review of Social Capital and Neighborhood Transformation*. Cleveland: Cleveland State University, Levine College of Urban Affairs.
- Coleman, James. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology* 94 (supplement): S95-S120.
- Collins, Randall, 1994. *Four Sociological Tradition*, Oxford University Press, New York.
- Creswell John W., 2001. *Research Desain, Quantitatif & Kualitatif Aproach*, Sage Publication, Inc.
- Dahuri, R.; J. Rais, S.P. Ginting; dan M.J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____. 2000, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*. LISPI kerjasama dengan Dirjen P3K Departemen Perikanan dan Kelautan. Jakarta.
- _____. 2001, *Kebijakan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Kabinet Gotong*

- Royong menuju pemulihan Ekonomi Bangsa Indonesia yang Maju, Makmur dan Berkeadilan Sosial. Departemen Perikanan dan Kelautan. Jakarta.
- _____. 2002. Kebijakan Nasional dan Renstra Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Secara Berkelanjutan. Departemen Perikanan dan Kelautan. Jakarta.
- Damsar, 2009, Pengantar Sosiologi Ekonomi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dasgupta, Partha and Ismail Serageldin, eds., 2000. Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington DC: World Bank.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (Editors), 1994. Handbook of Qualitative Research (second edition), Thousand Oaks, Sage Publication, Inc., London.
- Dewan Hankamnas, 1996, Benua Maritim Indonesia, BPPT, Jakarta.
- Dharmawan, A.H. dan Agustina M. Purnomo, 2006, Strategi Nafkah dan Kegagalan Investasi “Modal Sosial Bentukan”: Pelajaran dari Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kuningan, Makalah Hasil Penelitian, Program Studi Sosiologi Perdesaan Sekolah Pascasarjana, IPB.
- _____. 2007. Sistem Penghidupan dan Nafkah Perdesaan: Pandangan Sosiologi Nafkah (*Livelihood Sociology*) Mahzab barat dan Mahzab Bogor. Jurnal Sodality Vol. 01 No. 02, agustus 2007. Hal 169-192.
- Dieters, Evers Hans, 1988, Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern, Obor Indonesia, Jakarta.
- Dove, Michael R., (penyunting), 1985, Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Durlauf, Steven. 1999. The Case “Against” *Social Capital*. Focus: Newsletter of the Institute for Research on Poverty 20(3): 1-5.
- Edkins, Jenny-William, Nick Vaughan, 2009. Teori-teori Kritis; Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional (Terjemahan Teguh Wahyu Utomo), Pustaka Baca, Yogyakarta.

- Edwards, Bob, and Michael Foley. 1997. Social Capital and the Political Economy of Our Discontent. *American Behavioral Scientist* 40 (5): 669-78.
- Ellis, F. 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press. Oxford and New York.
- Feeny, D. 1983. The Moral or The Rational Peasant? Competing Hypotheses of Collective Action. *Journal of Asian Studies*, Vol. 42/4, pp. 769-789.
- Field, John, 2010, *Modal Sosial Terjemahan dari Judul Asli Social Capital, Kreasi Wacana, Bantul*.
- Fine, Ben. 2001. *Social Capital Versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the Turn of Millenium*. London: Routledge.
- Foley, Michael, and Bob Edwards. 1997. Escape from Politics? Social Theory and Social Capital Debate. *American Behavioral Scientist* 40(5): 550-61.
- Forsyth, Tim, 2004, *Critical Political Ecology, The Politics and Environmental Science*, British Library Cataloguing in Publication Data, London.
- Fukuyama, Francis, 2002, *The Great Disruption, Hakekat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*, Qalam, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Social Capital, Civil Society and Development*, *Third World Quarterly*, Vol. 22 NO.1 pp 7-20.
- _____, 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- _____, 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Geertz, C. 1978. The Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing. *The American Economic Review*, Vol. 68/2, pp. 28-32.
- Gittel, Ross, and Avis Vidal. 1998. *Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gramsci, Antonio, 1971, *Selection From The Prison Notebooks*, New York: International Publishers.

- Granovetter, Mark, Economic Action, and Social Structure: The Problem Of Embeddedness, *American Journal of Sociology* 91 (1985) 481-510. Grootaert, Christiaan. 1998. *Social Capital: The Missing Link*. Working Paper No. 3. Washington DC: The World Bank.
- Habermas, Jurgen, 2004, *Krisis Legitimasi*, Qalam, Yogyakarta.
- Hamid, Abu, 1999, *Pengembangan Masyarakat Nelayan dan Kemaritiman, Suatu Studi Sosio Antropologi Ekonomi*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Press, Makassar.
- Hamilton, William. 1999. *How Suburban Design Is Failing Teen Agers*. *New York Times*, May 6, p. F1.
- Hardiman, F.Budi, 1993, *Refleksi Sosial Menuju Masyarakat Komunikatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hasbullah, Jousairi, 2006. *Social Kapital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*, MR-United Press, Jakarta.
- Hayami, Yujiro, dan Masao Kikuchi, 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Perdesaan*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Hendarto, Heru, 1993. "Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci" dalam Tim Redaksi Driarkara ed. *Capita Selecta Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Heryanto, Deddy dan Kiswanto Eddy, 2003. *Dampak Kebijakan APBN pada Perekembangan Usaha Kecil dalam Pasar yang Adil Bagi Usaha Kecil*, *Jurnal Analisis Sosial*, Hal 8 No. 1, Februari, 2003 Hal. 63-84, Akatiga Bandung.
- Heryanto, Arief, 1996. "Bahasa Politik", *Forum Keadilan* V/1, 22 April 63.
- Iqbal, Moch. 2004. *Strategi Nafkah Rumahtangga Nelayan. Studi Kasus di Dua Desa Nelayan tangkap Kab. Lamongan Jawa Timur*. Tesis Master SPS IPB. Bogor.
- Kahn, J.S. 1985. *Peasant Ideologies in the Third World*. *Annual Review of Anthropology*, Vol. 14, pp. 49-75.
- Kinseng, Rilus A. 2007, *Kelas dan Konflik Sosial pada Kaum Nelayan di Indonesia*, Disertasi, UI Press, Jakarta.
- Kolopaking, L.M., 2011. *Menuju Desa 2030, Pohon Cahaya*, Yogyakarta.

- _____, dan Fredian Tony, 2005. Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Komunitas. Bahan Pelatihan Kerjasama Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat dengan Dirjend. Pengembangan Masyarakat Desa, Depdagri RI.
- Kusnadi, 2007, Jaminan Sosial Nelayan, LKIS, Yogyakarta.
- _____, (suntingan), 2004, Polemik Kemiskinan Nelayan, Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan, Bantul.
- Krishna, Anirudh. 2004. Understanding, Measuring, and Utilizing Social Capital: Clarifying Concepts and Presenting Field Application from India. *Journal Elsavier Agricultural System* 82 (2004) 291-305.
- Lawang, Robert Z, 2006, Anti Desa Sebuah Telaah Sosiologi (pidato Guru Besar Sosiologi Modern Fisip UI), UI, Jakarta.
- _____, 2005, Kapital Sosial; Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar, Edisi Pertama. Jakarta. FISIP UI Press.
- Lin, Nan. 2004. *Social Capital a Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Pres.
- Lin, Nan dkk (edt), 2009, *Social Capital, and Research*, Aldine De Gruyter, New york.
- Naping, Hamka, 2013, Modal Sosial Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Secara Mandiri Pada Desa Nelayan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, *Jurnal Socius* Volume XII, Sosiologi Fisip Unhas, Makassar.
- Nugroho, Heru, 2000, *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuryaddin, La Ode Taufik. 2010. *Kapital Sosial Komunitas Suku Bajo Studi Kasus Komunitas Suku Bajo di Pulau Baliara, Provinsi Sulawesi*
- Tenggara. Disertasi. FISIP UI Depok. Mappawata, Tatjong, 1986. *Hubungan Patron Klien di Kalangan Nelayan, Studi Kasus Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Thesis S2 Pascasarjana UI, Jakarta.
- Mawarni, Agnes, 2010. Pentingnya Modal Sosial dalam Pembangunan Pasca Bencana, *Jurnal PSPK UGM*, Yogyakarta.

- Pelras, Christian, 1981. Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis-Makassar, Ujung Pandang (Monografi).
- Polanyi, Karl, 1994. Transformasi Besar; Asal usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang (Terjemahan M. Taufiq Rahman), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Portes, Alejandro, 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology* 24:1-24.
- _____, and Patricia Landolt. 1996. The Downside of Social Capital. *American Prospect*, May-June, pp. 18-21, 94.
- Portney, Kent, and Jeffrey Berry. 1997. Mobilizing Minority Community: Social Capital and participation in Urban Neighborhoods. *American Behavioral Scientist* 40(5): 632-44.
- Putnam, Robert. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *American Prospect*. Spring.
- _____, 1995. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy* 6:65-78.
- _____, 1996. The Strange Disappearance of Civic America. *American Prospect*, winter, pp. 34-48.
- Prayitno, Ujianto Singgih, 2004, *Modal Sosial dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Prijono, Onny S & Pranaka A.M.W (penyunting), 1996, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern (Alimandan Terjemahan)*, Kencana, Jakarta.
- Ritzer, George, 1980. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Alimandan Terjemahan)*, Rajawali, Jakarta.
- Rothstein, BO, 2005. *Social Traps and The Problem of Trust*, Cambridge University Press, New York.
- Rukminto, Adi Isbandi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas, dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Pisp UI Press, Jakarta.
- _____, Adi Isbandi, 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Pers PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta.

- Saad, Sudirman. 2009. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia. Yogyakarta. LkiS.
- Saegert, Susan dkk (editor), 2001, *Social Capital and Poor Communities*, New York, Russell Sage Foundation.
- Sallatang, M.A., 1976. *Desa Pantai di Sulawesi Selatan dan Strategi Pengembangannya*, Team Studi Perdesaan Unhas, Ujung Pandang.
- _____, 1982. *Pinggawa-Sawi: Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*, Depdikbud, Jakarta.
- Salman, Dharmawan, 2006, *Jagad Maritim, Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*, Ininnawa, Makassar.
- Santoso, Sudir, 2011. *Desa dalam Kekuasaan Supra Desa*, Jurnal PSPK UGM, Yogyakarta.
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Cidesindo, Jakarta.
- Subejo, 2004, *Peranan Social Capital dalam Pembanguna Ekonomi*, Suatu Pengantar untuk Studi Social Capital di Perdesaan Indonesia, *Jurnal Argo Ekonomi*, Vol. 11. No. 1 Juni, 2004 (77-86).
- Sugiono, Muhadi, 1999. *Kritik Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2010*, BPS Sulawesi Selatan, Makassar.
- Susetiawan, 2009. *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sebuah Ketidkaberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*, Working Paper, Yogyakarta.
- _____, 2011. *UU Desa: Mengembalikan Kedaulatan Menuju Pembangunan Desa Berkelanjutan*, Jurnal PSPK UGM, Yogyakarta.
- Statistik Indonesia, 2009*, *Statistical Yearbook of Indonesia*, BPS Indonesia, Jakarta.
- Syahyuti, 2006, *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Perdesaan dan Pertanian*, PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta.

Verhesen, Peter, 2003, Social Capital, Trust and Vulnerability in Social Interaction, UGM Lecture Dept. Social Science, Nov. 2003.

Woolcock, M., 2001. *The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcome*, *Canadian Journal of Policy Research*, 2 (1): 1-27.

*Perubahan kapital sosial
di PBC tidak saja
disebabkan oleh adanya
intervensi negara dan
penetrasi pasar, namun
perkembangan rumah
badah (masjid) juga turut
menyumbang terjadinya
perubahan tersebut.*